



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2024**

TENTANG

**JADWAL RETENSI ARSIP DAN PENYUSUTAN ARSIP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pemerintah daerah perlu menetapkan Jadwal Retensi Arsip dan Penyusutan Arsip;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Jadwal Retensi Arsip dan Penyusutan Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

- Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6356);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2009 tentang Prosedur Penetapan Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 1787);

9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 624);
10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787);
11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 8 Tahun 2022 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1015);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 76);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 37);
14. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 330), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir

Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 Nomor 486);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP DAN PENYUSUTAN ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom di sebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas zona/area yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang tugasnya memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya.
6. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi

kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

7. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip yang dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
9. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
10. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
11. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya dan berketerangan dipermanenkan, yang telah diverifikasi secara langsung atau tidak langsung oleh lembaga Kearsipan.
12. Arsip Vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
13. Arsip Digital adalah arsip yang diciptakan dan digunakan dalam bentuk elektronik.
14. Arsip Substantif adalah arsip yang berkaitan dengan tugas dan fungsi yang meliputi pembinaan Kearsipan, konservasi Arsip, pendidikan dan pelatihan Kearsipan, akreditasi Kearsipan, pengkajian dan pengembangan kearsipan serta jasa kearsipan.
15. Arsip Fasilitatif adalah arsip yang berkaitan dengan bidang fasilitatif yang meliputi keuangan, kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan kerja sama, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan, kearsipan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, kepustakaan, informatika/Surat Izin Mengemudi (SIM)/Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), pengawasan dan perlengkapan.
16. Arsiparis adalah pejabat fungsional Arsiparis pada Dinas dan/atau Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
17. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
18. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan Kearsipan.
19. Lembaga Kearsipan adalah lembaga yang memiliki

- fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan Kearsipan.
20. Penyelenggaraan Kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan Kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem Kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya.
 21. Pengelolaan Arsip Dinamis adalah proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, serta penyusutan arsip.
 22. Pengelolaan Arsip Statis adalah proses pengendalian arsip Statis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dalam suatu sistem Kearsipan nasional.
 23. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip.
 24. Retensi Aktif adalah masa simpan minimal suatu jenis arsip pada Unit Pengolah.
 25. Retensi Inaktif adalah masa simpan minimal suatu jenis arsip pada Unit Kearsipan/ Pusat Arsip.
 26. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
 27. Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif adalah daftar yang berisi jenis Arsip Fasilitatif beserta jangka waktu penyimpanannya sesuai dengan nilai kegunaannya dan dipakai sebagai pedoman penyusutan Arsip fasilitatif keuangan, kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan kerja sama, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan, Kearsipan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, kepustakaan, informatika/Surat Izin Mengemudi (SIM)/Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), pengawasan dan perlengkapan.
 28. Jadwal Retensi Arsip Substantif adalah daftar yang berisi jenis Arsip Substantif beserta jangka waktu penyimpanannya sesuai dengan nilai kegunaannya dan dipakai sebagai pedoman penyusutan arsip substantif bidang pembinaan Kearsipan, konservasi arsip, pendidikan dan pelatihan Kearsipan, akreditasi Kearsipan, pengkajian dan pengembangan

Kearsipan serta jasa Kearsipan.

29. Keterangan Musnah adalah keterangan yang menyatakan bahwa jenis arsip dapat dimusnahkan karena jangka waktu penyimpanan telah habis dan tidak memiliki nilai guna lagi.
30. Keterangan Permanen adalah keterangan yang menyatakan bahwa suatu jenis arsip yang memiliki nilai guna sekunder atau nilai guna permanen, wajib diserahkan kepada Lembaga Kearsipan Daerah sebagai bukti pertanggung jawaban sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing.
31. Keterangan Dinilai Kembali adalah keterangan yang menyatakan bahwa arsip akan dinilai kembali ditentukan pada arsip yang dianggap berpotensi menimbulkan sengketa atau perselisihan.
32. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit Kearsipan, pemusnahan Arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan Arsip Statis kepada lembaga Kearsipan.
33. Pemusnahan Arsip adalah kegiatan pemusnahan Arsip yang tidak mempunyai nilai kegunaan dan telah melampaui jangka waktu penyimpanan.
34. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab dibidang pengelolaan arsip dinamis.
35. Unit Pengelola adalah unit kerja yang menangani dan bertanggung jawab atas masalah Kearsipan pada setiap fungsi organisasi disamping tugas pokoknya.
36. Asas asal usul adalah asas yang dilakukan untuk menjaga Arsip tetap terkelola dalam satu kesatuan Pencipta Arsip (*provenance*), tidak dicampur dengan Arsip yang berasal dari Pencipta Arsip lain, sehingga Arsip dapat melekat pada konteks penciptaannya.
36. Asas aturan asli adalah asas yang dilakukan untuk menjaga Arsip tetap ditata sesuai dengan pengaturan aslinya (*original order*) atau sesuai dengan pengaturan ketika Arsip masih digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Pencipta Arsip.
Asas aturan asli adalah asas yang dilakukan untuk menjaga Arsip tetap ditata sesuai dengan pengaturan aslinya (*original order*) atau sesuai dengan pengaturan ketika Arsip masih digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Pencipta Arsip.

FUNGSI, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP JADWAL RETENSI ARSIP

Pasal 2

- (1) Fungsi Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat adalah sebagai berikut:
 - a. sebagai pedoman untuk menentukan masa simpan Arsip;
 - b. sebagai rekomendasi tentang penetapan jenis Arsip yang dimusnahkan, dinilai kembali dan dipermanenkan;
 - c. sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan Arsip.
- (2) Rekomendasi tentang penetapan jenis Arsip yang dimusnahkan, dinilai kembali dan dipermanenkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) tidak bersifat mutlak karena dapat diperpanjang masa simpan Arsip nya oleh unit pengelola.

Pasal 3

Tujuan penyusunan Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat selain untuk mempermudah proses penyusutan Arsip secara teratur juga untuk:

- a. memenuhi kebutuhan organisasi pencipta Arsip yaitu mengurangi biaya pengelolaan Arsip, meningkatkan efisiensi, menjamin keselamatan bahan pertanggung jawaban dan mewujudkan konsistensi penyusutan Arsip.
- b. memenuhi persyaratan hukum, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi Negeri, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah wajib memiliki Jadwal Retensi Arsip.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Jadwal Retensi Arsip meliputi:
 - a. jenis Arsip berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta kegiatan seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;
 - b. jangka waktu simpan (retensi) Arsip aktif dan

- inaktif;
 - c. keterangan tindak lanjut dari penyusutan Arsip.
- (2) Jadwal Retensi Arsip sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYUSUTAN ARSIP

Pasal 5

Penyusutan Arsip merupakan kegiatan pengurangan Arsip yang dilakukan dengan cara:

- a. memindahkan Arsip inaktif dari unit pengelola ke unit Kearsipan masing-masing;
- b. memusnahkan Arsip yang telah habis retensinya dan tidak memiliki nilai guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. menyerahkan Arsip Statis ke lembaga Kearsipan daerah.

Bagian Kesatu Pemindahan Arsip Inaktif

Pasal 6

- (1) Pemindahan Arsip Inaktif adalah kegiatan pengurangan Arsip dan pengalihan tanggung jawab pengelolaan Arsip dari unit pengolah ke unit Kearsipan pada Perangkat Daerah.
- (2) Pemindahan Arsip inaktif dari perangkat daerah ke Lembaga Kearsipan Daerah dilakukan terhadap Arsip yang mempunyai keterangan permanen pada Jadwal Retensi Arsip atau Arsip yang memiliki retensi paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Pemindahan Arsip Inaktif dari unit pengolah ke Unit Kearsipan Perangkat Daerah menjadi tanggung jawab pimpinan Unit Pengolah.
- (4) Pemindahan Arsip Inaktif dari Perangkat Daerah ke LKD menjadi tanggung jawab pimpinan Perangkat Daerah.
- (5) Pemindahan Arsip Inaktif dilakukan dengan

prosedur sebagai berikut:

- a. pemeriksaan/penyeleksian Arsip;
- b. pembuatan Daftar Arsip;
- c. penataan Arsip;
- d. pelaksanaan pemindahan Arsip; dan
- e. pembuatan Berita Acara Pemindahan Arsip dan Daftar Arsip yang dipindahkan.

Pasal 7

Pemeriksaan/penyeleksian Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf a dilakukan dengan cara menyeleksi Arsip aktif yang dimiliki oleh Unit Pengolah melalui Jadwal Retensi Arsip dengan cara melihat pada kolom JRA untuk mengetahui Arsip tersebut sudah memasuki masa inaktif atau retensi aktifnya telah habis atau terlampaui, maka Arsip tersebut telah memasuki masa inaktif atau frekuensi penggunaan Arsip yang telah menurun ditandai dengan penggunaan kurang dari 5 (lima) kali dalam setahun dan dengan cara mencocokkan tahun penciptaan Arsip dengan retensi aktif yang tercantum pada JRA.

Pasal 8

- (1) Pembuatan daftar Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf b dilakukan dengan mencatat Arsip hasil seleksi ke dalam Daftar Arsip yang dipindahkan sesuai dengan penataan ketika Arsip tersebut masih aktif.
- (2) Pembuatan daftar Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan pemindahan Arsip.
- (3) Daftar Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang- kurangnya memuat:
 - a. pencipta Arsip;
 - b. unit pengolah;
 - c. kode klasifikasi;
 - d. nomor Arsip/berkas;
 - e. uraian informasi Arsip;
 - f. kurun waktu;
 - g. jumlah;
 - h. tingkat perkembangan; dan
 - i. keterangan

Pasal 9

- (1) Penataan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 ayat (5) huruf c dilakukan dengan mencantumkan nomor urut pada *folder* di sudut kiri atas sesuai daftar Arsip dan memasukkan Arsip beserta *foldernya* kedalam boks Arsip.

- (2) Penataan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas asal usul dan asas aturan asli.
- (3) Penataan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Unit Pengolah dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pengaturan fisik Arsip;
 - b. pengolahan informasi Arsip; dan
 - c. penyusunan daftar Arsip Inaktif.
- (4) Penataan Arsip Inaktif yang telah ditata dimasukkan ke dalam boks, dengan rincian kegiatan:
 - a. menata *folder*/berkas yang berisi Arsip Inaktif yang akan dipindahkan yang diurutkan berdasarkan nomor urut daftar Arsip Inaktif yang dipindahkan;
 - b. menyimpan dan memasukkan *folder*/berkas Arsip Inaktif ke dalam boks Arsip;
 - c. memberi label boks Arsip, dengan keterangan: nomor boks, nama unit pengolahan, nomor urut Arsip, dan tahun penciptaan Arsip; dan
 - d. penataan Arsip Inaktif dan pembuatan daftar Arsip Inaktif menjadi tanggung jawab Kepala Unit Pengolah.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Pemindahan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf d dilakukan dengan menyerahkan Arsip Inaktif ke Unit Kearsipan yang disertai dengan berita acara Pemindahan dan daftar Arsip yang dipindahkan.
- (2) Unit Pengolah memindahkan Arsip Inaktif ke Unit Kearsipan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali.
- (3) Pemindahan Arsip Substantif dan Arsip Fasilitatif dilakukan setelah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Lembaga Kearsipan Daerah.
- (4) Dalam hal pemindahan Arsip yang memiliki nilai guna berkelanjutan ke unit depot penyimpanan Arsip Inaktif yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan atau Pemindahan Arsip Inaktif di lingkungan Pencipta Arsip yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, pendokumentasian, proses pemindahan dilakukan dengan membuat

Berita Acara Pemindahan Arsip.

- (5) Berita Acara Pemindahan Arsip sekurang-kurangnya memuat waktu pelaksanaan, tempat, jenis Arsip yang dipindahkan, jumlah Arsip, pelaksanaan dan penandatanganan oleh pimpinan Unit Pengolah dan/atau Unit Kearsipan.
- (6) Format pembuatan Berita Acara Pemindahan Arsip dan daftar Arsip yang dipindahkan sebagaimana dimaksud tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pemusnahan Arsip

Pasal 11

- (1) Pemusnahan Arsip dilakukan terhadap Arsip dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. tidak memiliki nilai guna;
 - b. telah habis retensinya dengan keterangan dimusnahkan berdasarkan JRA;
 - c. tidak ada Peraturan Perundang-undangan yang melarang; dan
 - d. tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara.
- (2) Pemusnahan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara penghancuran fisik Arsip seperti pencacahan, penggunaan bahan kimia, *pulping* dan atau dengan cara-cara lain yang memenuhi kriteria yang disebut dengan istilah musnah.
- (3) Pemusnahan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. pembentukan panitia penilai Arsip;
 - b. penyeleksian Arsip;
 - c. pembuatan daftar Arsip usul musnah;
 - d. penilaian oleh panitia penilai;
 - e. permintaan persetujuan pemusnahan dari pimpinan pencipta;
 - f. penetapan Arsip yang akan dimusnahkan;
 - g. pelaksanaan Pemusnahan Arsip; dan
 - h. pembuatan Berita Acara Pemusnahan Arsip.

Pasal 12

Panitia penilai Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a ditetapkan oleh pimpinan Pencipta Arsip.

Pasal 13

Panitia penilai Arsip bertugas untuk melakukan penilaian Arsip yang akan dimusnahkan.

Pasal 14

- (1) Panitia penilai Arsip berjumlah ganjil dan sekurang-kurangnya memenuhi unsur sebagai berikut:
 - a. pimpinan Unit Kearsipan sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. pimpinan Unit Pengolah yang Arsipnya akan dimusnahkan sebagai anggota; dan
 - c. Arsiparis sebagai anggota.
- (2) Panitia penilai Arsip pemerintah daerah yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun terdiri dari:
 - a. pimpinan Unit Kearsipan pada tiap perangkat daerah sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. pimpinan Unit Pengolah yang Arsipnya akan dimusnahkan sebagai anggota; dan
 - c. Arsiparis sebagai anggota.
- (3) Panitia penilai Arsip pemerintah daerah yang memiliki retensi sekurang kurangnya 10 (sepuluh) tahun terdiri dari:
 - a. pimpinan Lembaga Kearsipan daerah sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. pimpinan perangkat daerah yang Arsipnya akan dimusnahkan sebagai anggota; dan
 - c. arsiparis sebagai anggota.

Pasal 15

Dalam hal Pencipta Arsip belum memiliki Arsiparis, anggota dapat digantikan oleh pegawai yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dibidang pengelolaan Arsip.

Pasal 16

Penyeleksian Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara menyeleksi

Arsip yang telah habis retensinya dan berketerangan musnah serta tidak terkait dengan Arsip lain untuk selanjutnya dibuatkan daftar.

Pasal 17

- (1) Pembuatan Daftar Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c dilakukan dengan mencatat Arsip dalam formulir Daftar Arsip Usul Musnah.
- (2) Daftar Arsip usul musnah sekurang-kurangnya berisi: nomor, jenis Arsip, tahun, jumlah, tingkat perkembangan, dan keterangan.
- (3) Format formulir daftar Arsip usul musnah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Penilaian terhadap daftar Arsip usul musnah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf d dilakukan dengan cara verifikasi secara langsung terhadap fisik Arsip.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam pertimbangan tertulis oleh panitia penilai Arsip.
- (3) Format formulir Surat Pertimbangan Panitia Penilai Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Persetujuan/pertimbangan pemusnahan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf e harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemusnahan Arsip di lingkungan pemerintahan kabupaten Pesisir Barat yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
 - b. pemusnahan Arsip di lingkungan pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati Pesisir Barat;
 - c. dalam hal pemusnahan Arsip tanpa Jadwal

Retensi Arsip harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tanpa membedakan retensinya.

- (2) Proses permohonan persetujuan/pertimbangan pemusnahan Arsip harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menyampaikan surat permohonan persetujuan/ pertimbangan dari pimpinan Pencipta Arsip kepada bupati
 - b. menyampaikan daftar Arsip usul musnah berupa Salinan cetak dan salinan elektronik; dan
 - c. menyampaikan surat pertimbangan oleh panitia penilai Arsip.

Pasal 20

Penetapan terhadap Arsip yang akan dimusnahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf f dikeluarkan oleh Pimpinan Pencipta Arsip dengan mengacu pada persetujuan tertulis dari bupati dan pertimbangan tertulis dari panitia penilai Arsip.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan pemusnahan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf g harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilakukan secara total sehingga fisik dan informasi Arsip musnah dan tidak dapat dikenali;
 - b. disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) pejabat dari unit kerja bidang hukum dan/atau unit kerja pengawasan dari lingkungan Pencipta Arsip yang bersangkutan; dan
 - c. disertai penandatanganan berita acara yang memuat daftar Arsip yang dimusnahkan.
- (2) Pelaksanaan pemusnahan Arsip dilakukan dengan membuat Berita Acara Pemusnahan beserta Daftar Arsip Usul Musnah yang dibuat rangkap 2 (dua).
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh pimpinan Unit Kearsipan, pimpinan Unit Pengolah yang Arsipnya akan dimusnahkan, dan disaksikan sekurang-kurangnya dari unit kerja bidang hukum dan unit kerja bidang pengawasan.
- (4) Format Berita Acara Pemusnahan Arsip sebagaimana dimaksud dalam dalam ayat (3) tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

Arsip yang tercipta dalam pelaksanaan kegiatan pemusnahan Arsip wajib disimpan oleh Pencipta Arsip, meliputi:

- a. keputusan pembentukan panitia pemusnahan Arsip;
- b. notulen rapat panitia penilai pemusnahan Arsip pada saat melakukan penilaian;
- c. surat pertimbangan dari panitia penilai kepada pimpinan Pencipta Arsip yang menyatakan bahwa Arsip yang diusulkan musnah dan telah memenuhi syarat untuk dimusnahkan;
- d. surat persetujuan pemusnahan Arsip dari Kepala ANRI untuk pemusnahan Arsip yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun;
- e. keputusan pimpinan Pencipta Arsip tentang penetapan pelaksanaan pemusnahan Arsip.
- f. berita acara pemusnahan Arsip
- g. daftar Arsip yang dimusnahkan.

Bagian Ketiga

Penyerahan Arsip Statis

Pasal 23

Penyerahan Arsip Statis adalah proses penyerahan Arsip Statis dari unit Kearsipan perangkat daerah, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan kepada Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Pasal 24

Penyerahan Arsip Statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan terhadap Arsip dengan kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki nilai guna kesejarahan;
- b. telah habis retensinya; dan/atau
- c. berketerangan dipermanenkan sesuai Jadwal Retensi Arsip yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

Penyerahan Arsip Statis dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. penyeleksian dan pembuatan daftar Arsip usul serah
- b. penilaian oleh panitia penilai Arsip;
- c. pemberitahuan penyerahkan Arsip Statis;

- d. verifikasi dan persetujuan;
- e. penetapan Arsip yang akan diserahkan;
- f. pelaksanaan Serah Terima Arsip Statis.

Pasal 26

- (1) Penyeleksian Arsip Statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dilakukan oleh Arsiparis di unit Kearsipan dengan cara melihat pada kolom retensi inaktif dan pada kolom keterangan yang dinyatakan permanen.
- (2) Dalam hal retensi inaktifnya telah habis atau terlampaui dan pada kolom keterangan dinyatakan permanen, maka Arsip tersebut telah memasuki masa Arsip usul serah.
- (3) Hasil penyeleksian Arsip dituangkan dalam daftar Arsip usul serah yang sekurang-kurangnya berisi: nomor, kode klasifikasi, uraian informasi Arsip, kurun waktu, jumlah Arsip dan keterangan.
- (4) Format Daftar Arsip yang Diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

- (1) Penilaian oleh panitia penilai Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dilakukan dengan cara verifikasi secara langsung terhadap fisik Arsip, dan hasil penilaian dituangkan dalam pertimbangan tertulis oleh panitia penilai Arsip.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dituangkan dalam pertimbangan tertulis oleh panitia penilai Arsip.

Pasal 28

- (1) Pemberitahuan akan menyerahkan Arsip Statis oleh pimpinan Pencipta Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c kepada Kepala Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Pesisir Barat disertai dengan pernyataan dari pimpinan Pencipta Arsip bahwa Arsip yang diserahkan autentik, terpercaya, utuh, dan dapat digunakan.
- (2) Proses pemberitahuan penyerahan Arsip Statis harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menyampaikan surat permohonan penyerahan Arsip Statis dari pimpinan Pencipta Arsip kepada Kepala Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

- b. menyampaikan daftar Arsip usul serah; dan
- c. menyampaikan surat pertimbangan oleh panitia penilai Arsip.

Pasal 29

- (1) Verifikasi daftar Arsip usul serah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d dilakukan oleh Kepala Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan permohonan penyerahan Arsip Statis dari Pencipta Arsip.
- (2) Kepala Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Pesisir Barat dapat memberikan rekomendasi atas hasil verifikasi daftar Arsip usul serah terhadap Arsip yang diterima atau ditolak kepada Pencipta Arsip.
- (3) Kepala Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Pesisir Barat memberikan persetujuan atas daftar Arsip usul serah dari Pencipta Arsip.

Pasal 30

Penetapan terhadap Arsip yang akan diserahkan kepada Lembaga Kearsipan Daerah kabupaten Pesisir Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e dikeluarkan oleh pimpinan pencipta Arsip dengan mengacu pada persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan Daerah kabupaten Pesisir Barat.

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan serah terima Arsip Statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f dilakukan oleh pimpinan Pencipta Arsip kepada Kepala Lembaga Kearsipan Daerah kabupaten Pesisir Barat dengan disertai berita acara, daftar Arsip usul serah dan fisik Arsip yang akan diserahkan.
- (2) Format Berita Acara Serah Terima Arsip tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 14 Mei 2024

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

AGUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui
pada tanggal 14 Mei 2024

Pj. SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,

ttd

JON EDWAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2024 NOMOR 509

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,



CHRISTIAN, S.H.,M.H.

NIP. 19860425 200912 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR : 12 TAHUN 2024
TENTANG : JADWAL RETENSI ARSIP DAN
PENYUSUTAN ARSIP DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PESISIR BARAT
KABUPATEN PESISIR BARAT

NAMA KLASIFIKASI	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN (RETENSI)		PENYUSUTAN AKHIR
	ARSIP AKTIF	ARSIP INAKTIF	
UMUM	0	0	-
KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN	0	0	-
Telekomunikasi	1	1	Musnah
Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0	0	-
Perjalanan Dinas Kepala Daerah	1	1	Musnah
Perjalanan Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	1	1	Musnah
Perjalanan Dinas Pegawai	1	1	Musnah
Perjalanan Dinas Luar Negeri	0	0	-
Perjalanan Dinas Kepala Daerah	1	1	Musnah
Perjalanan Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	1	1	Musnah
Perjalanan Dinas Pegawai	1	1	Musnah
Penggunaan Fasilitas Kantor	1	1	Musnah
Rapat pimpinan	1	1	Musnah
Penyediaan Konsumsi	1	1	Musnah

Pengurusan Kendaraan Dinas	0	0	-
Pengurusan surat-surat kendaraan dinas	1	1	Musnah
Pemeliharaan dan perbaikan	1	1	Musnah
Pengurusan kehilangan dan masalah kendaraan	1	1	Musnah
Pemeliharaan Gedung, Taman dan Peralatan Kantor	0	0	-
Pertamanan/ <i>Landscape</i>	1	1	Musnah
Penghijauan	1	1	Musnah
Perbaikan Gedung	1	1	Musnah
Perbaikan Peralatan Kantor	1	1	Musnah
Perbaikan Rumah Dinas/ Wisma	1	1	Musnah
Kebersihan Gedung dan Taman	1	1	Musnah
Pengelolaan Jaringan Listrik, Air, Telepon dan Komputer	0	0	-
Perbaikan / Pemeliharaan	1	1	Musnah
Pemasangan	1	1	Musnah
Ketertiban dan Keamanan	0	0	-
Pengamanan, Penjagaan, dan Pengawasan terhadap Pejabat, Kantor dan Rumah Dinas	1	1	Musnah
Laporan Ketertiban dan Keamanan	1	1	Musnah
Administrasi Pengelolaan Parkir	1	1	Musnah
Administrasi Pakaian Dinas Pegawai, Satpam, Petugas Kebersihan dan Pegawai lainnya	1	1	Musnah
PERLENGKAPAN	0	0	-
Inventarisasi dan Penyimpanan	0	0	-
Data hasil inventarisasi dan penyimpanan	2	3	musnah
Laporan dan evaluasi inventarisasi dan penyimpanan	2	3	musnah
Pemeliharaan peralatan kantor	0	0	-

Data hasil pemeliharaan kantor	2	3	musnah
Laporan dan evaluasi pemeliharaan kantor	2	3	musnah
Distribusi	0	0	-
Barang habis pakai	2	3	musnah
Barang milik daerah	2	3	musnah
Penghapusan Barang Milik Daerah	3	7	musnah
Pengelolaan <i>Database</i> Barang Milik Daerah	2	3	Permanen
PENGADAAN	0	0	-
Rencana Pengadaan Barang dan Jasa	2	3	Musnah
Pengadaan Langsung	2	3	Musnah
Pengadaan Tidak Langsung/Lelang	2	3	Musnah
Swakelola	2	3	Musnah
Pengolahan Sistem Informasi Pengadaan	2	3	Permanen
Monitoring dan Evaluasi	2	3	Permanen
PERPUSTAKAAN	0	0	-
Kebijakan di bidang Perpustakaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2	3	Permanen
Deposit Bahan Pustaka	0	0	-
Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	2	3	Permanen
Pangkalan Data Penerbit dan Pengusaha Rekaman	2	3	Permanen
Terbitan Internasional dan Regional	2	3	Permanen
Pemantauan Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	2	3	Permanen
Bibliografi dan Katalog	2	3	Permanen
Koleksi Pustaka	0	0	-
Pembelian	3	7	Musnah
Hibah	2	3	Permanen

Hadiah	1	1	Musnah
Tukar Menukar	1	1	Musnah
Implementasi Undang-Undang Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR)	2	3	Musnah
Terbitan Internal	1	1	Musnah
Pendistribusian bahan pustaka surplus	1	1	Permanen
Inventarisasi koleksi (Buku Induk)	2	3	Permanen
Pengolahan Bahan Pustaka	2	3	Permanen
Pangkalan Data Katalog Koleksi	2	3	Permanen
Layanan Perpustakaan	0	0	-
Keanggotaan	1	1	Musnah
Peminjaman	1	1	Musnah
Pengembangan gemar baca	1	1	Musnah
Kerjasama Perpustakaan	0	0	-
<i>Memorandum of Understanding (MoU)</i>	2	3	Permanen
Perjanjian kerjasama	2	3	Permanen
Partisipasi organisasi profesi dan kerjasama internasional	2	3	Permanen
Pengembangan Implementasi Teknologi Informasi Perpustakaan	0	0	-
Pengembangan situs web	1	1	Musnah
Pengembangan kemas ulang informasi multimedia	1	1	Musnah
Pengembangan program aplikasi perpustakaan	2	3	Permanen
Pengembangan pangkalan data kepastakaan digital	2	3	Permanen
Pangkalan Data Layanan Perpustakaan	2	3	Permanen
Konservasi	0	0	-
Perawatan Bahan Perpustakaan	2	3	Musnah
Perbaikan Bahan Perpustakaan	2	3	Musnah
Penjilidan Bahan Perpustakaan	2	3	Musnah

Reprografi (Mikrofilm, Reproduksi Foto)	2	3	Musnah
Transformasi Digital	2	3	Musnah
Kurasi Digital	2	3	Permanen
Pengembangan Perpustakaan	0	0	-
Perpustakaan Umum	2	3	Musnah
Perpustakaan Khusus	2	3	Musnah
Perpustakaan Sekolah	2	3	Musnah
Perpustakaan Perguruan Tinggi	2	3	Musnah
KEARSIPAN	0	0	-
Kebijakan di bidang kearsipan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2	3	Permanen
Pembinaan Kearsipan	0	0	-
Pengembangan Profesi Arsiparis	1	1	Permanen
Bimbingan Konsultasi Arsiparis	1	1	Musnah
Penilaian Arsiparis	1	1	Musnah
Pemilihan Arsiparis Teladan	2	3	Musnah
Data Base Arsiparis	2	3	Permanen
Bimbingan Konsultasi Kearsipan	2	3	Musnah
Supervisi dan Evaluasi	2	3	Musnah
Data Base Bimbingan dan Konsultasi dan Supervisi	2	3	Permanen
Fasilitasi Kearsipan	3	7	Musnah
Lembaga/Unit Kearsipan Teladan	2	3	Musnah
Jadwal Retensi Arsip	2	3	Permanen
Pengelolaan Arsip Dinamis	0	0	-
Penciptaan	2	3	Musnah
Pemberkasan Arsip Aktif	2	3	Musnah
Penataan Arsip Inaktif	2	3	Musnah

Penggunaan	1	1	Musnah
Autentikasi Arsip Dinamis	1	1	Permanen
Program Arsip Vital	2	3	Permanen
Pengelolaan Arsip Terjaga	2	3	Permanen
Penyusutan Arsip	0	0	-
Pemindahan Arsip	1	1	Musnah
Pemusnahan Arsip	1	1	Permanen
Penyerahan Arsip Statis	1	1	Permanen
Alih Media Arsip	2 ;	3	Permanen
Data Base Pengelolaan Arsip Dinamis	0	0	-
Data Base Pengelolaan Arsip Aktif	1	1	Permanen
Data Base Pengelolaan Arsip Inaktif	1	1	Permanen
Pengelolaan Arsip Statis	0	0	-
Akuisisi	1	1	Permanen
Penghargaan dan Imbalan	1	1	Permanen
Sejarah Lisan	1	1	Permanen
Daftar Pencarian Arsip Statis	1	1	Permanen
Menyusun Sarana Bantu Temu Balik	1	1	Permanen
Preservasi Preventif	2	3	Musnah
Preservasi Kuratif	1	1	Permanen
Autentikasi Arsip Statis	2	3	Permanen
Akses Arsip Statis	2	3	Musnah
Jasa Kearsipan	2	3	Musnah
Pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN)	2	3	Musnah
Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana	2	3	Musnah

Penyelamatan arsip Perangkat Daerah digabung dan/atau dibubarkan	2	3	Permanen
Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup	2	3	Musnah
Pengawasan Kearsipan	0	0	-
Pengawasan Kearsipan Internal	2	3	Musnah
Pengawasan Kearsipan Eksternal	2	3	Musnah
Sanksi	2	3	Musnah
PERSANDIAN	0	0	-
Kebijakan di bidang Persandian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2	3	Permanen
Pengamanan persandian	0	0	-
Pengamanan sinyal: teknik sandi dan kriptografi	2	3	Musnah
Analisis sinyal: teknik sandi dan kriptografi	2	3	Musnah
Materiil sandi: sistem dan peralatan	2	3	Permanen
Pengkajian persandian: Kriptografi, Peralatan Sandi, Komunikasi Sandi	0	0	-
Perencanaan Pengkajian	2	3	Permanen
Administrasi Pengkajian	2	3	Permanen
Pelaksanaan	2	3	Permanen
Pelaporan	2	3	Permanen
Pembinaan dan Pengendalian Persandian	0	0	-
Sumber Daya Manusia (SDM)	2	3	Musnah
Jaring Komunikasi	2	3	Musnah
Layanan Sertifikasi Elektronik	0	0	-
Perencanaan dan Administrasi	1	1	Musnah
Pelaksanaan Verifikasi	2	3	Musnah
Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama	2	3	Permanen
Penyesuaian Sistem dan Testing	1	1	Musnah

Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengguna	1	1	Permanen
Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Elektronik	2	3	Permanen
Pelaporan	2	3	Permanen
PERENCANAAN PEMBANGUNAN	0	0	-
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)	0	0	-
Musrenbang Provinsi	3	7	Permanen
Musrenbang Nasional	3	7	Permanen
Musrenbang Kab/Kota	3	7	Permanen
Musrenbang Kecamatan	3	7	Musnah
Musrenbang Kelurahan	3	7	Musnah
Musrenbang Desa	3	7	Musnah
Perencanaan Pembangunan Daerah	0	0	-
Rencana Pembangunan Jangka Panjang	2	3	Permanen
Rencana Pembangunan Jangka Menengah	2	3	Permanen
Rencana Anggaran Daerah	2	3	Musnah
Rencana Pembangunan Tahunan	2	3	Permanen
Rencana Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah	2	3	Musnah
Program kerja tahunan	2	3	Permanen
Penetapan / Kontrak Kinerja	2	3	Musnah
Laporan Berkala	1	1	Musnah
Laporan Insidental	1	1	Permanen
Evaluasi Program	1	1	Permanen
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	2	3	Permanen
Konsultasi Perencanaan Pembangunan	2	3	Musnah
Pemantauan, Evaluasi, Penilaian, dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan	1	1	Permanen

Aksi Strategis Daerah	0	0	-
Rancangan awal perencanaan aksi strategi daerah	3	7	Permanen
Rapat pembahasan rancangan awal dengan Perangkat Daerah	3	7	Permanen
Sosisalisasi dengan Perangkat Daerah	3	7	Permanen
Rancangan akhir perencanaan aksi strategi daerah	3	7	Permanen
Penerapan perencana aksi strategi daerah	3	7	Permanen
Perencanaan Pendanaan Pembangunan	0	0	-
Pendanaan Nasional dan Hibah	3	7	Permanen
Pendanaan Daerah	3	7	Permanen
Kerjasama Pembangunan Nasional	3	7	Permanen
Surat Berharga Syariah Negara	3	7	Permanen
Pendanaan <i>On Top</i> atau Inisiatif Baru	3	7	Permanen
ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	0	0	-
Struktur Organisasi di lingkungan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	0	0	-
Pembentukan	2	3	Permanen
Pengubahan	2	3	Permanen
Pembubaran	2	3	Permanen
Uraian Jabatan dan Tata Kerja	0	0	-
Analisa Jabatan	2	3	Permanen
Analisa Beban Kerja	2	3	Permanen
Ketatalaksanaan	0	0	-
Proses Bisnis	2	3	Permanen
Standar Pelayanan	2	3	Permanen
Standar Operasional Prosedur	2	3	Permanen
Pelayanan Publik	2	3	Permanen
Standar Kompetensi jabatan struktural dan fungsional	2	3	Permanen

Evaluasi Kelembagaan	2	3	Musnah
Koordinasi Penguatan Reformasi dan Birokrasi	0	0	-
Budaya Kerja	2	3	Musnah
Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	2	3	Musnah
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	2	3	Musnah
PENELITIAN, PENGKAJIAN, DAN PENGEMBANGAN	0	0	-
Kebijakan di bidang penelitian, pengkajian dan pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah	2	3	Permanen
Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan	2	3	Permanen
Sosialisasi dan Desiminasi Hasil penelitian, Hasil Pengkajian dan Pengembangan	2	3	Permanen
Bimbingan teknis penelitian, pengkajian dan pengembangan	2	3	Musnah
Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	2	3	Musnah
Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	0	0	-
Data	2	3	Permanen
Statistik	2	3	Permanen
Jurnal Hasil Penelitian/Pengkajian	2	3	Permanen
Master <i>proceeding</i> /jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	2	3	Permanen
Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)	2	3	Permanen
Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan	2	3	Permanen
Seminar, Lokakarya, Temukarya, <i>Workshop</i>	2	3	Musnah
PEMERINTAHAN	0	0	-
OTONOMI DAERAH	0	0	-

Kebijakan di bidang Otonomi Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2	3	Permanen
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Fasilitasi, Bimbingan , Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi)	2	3	
Penataan Daerah, Pembinaan Daerah Pemekaran, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)	2	3	Musnah
Pemilihan Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Hubungan Antar Lembaga (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)	0	0	-
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah	2	3	
Administrasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	2	3	Permanen
Penyiapan Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Kapasitas Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Bidang Pemerintahan	2	3	Permanen
Hubungan Antar Lembaga Daerah (Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD))	2	3	Permanen
Assosiasi Daerah	2	3	Musnah
Otonomi khusus dan daerah istimewa	2	3	Permanen
Peningkatan Kapasitas Dan Evaluasi Kinerja Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)	0	0	-
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2	3	Permanen
Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah	2	3	Musnah
Pengembangan Kapasitas Daerah	2	3	Musnah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)/ Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJAMJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) (Fasilitasi, Monitoring dan	2	3	Permanen

Evaluasi)			
PEMERINTAHAN UMUM	0	0	-
Kebijakan di bidang Pemerintahan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2	3	Permanen
Dekonsentrasi dan Kerjasama	0	0	-
Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	2	3	Musnah
Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Tugas Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah	2	3	Musnah
Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah	2	3	Musnah
Fasilitasi Kecamatan	2	3	Musnah
Fasilitasi Pelayanan Umum	2	3	Musnah
Wilayah Administrasi dan Perbatasan	0	0	-
Toponimi dan Data Wilayah	5	5	Permanen
Pengembangan dan Penataan Batas Antar Negara	5	5	Permanen
Batas Antar Daerah Wilayah	5	5	Permanen
Penataan Batas Wilayah Antar Kecamatan, Batas Wilayah Antar Kelurahan Satu Kecamatan Dan Batas Wilayah Kelurahan Antar Kecamatan	5	5	Permanen
Pemeliharaan Batas Wilayah	5	5	Permanen
HUKUM	0	0	-
Program Legislasi	0	0	-
Bahan/Materi Program Legislasi Daerah	2	3	Permanen
Program Legislasi	2	3	Permanen
Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	2	3	Permanen

Keputusan/Ketetapan Pimpinan Pemerintah	0	0	-
Keputusan/Ketetapan Gubernur	2	3	Permanen
Keputusan/Ketetapan Bupati	2	3	Permanen
Keputusan/Ketetapan Walikota	2	3	Permanen
Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi	2	3	Musnah
Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten	2	3	Musnah
Keputusan Sekretaris Daerah Kota	2	3	Musnah
Instruksi/Surat Edaran	0	0	-
Instruksi/Surat Edaran Provinsi	2	3	Permanen
Instruksi/Surat Edaran Kabupaten	2	3	Permanen
Instruksi/Surat Edaran Kota	2	3	Permanen
Instruksi/Surat Edaran Setingkat Eselon II	2	3	Musnah
Surat Perintah	0	0	-
Surat Perintah Gubernur	2	3	Musnah
Surat Perintah Bupati	2	3	Musnah
Surat Perintah Walikota	2	3	Musnah
Surat Perintah Setingkat Eselon II	2	3	Musnah
Standar/Pedoman/Prosedur Kerja/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis	2	3	Permanen
Nota Kesepakatan/Memorandum of Understanding (MoU)/Kontrak/Perjanjian Kerja Sama	0	0	-
Dalam Negeri	2	3	Permanen
Luar Negeri	2	3	Permanen
Dokumentasi Hukum	1	1	Permanen
Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum	1	1	Musnah
Bantuan/Konsultasi Hukum/Advokasi Pemberian Bantuan	2	3	Musnah

Hukum/Konsultasi Hukum (Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara dan Agama)			
Kasus/ Sengketa Hukum	0	0	-
Pidana Kasus/ sengketa pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran	2	3	Musnah
Perdata Kasus/sengketa perdata	2	3	Musnah
Tata Usaha Negara	2	3	Musnah
Perburuhan	2	3	Musnah
Arbitrase	2	3	Musnah
Sengketa Adat	2	3	Musnah
Perijinan	2	3	Permanen
Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)	0	0	-
Hak Cipta	2	3	Permanen
Hak Paten	2	3	Permanen
Hak Desain Industri	2	3	Permanen
Hak Rahasia Dagang	2	3	Permanen
Hak Merk	2	3	Permanen
Permohonan HaKI yang ditolak	1	1	Musnah
POLITIK	0	0	-
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	0	-
Kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2	3	Permanen
Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	0	0	-
Ketahanan Ideologi Negara	2	3	Permanen
Wawasan Kebangsaan	2	3	Permanen
Bela Negara	2	3	Permanen

Nilai Nilai Sejarah Kebangsaan	2	3	Permanen
Pembauran dan Kewarganegaraan	2	3	Permanen
Kewaspadaan Nasional	0	0	-
Fasilitasi dan Evaluasi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan	2	3	Permanen
Fasilitasi Bina Masyarakat Perbatasan Antar Negara dan Kehidupan Masyarakat Perbatasan	2	3	Permanen
Fasilitasi dan Evaluasi Penanganan Konflik Pemerintahan	2	3	Permanen
Fasilitasi dan Laporan Penanganan Konflik Sosial	2	3	Permanen
Fasilitasi Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing	2	3	Permanen
Ketahanan Seni, Budaya, Adat, Agama, dan Kemasyarakatan	0	0	-
Ketahanan Seni	2	3	Permanen
Ketahanan Budaya	2	3	Permanen
Agama dan Kepercayaan	2	3	Permanen
Organisasi Kemasyarakatan	2	3	Permanen
Masalah Sosial Kemasyarakatan	2	3	Permanen
Fasilitasi	2	3	Permanen
Pelaksanaan Identifikasi dan Kompilasi Organisasi Masyarakat	2	3	Permanen
Laporan Hasil Kerja sama Kegiatan Dengan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas/LNL)	2	3	Permanen
Evaluasi Aktifitas Ormas : Sanksi Administrasi	2	3	Permanen
Fasilitasi Sengketa Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)	2	3	Permanen
Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)	2	3	Permanen
Politik Dalam Negeri	0	0	-
Implementasi Kebijakan Politik	2	3	Musnah
Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan	2	3	Musnah

Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik	2	3	Musnah
Verifikasi dan Evaluasi Partai Politik Yang Memperoleh Kursi	2	3	Musnah
Partai Politik Yang Tidak Memperoleh Kursi	2	3	Musnah
Pemerintah Daerah	2	3	Musnah
<i>Database</i> Parpol	2	3	Musnah
Pendidikan Budaya Politik	2	3	Musnah
Pemilihan Umum	2	3	Musnah
Ketahanan Ekonomi	0	0	-
Ketahanan Sumberdaya Alam dan Kesenjangan Perekonomian	2	3	Musnah
Ketahanan Perdagangan Investasi, Fiskal dan Moneter	2	3	Musnah
Perilaku Perekonomian Masyarakat	2	3	Musnah
Ketahanan Lembaga Sosial Ekonomi	2	3	Musnah
PEMILU	0	0	-
Kebijakan di bidang Pemilu yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2	3	Permanen
Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih	0	0	-
Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) Pemilu	2	3	Musnah
Daftar Pemilih Sementara (DPS)	2	3	Musnah
Daftar Pemilih Tambahan	1	1	Musnah
Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT)	2	3	Permanen
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)	2	3	Permanen
Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	0	0	-
Dokumen pendaftaran peserta Pemilu dari partai politik	2	3	Musnah
Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faktual partai politik	2	3	Musnah
Dokumen pendaftaran peserta Pemilu dari Calon Perseorangan	1	1	Musnah
Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faktual	1	1	Musnah

Penetapan Peserta Pemilu	0	0	-
Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota	2	3	Permanen
Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)	2	3	Permanen
Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)	2	3	Permanen
Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota	2	3	Permanen
Peta Daerah Pemilihan	2	3	Permanen
Pencalonan Pemilu	0	0	-
Petunjuk teknis pencalonan	2	3	Permanen
Surat pencalonan pendaftaran	2	3	Musnah
Daftar bakal calon	2	3	Musnah
Dokumen persyaratan masing-masing bakal calon	2	3	Musnah
Dokumen verifikasi administrasi	2	3	Musnah
Daftar Calon Sementara dan Calon Tetap	2	3	Permanen
Kampanye Pemilu	0	0	-
Keputusan KPU tentang penetapan jadwal kampanye	2	3	Permanen
Nama juru kampanye/pelaksana kampanye	2	3	Musnah
Peringatan tertulis/penghentian kegiatan kampanye	2	3	Musnah
Dana Kampanye	0	0	-
Pedoman audit dana kampanye	2	3	Permanen
Laporan dana kampanye peserta Pemilu	2	3	Permanen
Laporan hasil audit dana kampanye	2	3	Permanen
Pemungutan dan Penghitungan Suara	0	0	-

Keputusan KPU tentang desain dan spesifikasi surat suara	2	3	Permanen
Master surat suara	2	3	Permanen
Surat suara yang terpakai	1	1	Musnah
Surat Suara Tidak terpakai (rusak, salah, dan tidak digunakan)	1	1	Musnah
Formulir pemilu di Pemerintah Daerah	2	3	Permanen
Penetapan Hasil Pemilu	2	3	Permanen
Perselisihan Hasil Pemilu	0	0	-
Surat-surat mengenai Perselisihan Hasil Pemilu	2	3	Permanen
Jawaban dan kesimpulan termohon	2	3	Musnah
Salinan Putusan lembaga peradilan	2	3	Permanen
Laporan hasil penyelenggaraan Pemilu	2	3	Permanen
KEAMANAN DAN KETERTIBAN	0	0	-
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0	0	-
Kebijakan di bidang Polisi Pamong Praja yang dilakukan di Pemerintah Daerah	2	3	Permanen
Tata Operasional dan Prasarana Sarana Polisi Pamong Praja	0	0	-
Tata Operasional Polisi Pamong Praja	2	3	Musnah
Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja	2	3	Musnah
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja	2	3	Musnah
Perlindungan Masyarakat	2	3	Musnah
Penyidik Pegawai Negeri Sipil	2	3	Musnah
Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia	2	3	Musnah
PENANGGULANGAN BENCANA, PENCARIAN, DAN PERTOLONGAN	0	0	-
Kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2	3	Permanen
Perencanaan Penanggulangan Bencana, Pencarian, dan Pertolongan	0	0	-

Rencana dan standardisasi dan pengawakan dan perbekalan	2	3	Permanen
Kurikulum dan silabus, evaluasi dan monitoring	2	3	Permanen
Tenaga pencarian pertolongan, penyiapan potensi pencarian dan pertolongan	2	3	Permanen
Permasyarakatan pencarian dan pertolongan, sertifikasi pencarian dan pertolongan	2	3	Permanen
Perencanaan dan standardisasi, penyelenggaraan operasi <i>Search And Rescue</i> (SAR), Siaga dan latihan, tempat latihan	2	3	Musnah (kecuali laporan)
Registrasi beacon atau isyarat pandu, sinyal rambu atau rambu suar	2	3	Musnah
Pencegahan dan Kesiapsiagaan	2	3	Permanen
Potensi Pencarian dan Pertolongan	2	3	Permanen
Bina Ketenagaan dan Permasyarakatan	0	0	-
Rencana Pendidikan dan Pelatihan	2	3	Permanen
Penyiapan tenaga dan potensi Pencarian dan Pertolongan	2	3	Musnah
Pemasyarakatan dan Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan	2	3	Permanen
Pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan (Sosialisasi dan Penyuluhan)	2	3	Permanen
Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan	2	3	Permanen
Operasi Pencarian dan Pertolongan	2	3	Permanen
Rencana Pengembangan dan Standardisasi Komunikasi	2	3	Permanen
Operasi Komunikasi	0	0	-
Operasi Peralatan Komunikasi (Berita <i>Search and Rescue</i> (SAR))	2	3	Musnah
Operasi Peralatan Deteksi Dini (Berita <i>Search and Rescue</i> (SAR))	2	3	Musnah
Registrasi beacon atau isyarat pandu, sinyal rambu atau rambu suar	2	3	Musnah
Inventarisasi dan Pemeliharaan	2	3	Musnah
Pengembangan Sistem Informasi	2	3	Musnah

Penyajian dan Layanan Informasi	2	3	Musnah
Pelapooran dan Evaluasi	0	0	-
Laporan Harian	2	3	Musnah
Laporan Bulanan	2	3	Musnah
Laporoan Tahunan	2	3	Permanen
Evaluasi	2	3	Musnah
KESEJAHTERAAN RAKYAT	0	0	-
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	0	0	-
Kebijakan di bidang Pembangunan Daerah Tertinggal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2	3	Permanen
Pembangunan Sumber Daya	0	0	-
Fasilitasi Pendidikan ketrampilan Pengembangan Sumber Daya	2	3	Permanen
Fasilitasi Kesehatan Pengembangan Sumber Daya	2	3	Permanen
Fasilitasi Sumber daya hayati dan Pengembangan Sumber Daya	2	3	Permanen
Fasilitasi Mineral, energi dan lingkungan hidup	2	3	Permanen
Fasilitasi Teknologi dan inovasi	2	3	Permanen
Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya	2	3	Permanen
Pemantauan dan evaluasi	2	3	Permanen
Peningkatan Infrastruktur	0	0	-
Fasilitasi Transportasi peningkatan infrastruktur	2	3	Permanen
Fasilitasi Informasi dan Telekomunikasi dalam peningkatan infrastruktur	2	3	Permanen
Fasilitasi Sosial dalam peningkatan infrastruktur	2	3	Permanen
Fasilitasi Ekonomi dalam peningkatan infrastruktur	2	3	Permanen
Fasilitasi energi dalam peningkatan infrastruktur	2	3	Permanen
Koordinasi pelaksanaan kebijakan peningkatan infrastruktur	2	3	Permanen

Pemantauan dan evaluasi	2	3	Musnah
Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha	0	0	-
Fasilitasi Invenstasi pembinaan ekonomi dan dunia usaha	2	3	Musnah
Fasilitasi Kelembagaan ekonomi dan dunia usaha	2	3	Musnah
Fasilitasi Usaha mikro, kecil dan menengah	2	3	Musnah
Fasilitasi Kemitraan usaha	2	3	Musnah
Fasilitasi Pengembangan komoditas unggulan	2	3	Musnah
Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan ekonomi dan dunia usaha	2	3	Musnah
Pemantauan dan evaluasi	2	3	Musnah
Identifikasi dan inventarisasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan tertinggal	2	3	Musnah
Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan tertinggal	2	3	Musnah
Monitoring dan evaluasi Ekonomi desa tertinggal	2	3	Musnah
Identifikasi dan inventarisasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal	2	3	Musnah
Fasilitasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal	2	3	Musnah
Monitoring dan evaluasi Masyarakat tertinggal	2	3	Musnah
Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	2	3	Musnah
Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya	0	0	-
Penguatan kapasitas lembaga lokal	2	3	Musnah
Penguatan organisasi masyarakat	2	3	Musnah
Pemberdayaan masyarakat	2	3	Musnah
Kerjasama antar lembaga sosial dan budaya	2	3	Musnah
Ketenagakerjaan	2	3	Musnah
Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan lembaga sosial dan	2	3	Musnah

budaya			
Pemantauan dan evaluasi	3	7	Musnah
Pengembangan Daerah Khusus	0	0	-
Fasilitasi pengembangan Daerah perbatasan	3	7	Musnah
Fasilitasi pengembangan Daerah rawan konflik dan bencana	3	7	Musnah
Fasilitasi pengembangan Daerah Perdesaan	3	7	Musnah
Fasilitasi pengembangan Daerah pulau terpencil dan terluar	3	7	Musnah
Fasilitasi pengembangan Wilayah strategis	3	7	Musnah
Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan daerah khusus	3	7	Musnah
Pemantauan dan evaluasi	3	7	Musnah
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0	0	-
Kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2	3	Permanen
Pengarusutamaan <i>Gender</i> Ekonomi, Politik Sosial dan Hukum	0	0	-
Data <i>Gender</i>	2	3	Permanen
Advokasi dan fasilitasi	2	3	Musnah
Perlindungan Perempuan (Kekerasan, Masalah Sosial, Tenaga Kerja, Korban Perdagangan)	0	0	-
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	2	3	Musnah
Data perlindungan perempuan	2	3	Musnah
Advokasi dan fasilitasi	2	3	Permanen
Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan perempuan	2	3	Permanen
Sistem aplikasi dan jaringan informasi <i>Gender</i>	2	3	Permanen
Analisis dan penyajian informasi <i>Gender</i>	2	3	Musnah
Partisipasi publik untuk kesejahteraan ibu	2	3	Musnah
Perlindungan Anak (Hak Sipil, Masalah Sosial, Kekerasan Terhadap	0	0	-

Anak, Anak Berkebutuhan Khusus, Anak Berhadapan Dengan Hukum)			
Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	2	3	Musnah
Data perlindungan anak	2	3	Permanen
Advokasi dan fasilitasi	2	3	Musnah
Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan anak	2	3	Permanen
Partisipasi publik untuk kesejahteraan anak	2	3	Musnah
Tumbuh Kembang Anak (Pendidikan, Kesehatan, Partisipasi, Lingkungan dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur, Pengembangan Kota Layak Anak)	0	0	-
Pemenuhan Hak Anak	2	3	Musnah
Data Klaster Hak Anak	2	3	Permanen
Data tumbuh kembang anak	2	3	Permanen
Advokasi dan fasilitasi	2	3	Musnah
Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan tumbuh kembang anak	2	3	Permanen
Penyelenggaraan parenting pola pengasuhan anak	2	3	Permanen
Penghargaan terkait <i>Gender</i> (Anugerah Parahita Ekapraya (APE))	2	3	Permanen
Penghargaan Kabupaten Layak Anak	2	3	Permanen
Penghargaan Desa Ramah Perempuan Peduli Anak	2	3	Permanen
PENDIDIKAN	0	0	-
Kebijakan di bidang Pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2	3	Permanen
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal, Informal	0	0	-
Bahan Ajar (Alat Permainan Edukatif)	2	3	Musnah
Pelatihan Sosial	2	3	Musnah
Peringatan Hari anak	2	3	Musnah

Block Grant	2	3	Permanen
Pendidikan Masyarakat	0	0	-
Penyelenggaraan Program	2	3	Musnah
Penilaian dan pemberian bantuan sosial	2	3	Musnah
Pembinaan Program	2	3	Musnah
Lomba/Pemberian Penghargaan	2	3	Musnah
Pameran	2	3	Musnah
Rakor	2	3	Musnah
Sosialisasi	2	3	Musnah
Sertifikasi dan Akreditasi	2	3	Musnah
Kursus/Pelatihan Pendidik dan Tenaga Pendidik	2	3	Musnah
Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama	0	0	-
Kurikulum, bahan ajar	2	3	Musnah
<i>Block Grant</i>	2	3	Permanen
Pelatihan, Bimbingan teknis, sosialisasi,	2	3	Musnah
Lomba, penghargaan, penganugerahan	2	3	Musnah
Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	2	3	Permanen
Bantuan Siswa Miskin	2	3	Permanen
Pendidikan khusus/Layanan Khusus	0	0	-
Kurikulum, bahan ajar, alat bantu pembelajaran	2	3	Musnah
<i>Block Grant</i>	2	3	Permanen
Lomba, festival	2	3	Musnah
Sosialisasi, bimbingan teknis	2	3	Musnah
Pendataan	2	3	Musnah
Kelembagaan	2	3	Musnah
Pembinaan Pendidik dan Tenaga Pendidik	0	0	-

Pendataan dan Pemeetaan	2	3	Musnah
Uji Kompetensi Guru	2	3	Musnah
Sertifikasi Guru	2	3	Permanen
Penghargaan guru dan tenaga kependidikan	2	3	Permanen
Peningkatan kesejahteraan guru	2	3	Musnah
Sosialisasi, bimtek	2	3	Musnah
<i>Block Grant</i>	2	3	Permanen
Sekolah Menengah Atas	0	0	-
Kurikulum	2	3	Musnah
Bahan Ajar	2	3	Musnah
Pelatihan	2	3	Musnah
<i>Block grant</i>	2	3	Permanen
Bimbingan teknis/sosialisasi	2	3	Musnah
Lomba, Sayembara, festival	2	3	Musnah
Bantuan operasional Sekolah (BOS)	2	3	Musnah
Bantuan siswa miskin	2	3	Musnah
Pendidikan Khusus-Layanan Khusus	0	0	-
Bahan ajar	2	3	Musnah
Petunjuk Teknis	2	3	Musnah
<i>Block grant</i>	2	3	Permanen
Sosialisasi, bimbingan teknis	2	3	Musnah
Lomba, sayembara, jambore, festival	2	3	Musnah
Kurikulum/bahan pembelajaran	2	3	Musnah
Alat bantu pembelajaran	2	3	Musnah
Pendataan	2	3	Musnah
Kelembagaan (Unit kesehatan sekolah, Pendidikan jasmani adaptif,	2	3	Musnah

pendidikan inklusi			
Pendidik dan Tenaga Pendidik	0	0	-
Pendataan dan Pemetaan	2	3	Musnah
Uji Kompetensi Guru	2	3	Musnah
Setifikasi Guru	2	3	Musnah
Penilaian prestasi kerja guru dan pengawas sekolah	2	3	Musnah
Penghargaan guru dan tenaga kependidikan	2	3	Musnah
Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik	2	3	Musnah
Block grant	2	3	Permanen
Bimbingan teknis/sosialisasi	2	3	Musnah
Penilaian Pendidikan	0	0	-
Penilaian Akademik	2	3	Permanen
Penilaian Non Akademik	2	3	Permanen
Analisis dan Sistem Informasi Penilaian	2	3	Permanen
Data dan Statistik Pendidikan	0	0	-
Data peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan	2	3	Permanen
Data Satuan Pendidikan dan Proses Pembelajaran	2	3	Permanen
Prasarana dan Sarana Pendidikan	0	0	-
Prasarana Pendidikan	3	7	Permanen
Sarana Pendidikan	3	7	Permanen
Monitoring dan Evaluasi	2	3	Musnah
KEOLAHRAGAAN	0	0	-
Kebijakan di bidang Keolahragaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2	3	Permanen
Pengelolaan Olahraga Pendidikan	0	0	-
Olahraga Pendidikan Dasar dan Menengah	1	1	Musnah

Olahraga Pendidikan Tinggi	1	1	Musnah
Olahraga Pendidikan Nonformal dan Informal	1	1	Musnah
Pengelolaan Olahraga Rekreasi	0	0	-
Olahraga Massal	1	1	Musnah
Olahraga Tradisional	1	1	Musnah
Olahraga Petualangan, Tantangan dan Wisata	1	1	Musnah
Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga	0	0	-
Olahraga Pendidikan	1	1	Musnah
Olahraga Rekreasi	1	1	Musnah
Olahraga Prestasi	1	1	Musnah
Sekolah Khusus Olahraga	1	1	Musnah
Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus	0	0	-
Olahraga Tradisional	2	3	Permanen
Layanan Khusus	2	3	Permanen
Kemitraan dan Penghargaan Olahraga	0	0	-
Kemitraan Keolahragaan	2	3	Permanen
Penghargaan Olahraga	2	3	Permanen
Pembibitan dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) Olahraga	0	0	-
Pembibitan Olahraga	2	3	Permanen
Kompetisi	2	3	Permanen
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) Olahraga	2	3	Permanen
Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan	0	0	-
Tenaga Keolahragaan	2	3	Permanen
Organisasi Keolahragaan	2	3	Permanen
Industri dan Promosi Olahraga	0	0	-
Industri Olahraga	2	3	Permanen

Promosi Olahraga	2	3	Permanen
Olahraga Prestasi	0	0	-
Daerah	2	3	Permanen
Nasional	2	3	Permanen
Internasional	2	3	Permanen
Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga	0	0	-
Standardisasi Keolahragaan	2	3	Permanen
Akreditasi dan Sertifikasi Keolahragaan	2	3	Permanen
Infrastruktur Olahraga	2	3	Permanen
KEPEMUDAAN	0	0	-
Kebijakan di bidang Kepemudaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2	3	Permanen
Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda	0	0	-
Penelusuran (Duta Kepemudaan)	2	3	Permanen
Pengkajian (Rekomendasi Kepemudaan melalui forum kepemudaan)	2	3	Permanen
Pengembangan	2	3	Permanen
Peningkatan Wawasan Pemuda	0	0	-
Wawasan Kebangsaan	2	3	Musnah
Wawasan Lingkungan	2	3	Musnah
Wawasan Sosial dan Hukum	2	3	Musnah
Peningkatan Kapasitas Pemuda	0	0	-
Kapasitas Iman dan Taqwa	2	3	Musnah
Kapasitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)	2	3	Musnah
Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)	2	3	Musnah
Peningkatan Kreativitas Pemuda (Pemetaan Kreativitas/seni kepemudaan)	0	0	-

Pengkajian	2	3	Musnah
Pengembangan	2	3	Musnah
Pendayagunaan (fasilitasi)	2	3	Musnah
Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda	0	0	-
Kepemimpinan: Penelusuran, Pengaderan, Pendayagunaan	2	3	Musnah
Kepeloporan Pemuda: Kesukarelawanan, Pengembangan kepedulian, pendampingan	2	3	Musnah
Kewirausahaan	0	0	-
Kelembagaan	2	3	Musnah
Pengaderan	2	3	Musnah
Perintisan	2	3	Musnah
Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan	0	0	-
Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan: Kelembagaan dan Sumberdaya	2	3	Musnah
Pemberdayaan Organisasi Kemahasiswaan: Kelembagaan dan Sumberdaya	2	3	Musnah
Pemberdayaan Organisasi Kepelajaran: Kelembagaan dan Sumberdaya	2	3	Musnah
Pengawasan Kepramukaan: Kelembagaan, Program dan Sumberdaya	2	3	Musnah
Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda	0	0	-
Standardisasi	2	3	Musnah
Infrastruktur Pemuda	2	3	Musnah
Kemitraan dan Penghargaan Pemuda	0	0	-
Kemitraan	2	3	Musnah
Penghargaan Pemuda	2	3	Musnah
KEBUDAYAAN	0	0	-
Kebijakan di bidang Kebudayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2	3	Permanen

Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	0	0	-
Registrasi Nasional	1	1	Permanen
Pelindungan	1	1	Permanen
Pengembangan dan Pemanfaatan	1	1	Permanen
Eksplorasi dan Dokumentasi	1	1	Permanen
Pembinaan Kesenian dan Perfilman	0	0	-
Pembinaan Seni Pertunjukan	1	1	Permanen
Pembinaan Seni Rupa	1	1	Permanen
Pembinaan Seni Literasi dan apresiasi film	1	1	Permanen
Dokumentasi dan Publikasi	1	1	Permanen
Sejarah dan Nilai Budaya	0	0	-
Sejarah	2	3	Permanen
Pemetaan nilai	2	3	Permanen
Verifikasi dan Perumusan Nilai	2	3	Permanen
Dokumentasi dan Publikasi	2	3	Permanen
Dokumentasi sejarah dan nilai sejarah	2	3	Permanen
Publikasi sejarah dan nilai sejarah	2	3	Permanen
Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya	0	0	-
Internalisasi nilai budaya	2	3	Permanen
Kekayaan budaya	2	3	Permanen
Warisan budaya nasional dan dunia	2	3	Permanen
Diplomasi budaya	2	3	Permanen
KESEHATAN	0	0	-
Kebijakan di bidang Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2	3	Permanen
Upaya Kesehatan Dasar	0	0	-
Pelayanan kedokteran keluarga	2	3	Musnah

Praktek klinis dokter di pelayanan kesehatan primer	2	3	Musnah
Pelaksanaan kesehatan primer	2	3	Musnah
Kesehatan gigi dan mulut di puskesmas	2	3	Musnah
Kesehatan gigi dan mulut di rumah sakit	2	3	Musnah
ICD 10, <i>Destistry & Stomatology</i>	2	3	Musnah
Infeksi menular lewat transfusi darah	2	3	Musnah
Penyakit mulut di tingkat primer	2	3	Musnah
Pembiayaan darah	2	3	Musnah
Penggunaan darah rasional	2	3	Musnah
Unit transfusi darah, bank darah rumah sakit dan jejaring pelayanan darah	2	3	Musnah
Pelayanan kesehatan di daerah terpencil, sangat terpencil dan kepulauan	2	3	Musnah
Akreditasi puskesmas	2	3	Musnah
Puskesmas berprestasi	2	3	Musnah
Upaya Kesehatan Rujukan	0	0	-
Pelayanan kesehatan rujukan	2	3	Musnah
Pelayanan kedokteran, organisasi profesi dan Konsorsium Upaya Kesehatan (KUK)	2	3	Musnah
Pelayanan rumah sakit privat	2	3	Musnah
Pelayanan kesehatan rumah sakit khusus dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya	2	3	Musnah
Pelayanan kesehatan rumah sakit pendidikan	2	3	Musnah
Pelayanan pasien jaminan kesehatan	2	3	Musnah
Fasilitas pelayanan kesehatan asing dan perdagangan jasa	2	3	Musnah
Badan pengawas rumah sakit	2	3	Musnah

Perizinan dan penetapan kelas rumah sakit kelas A dan Penanam Modal Asing (PMA)	2	3	Permanen
Akreditasi rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya	2	3	Permanen
Keperawatan dan keteknisian medik	0	0	-
Pelayanan Keperawatan Dasar	2	3	Musnah
Pelayanan keperawatan profesional di rumah sakit	2	3	Musnah
Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum	2	3	Musnah
Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus	2	3	Musnah
Bina pelayanan kebidanan	2	3	Musnah
Penunjang medik dan sarana kesehatan	0	0	-
Mikrobiologi dan imunologi	2	3	Musnah
Patologi dan toksilogi	2	3	Musnah
Radiologi	2	3	Musnah
Perizinan dan sertifikasi	2	3	Permanen
Sarana dan prasarana kesehatan	2	3	Musnah
Peralatan medis di fasilitas pelayanan kesehatan	2	3	Musnah
Aplikasi sarana dan prasarana alat kesehatan	2	3	Permanen
Kesehatan Jiwa	0	0	-
Kesehatan jiwa di non fasilitas pelayanan kesehatan	2	3	Musnah
Bina kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan	2	3	Musnah
Etikolegal dan asesmen	2	3	Permanen
Pencegahan dan penanggulangan narkotika dan sejenisnya	2	3	Musnah
Etikolegal dan asesmen	2	3	Musnah
Kesehatan jiwa kelompok beresiko	2	3	Permanen
Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra	0	0	-
Surveilans dan respon kejadian luar biasa	2	3	Musnah

Imunisasi	2	3	Musnah
Karantina kesehatan dan kesehatan di pelabuhan	2	3	Musnah
Kesehatan matra	2	3	Musnah
Pengendalian penyakit menular langsung	0	0	-
Pengendalian tuberkolosis	2	3	Musnah
Pengendalian <i>Acquired Immune Deficiency Syndrome</i> (AIDS) dan penyakit menular seksual	2	3	Musnah
Pengendalian infeksi saluran pernafasan akut	2	3	Musnah
Pengendalian diare dan infeksi saluran pencernaan	2	3	Musnah
Pengendalian kusta dan frambusia	2	3	Musnah
Pengendalian penyakit bersumber binatang	0	0	-
Pengendalian malaria	2	3	Musnah
Pengendalian <i>arbovirosis</i>	2	3	Musnah
Pengendalian <i>zoonosis</i>	2	3	Musnah
Pengendalian filariasis dan kecacingan	2	3	Musnah
Pengendalian penyakit tidak menular	0	0	-
Pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah	2	3	Musnah
Pengendalian penyakit diabetes melitus dan penyakit metabolik	2	3	Musnah
Penyakit kanker	2	3	Musnah
Penyakit kronis dan generatif	2	3	Musnah
Gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan	2	3	Musnah
Penyehatan lingkungan	0	0	-
Penyehatan air dan sanitasi dasar	2	3	Musnah
Pemukiman dan tempat umum	2	3	Musnah
Kawasan dan sanitasi darurat	2	3	Musnah
Higien sanitasi pangan	2	3	Musnah

Pengamanan limbah, udara, radiasi	2	3	Musnah
Pengembangan teknologi laboratorium dan penapisan teknologi pengendalian penyakit dan pengendalian lingkungan	2	3	Musnah
Gizi	0	0	-
Gizi makro	2	3	Musnah
Gizi mikro	2	3	Musnah
Gizi klinik dan diatetik	2	3	Musnah
Konsumsi makanan dan jasa makanan	2	3	Musnah
Kewaspadaan gizi	2	3	Musnah
Kesehatan ibu	0	0	-
Kesehatan ibu hamil	2	3	Musnah
Kesehatan ibu bersalin dan nifas	2	3	Musnah
Kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi	2	3	Musnah
Keluarga berencana	2	3	Musnah
Perlindungan kesehatan reproduksi	2	3	Musnah
Kesehatan anak	0	0	-
Kelangsungan hidup bayi	2	3	Musnah
Kelangsungan anak balita dan pra sekolah	2	3	Musnah
Kewaspadaan penanganan balita beresiko	2	3	Musnah
Kualitas hidup anak usia sekolah dan remaja	2	3	Musnah
Perlindungan kesehatan anak	2	3	Musnah
Kesehatan Tradisional alternatif dan komplementer	0	0	-
Kesehatan tradisional keterampilan	2	3	Musnah
Kesehatan tradisional ramuan	2	3	Musnah
Kesehatan alternatif dan komplementer	2	3	Musnah
Penapisan dan kemitraan	2	3	Musnah

Kesehatan kerja dan Olah raga	0	0	-
Pelayanan kesehatan kerja	2	3	Musnah
Kapasitas kerja	2	3	Musnah
Lingkungan kerja	2	3	Musnah
Kemitraan kesehatan kerja	2	3	Musnah
Kesehatan perkotaan	2	3	Musnah
Kesehatan olahraga	2	3	Musnah
Obat Publk dan perbekalan kesehatan	0	0	-
Harga obat publik	2	3	Musnah
Pengadaan obat	2	3	Musnah
Perbekalan kesehatan	2	3	Musnah
Produksi dan distribusi alat kesehatan	0	0	-
Alat kesehatan	2	3	Musnah
Produsen dan distributor alat kesehatan dan obat	2	3	Musnah
Produk diagnostik in vitro dan perbekalan kesehatan rumah tangga	2	3	Musnah
Kefarmasian	0	0	-
Pelayanan kefarmasian	2	3	Musnah
Farmasi klinis	2	3	Musnah
Farmasi Komunitas	2	3	Musnah
Penggunaan obat rasional	2	3	Musnah
Produksi dan distribusi kefarmasian	0	0	-
Obat tradisional	2	3	Musnah
Kosmetik dan makanan	2	3	Musnah
Narkotika, psikotropika, prekursor farmasi dan sediaan farmasi khusus	2	3	Musnah
Kemandirian obat dan bahan baku obat	2	3	Musnah
Surat Keterangan, Sertifikasi dan Perijinan	0	0	-

Surat keterangan	2	3	Musnah
Sertifikasi dan perijinan	2	3	Permanen
Penanggulangan Krisis Kesehatan	0	0	-
Pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan	2	3	Permanen
Tanggap darurat dan pemulihan	2	3	Musnah
Pemantauan dan informasi	2	3	Musnah
Penanggulangan krisis kesehatan dalam bidang pengendalian penyakit dan penyehatan	2	3	Musnah
Pelayanan kesehatan reproduksi situasi bencana	2	3	Musnah
Pengembangan dan Jaminan Kesehatan	0	0	-
Tersedianya data <i>National Health Authority</i> (NHA) setiap tahun	2	3	Musnah
Tersedianya dokumen teknis penguatan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	2	3	Musnah
Intelegensia Kesehatan	0	0	-
Pemeliharaan dan peningkatan kemampuan inteligensia kesehatan	2	3	Musnah
Penanggulangan masalah inteligensia kesehatan	2	3	Musnah
Kesehatan Haji	0	0	-
Pelayanan dan pendayagunaan sumber daya kesehatan haji	2	3	Musnah
Peningkatan kesehatan dan pengendalian faktor risiko kesehatan haji	2	3	Musnah
Promosi Kesehatan	0	0	-
Sarana Promosi Kesehatan	2	3	Musnah
Pembinaan advokasi dan kemitraan serta pemberdayaan peran	2	3	Musnah
Pengembangan pesan promosi kesehatan	2	3	Musnah
Hari kesehatan	2	3	Musnah
Data dan Informasi	0	0	-
Statistik kesehatan	2	3	Musnah

Analisis dan diseminasi informasi	2	3	Permanen
Pengembangan sistem informasi dan bank data kesehatan	2	3	Permanen
Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen	0	0	-
Penilaian obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik	2	3	Permanen
Standardisasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen	2	3	Permanen
Inspeksi dan sertifikasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen	2	3	Permanen
Obat Asli Indonesia	2	3	Permanen
Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	0	0	-
Penilaian keamanan pangan	2	3	Permanen
Standardisasi produk pangan	2	3	Permanen
Inspeksi dan sertifikasi produk pangan	2	3	Permanen
Surveilans dan penyuluhan keamanan pangan	2	3	Permanen
Pengawasan produk dan bahan berbahaya	2	3	Permanen
Rekam Medis	2	3	Permanen
AGAMA DAN KEPERCAYAAN	0	0	-
Kebijakan di bidang Agama dan Kepercayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2	3	Permanen
Fasilitasi	0	0	-
Data Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Prov/Kab/Kota	2	3	Permanen
Pelaksanaan Kerukunan Umat Beragama dan Kepercayaan	2	3	Permanen
Pelestarian Nilai-Nilai Keagamaan dan Kepercayaan	2	3	Permanen
Kasus Keagamaan	1	1	Permanen
Kasus Aliran Keagamaan	1	1	Permanen
Pembinaan Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa	0	0	-
Kelembagaan dan kepercayaan	2	3	Permanen

Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama	2	3	Permanen
Komunitas Kepercayaan	2	3	Permanen
Pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional	2	3	Permanen
Lingkungan Budaya dan Pranata Sosial	2	3	Permanen
SOSIAL	0	0	-
Kebijakan di bidang Sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2	3	Permanen
Kesejahteraan Sosial Anak	0	0	-
Kesejahteraan sosial anak balita	2	3	Permanen
Kesejahteraan sosial anak terlantar	2	3	Permanen
Kesejahteraan sosial anak berhadapan dengan hukum	2	3	Permanen
Kesejahteraan sosial anak dengan kecatatan	2	3	Permanen
Kesejahteraan sosial anak yang membutuhkan perlindungan khusus	2	3	Permanen
Rehabilitasi Sosial	0	0	-
Rehabilitasi sosial orang dengan kecacatan tubuh dan bekas penderita penyakit kronis, netra dan rungu wicara, mental	2	3	Musnah
Kelembagaan dan advokasi social	2	3	Permanen
Asistensi dan pemeliharaan kesejahteraan social	2	3	Musnah
Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial	0	0	-
Gelandangan, pengemis dan pemulung	2	3	Musnah
Tuna susila dan korban trafficking perempuan	2	3	Permanen
Warga binaan lembaga pemasyarakatan meliputi penyiapan, reintegrasi	2	3	Musnah
Pelayanan sosial orang dengan <i>Immunodeficiency Virus</i> (HIV) / <i>Acquired Immune Deficiency Syndrome</i> (AIDS) dan kelompok minoritas	2	3	Permanen
Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA)	2	3	Musnah
Pelayanan sosial lanjut usia	0	0	-

Pelayanan sosial dalam dan luar panti	2	3	Musnah
Pengembangan kelembagaan meliputi pembinaan lembaga, kerjasama lembaga	2	3	Musnah
Advokasi dan pelayanan sosial kedaruratan	2	3	Musnah
Pengumpulan dan Pengelolaan sumber dana bantuan sosial	3	7	Musnah
Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran	2	3	Permanen
Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	0	0	-
Ketahanan sosial masyarakat meliputi keserasian sosial, penguatan Sumber Daya	2	3	Permanen
Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial	2	3	Permanen
Pemulihan sosial meliputi penguatan sosial, reintegrasi sosial	2	3	Permanen
Kerjasama meliputi kerjasama pemerintah, kerjasama non pemerintah	2	3	Permanen
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	0	0	-
Kesiapsiagaan dan mitigasi	2	3	Permanen
Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial	2	3	Permanen
Pemulihan sosial dan penguatan sosial	2	3	Permanen
Kerjasama	2	3	Permanen
Jaminan Sosial	0	0	-
Seleksi dan verifikasi	3	7	Musnah
Asuransi kesejahteraan sosial meliputi kelembagaan, pengelolaan premi	3	7	Musnah
Bantuan langsung dan tunjangan berkelanjutan meliputi pendampingan dan penyaluran	3	7	Musnah
Kerjasama	3	7	Musnah
Pemberdayaan keluarga dan kelembagaan Sosial	0	0	-
Ketahanan keluarga	2	3	Musnah
Asistensi keluarga dan pemberdayaan perempuan	2	3	Musnah

Tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan organisasi sosial	2	3	Musnah
Kemitraan dunia usaha	2	3	Musnah
Karang taruna meliputi kelembagaan, pengembangan kapasitas	2	3	Musnah
Pemberdayaan komunitas adat terpencil	0	0	-
Persiapan pemberdayaan	2	3	Permanen
Pemberdayaan sumber daya manusia	2	3	Permanen
Penggalian dan pengembangan potensi	2	3	Permanen
Keserasian dan penguatan komunitas adat terpencil	2	3	Permanen
Kerjasama kelembagaan	2	3	Permanen
Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan	0	0	-
Identifikasi dan analisis	3	7	Musnah
Pengembangan kapasitas	3	7	Musnah
Penataan sosial lingkungan kumuh	3	7	Musnah
Advokasi sosial dan pengembangan aksesibilitas	3	7	Musnah
Bantuan Langsung	3	7	Musnah
Kerjasama Kelembagaan	3	7	Musnah
Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	0	0	-
Penghargaan dan kesejahteraan keluarga pahlawan	2	3	Permanen
Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan	2	3	Musnah
Pengembangan kesetiakawanan sosial	2	3	Musnah
Pengelolaan taman makam pahlawan	2	3	Musnah
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	0	0	-
Kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2	3	Permanen
Pemerintahan Desa dan Kelurahan	0	0	-

Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan	2	3	Permanen
Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan	2	3	Musnah
Fasilitasi Permusyawaratan Desa	2	3	Musnah
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	2	3	Permanen
Pengembangan Kapasitas Desa	2	3	Permanen
Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat	0	0	-
Lembaga Masyarakat	2	3	Musnah
Pembangunan Partisipatif	2	3	Permanen
Pendataan Potensi Masyarakat	2	3	Musnah
Pengembangan Kawasan Perdesaan	2	3	Permanen
Pelatihan Masyarakat	2	3	Permanen
Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat	0	0	-
Budaya Nusantara	2	3	Musnah
Pemberdayaan Perempuan	2	3	Musnah
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	2	3	Musnah
Kesejahteraan Sosial	2	3	Musnah
Tenaga Kerja Perdesaan	2	3	Musnah
Usaha Ekonomi Masyarakat	0	0	-
Usaha Pertanian dan Pangan	2	3	Musnah
Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam	2	3	Musnah
Produksi dan Pemasaran	2	3	Musnah
Usaha Ekonomi dan Keluarga	2	3	Musnah
Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	2	3	Musnah
Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan	0	0	-
Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Perdesaan	2	3	Musnah
Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Perdesaan	2	3	Musnah

Fasilitas Prasarana dan Sarana Perdesaan	2	3	Musnah
Fasilitas Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Perdesaan	2	3	Musnah
Pemasyarakatan dan Kerjasama Teknologi Perdesaan	2	3	Musnah
Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)	2	3	Musnah
PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN	0	0	-
Kebijakan di bidang Pertamanan dan Pemakaman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2	3	Permanen
Pertamanan	0	0	-
Perencanaan Pertamanan	2	3	Permanen
Taman Kota	2	3	Permanen
Tata Hias dan Ornamen Kota	2	3	Permanen
Pemakaman	0	0	-
Perencanaan Pemakaman	2	3	Permanen
Pemakaman	3	7	Permanen
Pelayanan Pemakaman	2	3	Permanen
Jalur Hijau	0	0	-
Perencanaan Jalur Hijau	2	3	Permanen
Jalur Hijau Jalan	2	3	Permanen
Jalur Hijau Penyempurna dan Tepian Air	2	3	Permanen
Peran Serta Masyarakat	2	3	Musnah
Pengawasan dan Penindakan	2	3	Permanen
Pengelolaan Data	2	3	Musnah
Evaluasi dan Pelaporan	2	3	Musnah
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	0	0	-
Kebijakan di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.	2	3	Permanen

Pendaftaran Penduduk	0	0	-
Identitas Penduduk	2	3	Permanen
Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah NKRI	2	3	Permanen
Pindah Datang Penduduk Antar Negara	2	3	Permanen
Pendataan Penduduk Rentan	2	3	Permanen
Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi	2	3	Permanen
Pencatatan Sipil	0	0	-
Kelahiran dan Kematian	2	3	Permanen
Perkawinan dan Perceraian	2	3	Permanen
Pengangkatan Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan dan	2	3	Permanen
Pencatatan Kewarganegaraan	2	3	Permanen
Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi	2	3	Permanen
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0	0	-
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	2	3	Permanen
Kelembagaan Informasi Administrasi Kependudukan	2	3	Permanen
Pengelolaan data Administrasi Kependudukan	2	3	Permanen
Penyajian dan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan	2	3	Musnah
Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi	2	3	Musnah
Pengembangan Kebijakan Kependudukan	0	0	-
Kuantitas Penduduk	2	3	Permanen
Kualitas Penduduk	2	3	Permanen
Mobilitas Penduduk	2	3	Permanen
Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk	2	3	Permanen
Pengembangan Wawasan Kependudukan, Monitoring dan Evaluasi	2	3	Permanen
Penyerasian Kependudukan	0	0	-
Indikator Kependudukan	2	3	Permanen

Proyeksi Penduduk	2	3	Permanen
Perencanaan Kependudukan	2	3	Permanen
Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Non Pemerintah	2	3	Permanen
Pelaksanaan Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Pemerintah	2	3	Permanen
KELUARGA BERENCANA	0	0	-
Kebijakan di bidang Keluarga Berencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2	3	Permanen
Analisis pengaduan kebijakan pengendalian penduduk	0	0	-
Pengumpulan dan pengolahan data	1	1	Dinilai Kembali
Evaluasi dan pelaporan	2	3	Permanen
Fasilitas pengaduan kebijakan pengendalian penduduk	0	0	-
Penyiapan fasilitas	1	1	Dinilai kembali
Evaluasi dan pelaporan	2	3	Permanen
Profil dan proyeksi penduduk	0	0	-
Data profil dan proyeksi penduduk	2	3	Permanen
Evaluasi data profil dan proyeksi penduduk	2	3	Permanen
Penetapan parameter pengendalian penduduk	0	0	-
Penetapan sasaran parameter	2	3	Permanen
Evaluasi sasaran parameter	2	3	Permanen
Pemanfaatan perencanaan pengendalian penduduk	0	0	-
Pemanfaatan profil dan proyeksi	1	1	Musnah
Pemanfaatan parameter	1	1	Musnah
Pengembangan Sistem	0	0	-
Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Formal	2	3	Musnah

Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal	2	3	Musnah
Pengembangan Materi	0	0	-
Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Formal	2	3	Musnah
Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal	2	3	Musnah
Monitoring dan Evaluasi	0	0	-
Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Formal	2	3	Permanen
Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal	2	3	Permanen
Analisis Sosial	2	3	Permanen
Analisis Ekonomi	2	3	Permanen
Analisis Dampak Politik, Pertahanan dan Keamanan	2	3	Permanen
Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	2	3	Permanen
Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Pemerintah	2	3	Musnah
Jaminan pelayanan dan penyediaan sarana keluarga berencana	2	3	Musnah
Kualitas pelayanan keluarga berencana pemerintah	0	0	-
Standarisasi pelayanan keluarga berencana pemerintah	2	3	Permanen
Monitoring dan evaluasi pelayanan keluarga berencana pemerintah	2	3	Permanen
Bina keluarga berencana rumah sakit dan klinik swasta	2	3	Musnah
Jaminan dan ketersediaan sarana keluarga berencana swasta	2	3	Musnah
Kualitas pelayanan keluarga berencana swasta	0	0	-
Standarisasi pelayanan keluarga berencana swasta	2	3	Permanen
Monitoring dan Evaluasi pelayanan keluarga berencana swasta	2	3	Permanen
Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana jalur wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan	0	0	-
Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan	2	3	Musnah
Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal,	2	3	Musnah

terpencil, dan perbatasan			
Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan	0	0	-
Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan	2	3	Musnah
Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan	2	3	Musnah
Kesertaan keluarga berencana pria	0	0	-
Peningkatan akses keluarga berencana pria	2	3	Musnah
Peningkatan partisipasi keluarga berencana pria	2	3	Musnah
Kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak	2	3	Musnah
Pencegahan PMS dan <i>Immunodeficiency Virus (HIV)/ Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)</i>	2	3	Musnah
Pencegahan kanker alat reproduksi dan penanggulangan infertilitas	2	3	Musnah
Pelebagaan bina keluarga Balita dan anak	0	0	-
Pengembangan kelompok bina keluarga Balita dan anak	2	3	Musnah
Pengembangan kemitraan bina keluarga dan anak	2	3	Musnah
Monitoring dan evaluasi bina keluarga Balita dan anak	0	0	-
Monitoring bina keluarga Balita dan anak	2	3	Permanen
Evaluasi dan pelaporan bina keluarga Balita dan anak	2	3	Permanen
Pelebagaan bina ketahanan remaja	0	0	-
Pelebagaan bina ketahanan remaja jalur pendidikan	2	3	Musnah
Pelebagaan bina ketahanan remaja jalur masyarakat	2	3	Musnah
Monitoring dan evaluasi bina ketahanan remaja	0	0	-
Monitoring bina ketahanan remaja	2	3	Permanen
Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan remaja	2	3	Permanen

Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan	0	0	-
Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Lansia	2	3	Musnah
Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Rentan	2	3	Musnah
Pelebagaan Bina Ketahanan keluarga Lansia dan Rentan	0	0	-
Pengembangan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan	2	3	Musnah
Pengembangan Kemitraan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan	2	3	Musnah
Monitoring dan evaluasi bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan	0	0	-
Monitoring Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan	2	3	Permanen
Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan	2	3	Permanen
Pengembangan program usaha ekonomi keluarga	2	3	Musnah
Peningkatan teknologi dan permodalan usaha ekonomi keluarga	2	3	Musnah
Peningkatan manajemen usaha ekonomi keluarga	0	0	-
Pengembangan administrasi dan keuangan kelompok usaha ekonomi keluarga	2	3	Musnah
Pengembangan pemasaran kelompok usaha ekonomi keluarga	2	3	Musnah
Monitoring dan evaluasi usaha ekonomi keluarga	2	3	Permanen
Pengembangan Program Pusat pelayanan Keluarga Sejahtera	2	3	Musnah
Pelebagaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	0	0	-
Pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	2	3	Musnah
Pengembangan Kemitraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	2	3	Musnah
Monitoring dan Evaluasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	0	0	-
Monitoring Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	2	3	Permanen
Evaluasi dan pelaporan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	2	3	Permanen
Pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi	0	0	-
Perencanaan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi	2	3	Permanen
Evaluasi dan pelaporan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi	2	3	Permanen

Advokasi dan pencitraan	2	3	Musnah
Komunikasi, Informasi dan Edukasi	0	0	-
Promosi	1	1	Musnah
Sarana produksi media komunikasi	1	1	Musnah
Produk media komunikasi	2	3	Musnah
Hubungan dengan lembaga pemerintah pusat dan provinsi	2	3	Permanen
Hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota	0	0	-
Pengembangan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota	2	3	Permanen
Penguatan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota	2	3	Permanen
Hubungan dengan lembaga nonpemerintah	0	0	-
Pengembangan hubungan dengan lembaga nonpemerintah	2	3	Permanen
Penguatan hubungan dengan lembaga nonpemerintah	2	3	Permanen
Tenaga Lini Lapangan	0	0	-
Pengembangan tenaga lini lapangan	2	3	Musnah
Monitoring dan evaluasi tenaga lini lapangan	2	3	Permanen
Institusi Masyarakat Pedesaan	0	0	-
Pengembangan institusi masyarakat pedesaan	2	3	Musnah
Monitoring dan evaluasi institusi masyarakat pedesaan	2	3	Permanen
Mekanisme Operasional lini lapangan	0	0	-
Pengembangan mekanisme operasional lini lapangan	2	3	Musnah
Monitoring dan evaluasi mekanisme operasional lini lapangan	2	3	Permanen
Pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan	0	0	-
Perumusan pola sistem pencatatan dan pelaporan	2	3	Musnah
Monitoring dan evaluasi sistem pencatatan dan pelaporan	2	3	Musnah
Pengumpulan dan pengolahan data	2	3	Musnah

Analisis dan evaluasi	0	0	-
Analisis dan evaluasi pengendalian penduduk	2	3	Permanen
Analisis dan evaluasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera	2	3	Permanen
Sistem aplikasi dan bank data	0	0	-
Pengembangan sistem aplikasi	2	3	Permanen
Pengelolaan bank data	2	3	Permanen
Infrastruktur teknologi informasi	0	0	-
Pengembangan infrastruktur teknologi informasi	2	3	Permanen
Pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi	2	3	Permanen
Dokumentasi dan penyebarluasan informasi	0	0	-
Dokumentasi dan perpustakaan	1	1	Musnah
Pengelolaan situs BKKBN dan media konferensi	1	1	Musnah
HUBUNGAN MASYARAKAT	0	0	-
Keprotokolan	0	0	-
Penyelenggaraan acara kedinasan (upacara, pelantikan, peresmian, dan jamuan termasuk acara peringatan hari-hari besar)	2	3	Musnah
Buku tamu Keprotokolan	1	1	Musnah
Agenda kegiatan pimpinan daerah	1	1	Musnah
Kunjungan dinas dalam dan luar negeri	1	1	Permanen
Daftar nama/alamat kantor /pejabat	1	1	Musnah
Dokumentasi/ liputan kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan dan peristiwa-peristiwa bidang masing-masing, dalam berbagai media: kertas, foto/video/rekaman suara/multi media	1	1	Permanen
Pengumpulan,pengolahan dan penyajian informasi kelembagaan	0	0	-
Kliping koran	1	1	Musnah
Brosur/ Leaflet/poster/plakat	1	1	Musnah

Pengumuman/pemberitaan	1	1	Musnah
Hubungan antar lembaga dan Pemerintahan Daerah	0	0	-
Hubungan antar lembaga pemerintah	1	1	Musnah
Hubungan dengan organisasi sosial /Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	1	1	Musnah
Hubungan dengan perusahaan	1	1	Musnah
Hubungan dengan Perguruan Tinggi/sekolah, termasuk magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/Praktek Kerja Lapang (PKL)	1	1	Musnah
Forum Kehumasan	1	1	Musnah
Hubungan dengan Media Massa	1	1	Musnah
Dengar pendapat/hearing DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)	1	1	Permanen
Bahan/materi pidato/sidang Muspida Provinsi/Kota/Kabupaten	1	1	Permanen
Penerbitan Majalah,buletin,koran dan jurnal	1	1	Musnah
Publikasi melalui media cetak maupun elektronik	1	1	Musnah
Pameran/sayemara/lomba/festival,pembuatan spanduk dan iklan	1	1	Musnah
Penghargaan/tanda kenang-kenangan	1	1	Permanen
Ucapan Terimakasih, Ucapan Selamat, Bela Sungkawa, Permohonan Maaf	1	1	Permanen
PEREKONOMIAN	0	0	-
KETAHANAN PANGAN	0	0	-
Kebijakan di bidang Ketahanan Pangan yang dilakukan Pemerintah Daerah	2	3	Permanen
Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	0	0	-
Ketersediaan Pangan	2	3	Permanen
Akses Pangan	2	3	Permanen

Kerawanan Pangan	2	3	Permanen
Distribusi dan Cadangan Pangan	0	0	-
Distribusi Pangan	2	3	Permanen
Harga Pangan	2	3	Permanen
Cadangan Pangan	2	3	Permanen
Penganekaragaman Konsumsi dan Ketahanan Pangan	0	0	-
Konsumsi Pangan	2	3	Permanen
Penganekaragaman Pangan	2	3	Permanen
Keamanan Pangan Segar	2	3	Permanen
Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan	0	0	-
Dewan Ketahanan Pangan	2	3	Permanen
Penghargaan Ketahan Pangan	2	3	Permanen
Swasembada Pangan (Kearifan Lokal)	2	3	Permanen
Bimbingan Teknis	2	3	Musnah
Evaluasi	2	3	Musnah
PERDAGANGAN	0	0	-
Kebijakan di bidang Perdagangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2	3	Permanen
Perdagangan Dalam Negeri	0	0	-
Bina Usaha Kelembagaan dan Penguatan Usaha	2	3	Musnah
Bisa Usaha Jasa Perdangan	2	8	Musnah
Bina Usaha Dagang Asing dan Keagenan	2	8	Musnah
Informasi Perusahaan	2	3	Musnah
Pelaku Pasar	2	3	Musnah
Iklim Usaha dan Bimbingan Teknis Usaha Dagang Kecil Menengah	2	3	Musnah
Fasilitasi Usaha dan Pemasaran Usaha Dagang Kecil Menengah	2	3	Musnah

Pengembangan Produk Lokal	2	3	Musnah
Pencitraan Produk Dalam Negeri	2	3	Musnah
Pengembangan Sarana Distribusi	2	3	Musnah
Pengelolaan Sarana Distribusi	2	3	Musnah
Kerjasama Pengembangan Sistem Logistik	2	3	Musnah
Informasi dan Bimbingan Teknis Penyedia Jasa Logistik	2	3	Musnah
Informasi Pasar	2	3	Musnah
Informasi Hasil Industri	2	3	Musnah
Barang Strategis	2	3	Musnah
Bahan Pokok Agro	2	3	Musnah
Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	0	0	-
Kelembagaan dan informasi standar	2	3	Permanen
Kerjasama Standarisasi	2	8	Permanen
Perumusan dan penerapan standar	3	7	Permanen
Tata usaha	3	7	Permanen
Kerjasama, informasi, dan publikasi	3	7	Musnah
Analisa penyelenggaraan perlindungan konsumen	3	7	Permanen
Bimbingan konsumen dan pelaku usaha	2	3	Musnah
Fasilitas kelembagaan	3	7	Musnah
Produk pertambangan dan aneka industri	2	3	Musnah
Produk pertanian, kimia dan kehutanan	2	3	Musnah
Jasa	2	3	Musnah
Kerjasama	2	3	Musnah
Sarana dan Kerjasama	3	7	Musnah
Kelembagaan dan dan penilaian	2	3	Permanen
Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan (UTTP) dan Standar Ukuran	2	3	Permanen

Pengawasan	2	3	Permanen
Balai pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran	2	3	Permanen
Balai Pengujian (UTTP)	2	3	Permanen
Perdagangan Berjangka Komoditi	0	0	-
Pengkajian pasar	2	3	Musnah
Pengawasan Transaksi	2	3	Musnah
Pengawasan Keuangan dan Audit	2	3	Musnah
Pengkajian pasar	2	3	Musnah
Pengembangan Pasar	2	3	Musnah
Sistem informasi	2	3	Musnah
Pembinaan pasar lelang dan sistem resi gudang	2	3	Musnah
Pengawasan pasar lelang	2	3	Musnah
Pengawasan sistem gudang	2	3	Musnah
Bimbingan Teknis	2	3	Musnah
Evaluasi	2	3	Musnah
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	0	0	-
Kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	3	7	Permanen
Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM)	0	0	-
Organisasi dan Badan Hukum Koperasi	2	3	Permanen
Tata Laksana Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM)	2	3	Permanen
Keanggotaan Koperasi	2	3	Permanen
Pengendalian dan Akuntabilitas	2	3	Permanen
Produksi	0	0	-
Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	2	3	Musnah
Kehutanan dan Perkebunan	2	3	Musnah

Perikanan dan Peternakan	2	3	Musnah
Industri Kerajinan dan Pertambangan	2	3	Musnah
Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha	2	3	Musnah
Pembiayaan	0	0	-
Program Pendanaan	3	7	Permanen
Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam	3	7	Musnah
Urusan Permodalan	3	7	Permanen
Asuransi dan Jasa Keuangan	3	7	Permanen
Pembiayaan dan Penjaminan Kredit	3	7	Permanen
Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUKM (LPDB)	3	7	Permanen
Pemasaran dan Jaringan Usaha	0	0	-
Perdagangan Dalam Negeri	2	3	Musnah
Ekspor dan Impor	2	3	Permanen
Sarana dan Prasarana Pemasaran	2	3	Musnah
Kemitraan dan Jaringan Usaha	2	3	Musnah
Informasi dan Publikasi Bisnis	2	3	Musnah
Lembaga Layanan Pemasaran (LLP) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM)	2	3	Musnah
Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	0	-
Pengembangan Kewirausahaan	2	3	Musnah
Kebijakan Pendidikan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM)	2	3	Musnah
Peran Serta Masyarakat	2	3	Musnah
Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM)	2	3	Musnah
Advokasi	2	3	Musnah
Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha	0	0	-

Produktifitas dan Mutu	2	3	Musnah
Restrukturisasi Usaha	2	3	Musnah
Pemberdayaan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB)	2	3	Musnah
Fasilitasi Investasi Usaha Kecil, Mikro, dan Koperasi (UKMK)	2	3	Musnah
Pengembangan Sarana Bisnis	2	3	Musnah
Pengkajian Sumber Daya Usaha Kecil, Mikro, dan Koperasi (UKMK)	0	0	-
Penelitian Koperasi	2	3	Permanen
Penelitian Usaha Kecil Menengah (UKM)	2	3	Permanen
Penelitian Sumber Daya	2	3	Permanen
Pengembangan Perkaderan Usaha Kecil Menengah (UMK)	2	3	Permanen
Kerja Sama Hubungan Antar Lembaga	2	3	Permanen
Pedagang Kaki Lima (PKL)	0	0	-
Peraturan Perundang-Undangan	2	3	Musnah
Sarana dan Prasarana	2	3	Musnah
Monitoring dan Evaluasi	2	3	Permanen
KEHUTANAN	0	0	-
Kebijakan di bidang Kehutanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2	3	Permanen
Penyuluhan	0	0	-
Program Kerja Penyuluhan	2	3	Musnah
Materi Penyuluhan	2	3	Musnah
Program Penyuluhan	2	3	Musnah
Sarana Penyuluhan	2	3	Musnah
Pengembangan Tenaga Penyuluhan	2	3	Musnah
Pelaksanaan Penyuluhan	2	3	Musnah
Pemberdayaan Masyarakat	2	3	Musnah

Deseminasi	2	3	Musnah
Evaluasi, dan Laporan	2	3	Permanen
Planologi Kehutanan	0	0	-
Perencanaan Makro Kawasan Hutan	3	7	Permanen
Penataan Ruang Kawasan Hutan	3	7	Permanen
Statistik dan Jaringan Komunikasi Data Kehutanan	3	7	Permanen
Pengukuhan dan Penataaan Kawasan Hutan	3	7	Permanen
Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan	3	7	Permanen
Informasi dan Dokumentasi Kawasan Hutan	3	7	Permanen
Inventarisasi Sumber Daya Hutan	3	7	Permanen
Pemantauan Sumber Daya Hutan	3	7	Permanen
Pemetaan Sumber Daya Hutan	3	7	Permanen
Jaringan Data Spasial	3	7	Permanen
Penggunaan Kawasan Hutan	3	7	Permanen
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan	3	7	Permanen
Informasi Penggunaan Kawasan Hutan	3	7	Permanen
Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	3	7	Permanen
Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan	3	7	Permanen
Informasi Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan	3	7	Permanen
Bina Usaha Kehutanan	0	0	-
Data areal Industri Kayu Hak Pengusahaan Hutan (HPH)/Hutan Tanaman Industri (HTI)/ Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)	3	7	Permanen
SK Industri Kayu Hak Pengusahaan Hutan (HPH)/Hutan Tanaman Industri (HTI)/ Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)	3	7	Permanen
Kerjasama	3	7	Permanen

Pembatalan/Penolakan	3	7	Permanen
Perpanjangan	3	7	Permanen
Modal dan Peralatan	3	7	Permanen
Investasi Industri	3	7	Permanen
Peralatan	3	7	Musnah
Tenaga Kerja	3	2	Musnah
Pemegang Saham	3	7	Musnah
Neraca Perusahaan	3	7	Permanen
Rencana Karya Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)	3	7	Permanen
Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH)	3	7	Permanen
Rencana Karya Tahunan Pengusahaan Hutan (RKT)	2	3	Permanen
Rencana Karya Lima Tahun Pengusahaan Hutan (RKL)	2	3	Permanen
Target Produksi RKT dan Beban Kerja	2	3	Musnah
Produksi Kayu	2	3	Musnah
Produksi non kayu	2	3	Musnah
Industri Kayu Hak Pengusahaan Hutan (HPH)/Hutan Tanaman Industri (HTI)/ Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)	2	3	Musnah
Industri Kayu Non Hak Pengusahaan Hutan (HPH)/Hutan Tanaman Industri (HTI)/ Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)	2	3	Musnah
Industri Non Kayu	2	3	Musnah
Hutan Tanaman Industri Pulp	3	7	Permanen
Hutan Tanaman Industri Pertukangan	3	7	Permanen
Pelanggaran dan Sanksi	3	2	Musnah
Pemblokiran	3	2	Musnah
Denda	3	7	Musnah
Pencabutan Areal Hak Pengusahaan Hutan (HPH)/Hutan Tanaman	3	7	Permanen

Industri (HTI)/ Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)			
Pola Pemanfaatan Hutan Produksi	2	3	Permanen
Penataan Pemanfaatan Hutan Produksi	2	3	Permanen
Informasi Sumber Daya Hutan Produksi	2	3	Permanen
Pengembangan Investasi Usaha	2	3	Permanen
Penyiapan Pemanfaatan Hutan Alam	2	3	Permanen
Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Alam/Rencana Kerja Usaha Produksi Hasil	2	3	Permanen
Produksi Hutan Alam	2	3	Permanen
Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Alam	2	3	Permanen
Pengembangan Hutan Tanaman Industri	2	3	Permanen
Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat	2	3	Permanen
Pengembangan Rencana Kerja dan Produksi Hutan Tanaman/Rencana Kerja Usaha Produksi	2	3	Permanen
Penilaian Kinerja Pengembangan Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman	2	3	Permanen
Pembiayaan Hutan Tanaman	2	3	Permanen
Penerimaan Negara Bukan Pajak Hasil Hutan	3	7	Musnah
Peredaran Hasil Hutan	3	7	Musnah
Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan	3	7	Musnah
Penertiban Peredaran Hasil Hutan	3	7	Musnah
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	3	7	Permanen
Pengendalian Bahan Baku dan Industri Primer Hasil Hutan	3	7	Permanen
Penilaian Kinerja Industri dan Pemasaran Hasil Hutan	3	7	Permanen
Pembinaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH)/Hutan Tanaman Industri (HTI)/ Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)	3	7	Permanen
Pembinaan Tebang Pilih Tanaman Indonesia (TPTI)/ Tebang. Pilih	2	3	Musnah

Tanam Jalur (TPTJ)/Silvikultur			
Standardisasi dan Lingkungan	0	0	-
Standardisasi	2	3	Permanen
Sarana Pengujian Hasil Hutan	3	7	Permanen
Pengembangan	2	3	Musnah
Pemasaran Hasil Hutan	2	3	Musnah
Pengendalian Lingkungan	2	3	Permanen
Angkutan Hasil Hutan	2	3	Musnah
Tanda Pengenal Perusahaan Tata Usaha Hasil Hutan	2	3	Musnah
Legalitas Tata Usaha Hasil Hutan	2	3	Musnah
Palu Tok Kualitas Tata Usaha Hasil Hutan	2	3	Permanen
Pass Angkutan Hasil Hutan	2	3	Musnah
Sertifikat Ekspor Hasil Hutan	2	3	Musnah
Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam	0	0	-
Flora dan Fauna yang Dilindungi	2	3	Permanen
Flora dan Fauna yang Tidak Dilindungi	2	3	Musnah
Lembaga Konservasi/Kebun Binatang	2	3	Permanen
Konvensi Keanekaragaman Hayati	2	3	Permanen
Kawasan Konservasi	3	7	Permanen
Pengamanan Hutan	2	3	Permanen
Program dan Evaluasi Penyidikan dan Perlindungan	2	3	Permanen
Penyidikan dan Perlindungan Wilayah Hutan	2	3	Permanen
Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	2	3	Musnah
Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam	2	3	Permanen
Bina Cinta Alam	2	3	Musnah
Kader Konservasi Sumber Daya Alam (SDA)	2	3	Musnah

Data organisasi pencinta alam dan kader konservasi Sumber Daya Alam (SDA)	2	3	Permanen
Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial	0	0	-
Pengelolaan Benih	3	7	Permanen
Kebun Benih	3	7	Permanen
Tegakan Benih	3	7	Permanen
Pengadaan Benih	3	7	Musnah
Pengujian dan Penyimpanan Benih	3	7	Permanen
Lalu Lintas Angkutan Benih	2	3	Musnah
Pembibitan	3	7	Permanen
Lalu Lintas Angkutan Benih	3	7	Permanen
Pengembangan Usaha Perbenihan	3	7	Permanen
Pengendalian Peredaran Benih	3	7	Permanen
Rehabilitasi Hutan dan Lahan	2	3	Permanen
Tanaman Reboisasi	2	3	Permanen
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	2	3	Permanen
Perhutanan Sosial	2	3	Permanen
Pengendalian Perladangan	2	3	Permanen
Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	0	0	-
Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Kehutanan	2	3	Permanen
Monitoring dan Evaluasi Penelitian	2	3	Permanen
Diseminasi	2	3	Permanen
Gelar Teknologi	2	3	Permanen
Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan	2	3	Permanen
KELAUTAN DAN PERIKANAN	0	0	-
Kebijakan di bidang Kelautan dan Perikanan yang dilakukan oleh	2	3	Permanen

Pemerintah Daerah			
Perikanan Tangkap	0	0	-
Data dan Statistik Perikanan Tangkap	2	3	Permanen
Rancang Bangun dan Kelaikan Kapal Perikanan	2	3	Permanen
Rancang Bangun dan Kelaikan Alat Tangkap Ikan	2	3	Permanen
Pendaftaran Kapal Perikanan	2	3	Musnah
Pengawasan Kapal dan Ketenagakerjaan Perikanan	2	3	Musnah
Perbantuan dan Evaluasi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	2	3	Musnah
Alokasi Usaha Penangkapan Ikan	2	3	Musnah
Tata Pengusahaan Penangkapan Ikan	2	3	Musnah
Verifikasi Dokumen Penangkapan Ikan	2	3	Musnah
Pelayanan Dokumen Penangkapan Ikan	2	3	Musnah
Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan	2	3	Musnah
Kelembgaan Usaha Penangkapan	2	3	Musnah
Investasi dan Permodalan Usaha	2	3	Musnah
Kenelayanan	2	3	Musnah
Pembinaan Pengelolaan Usaha	2	3	Musnah
Pemantauan dan Evaluasi Usaha Penangkapan Ikan	2	3	Musnah
Perikanan Budidaya	0	0	-
Potensi Lahan dan Air	2	3	Musnah
Prasarana dan Sarana Budidaya Air Tawar	2	3	Musnah
Pengelolaan Induk Perbenihan ikan air tawar	2	3	Musnah
Perbenihan Skala Kecil	2	3	Musnah
Informasi dan Distribusi Pembenuhan	2	3	Musnah
Budidaya Air Tawar	2	3	Permanen
Budidaya Ikan Hias	2	3	Permanen

Sertifikasi Budidaya Perikanan	2	3	Permanen
Data dan Statistik Perikanan Budidaya	2	3	Musnah
Hama dan Penyakit Ikan	2	3	Permanen
Perlindungan Lingkungan Budidaya	2	3	Permanen
Investasi dan Permodalan Usaha Budidaya	2	3	Permanen
Kewirausahaan Budidaya	2	3	Permanen
Pelayanan Usaha Budidaya	2	3	Permanen
Kelembagaan dan Ketenagaakerjaan	2	3	Musnah
Promosi Usaha dan Budaya	2	3	Musnah
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	0	0	-
Standarisasi Pengolahan Hasil	2	3	Musnah
Pengembangan Produk	2	3	Musnah
Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	2	3	Musnah
Industri Pengolahan	2	3	Musnah
Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil	2	3	Permanen
Standarisasi Pengembangan Produk Non Konsumsi	2	3	Permanen
Promosi dan Jaringan Ikan Hias	2	3	Musnah
Pengembangan Industri	2	3	Musnah
Sarana dan Prasarana Pengembangan Produk Non Konsumsi	2	3	Musnah
Kelembagaan Pemasaran Dalam Negeri	1	1	Permanen
Analisis dan Informasi Pasar Dalam Negeri	2	3	Musnah
Jaringan Distribusi dan Kemitraan Pemasaran Dalam Negeri	1	1	Permanen
Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Dalam Negeri	1	1	Musnah
Sarana dan Prasarana Pemasaran Dalam Negeri	2	3	Permanen
Kelembagaan Pemasaran Luar Negeri	1	1	Permanen
Analisis dan Informasi Pemasaran Luar Negeri	2	3	Musnah

Pengembangan Ekspor	1	1	Musnah
Pengembangan Impor	2	3	Musnah
Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Luar Negeri	1	1	Musnah
Pelayanan Usaha	2	3	Permanen
Kemitraan Usaha	2	3	Permanen
Ketenagakerjaan Pengolahan dan Pemasaran	2	3	Musnah
Investasi dan Permodalan	2	3	Permanen
Informasi dan Promosi	2	3	Musnah
Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	0	0	-
Rencana Tata Ruang Laut Nasional dan Perairan Yurisdiksi	2	3	Permanen
Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah I	2	3	Permanen
Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah II	2	3	Permanen
Informasi dan Evaluasi Spasial	2	3	Permanen
Jejaring, Data, dan Informasi Konservasi	2	3	Permanen
Konservasi Wawasan	2	3	Permanen
Konservasi Jenis Ikan	2	3	Permanen
Pemanfaatan Kawasan dan Jenis Ikan	2	3	Permanen
Mitigasi Bencana Lingkungan	2	3	Musnah
Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan	2	3	Musnah
Penanggulangan Pencemaran Sumber Daya Pesisir dan Laut	2	3	Musnah
Rehabilitasi dan Reklamasi	2	3	Musnah
Identifikasi Pulau-Pulau Terkecil	2	3	Permanen
Pengelolaan Ekosistem Pulau-Pulau Terkecil	2	3	Permanen
Investasi dan Promosi Pulau-Pulau Terkecil	2	3	Musnah
Sarana dan Prasarana Pulau-Pulau Terkecil	2	3	Permanen
Akses Permodalan	2	3	Musnah

Akses Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	2	3	Permanen
Sosial Budaya Masyarakat	2	3	Musnah
Pengembangan Usaha	2	3	Musnah
Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	0	0	-
Pengawasan Penangkapan Wilayah Barat	2	3	Musnah
Pengawasan Penangkapan Wilayah Timur	2	3	Musnah
Pengawasan Pengangkutan, Pengolahan dan Pemasaran	2	3	Musnah
Pengawasan Usaha Budidaya	2	3	Musnah
Pengawasan Ekosistem Perairan dan Kawasan Konservasi	2	3	Musnah
Pengawasan Pencemaran Perairan	2	3	Musnah
Pengawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Terkecil	2	3	Musnah
Pengawasan Jasa Kelautan dan Sumber Daya Non Hayati	2	3	Musnah
Logistik dan Operasional Wilayah Barat	1	1	Musnah
Logistik dan Operasional Wilayah Timur	1	1	Musnah
Perawatan Kapal Pengawas	2	3	Permanen
Pengawasan Kapal Pengawas	2	3	Permanen
Sistem Pemantauan	2	3	Permanen
Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan	1	1	Musnah
Pemantauan Sumber Daya Perikanan	1	1	Musnah
Pengembangan Infrastruktur Pengawasan	2	3	Permanen
Penyidikan	3	7	Permanen
Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal	3	7	Permanen
Kerja Sama Penegakan Hukum dan Fasilitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan	2	3	Musnah
Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Pelanggaran	2	3	Musnah
Karantina Ikan	0	0	-

Pemeriksaan Ikan	2	3	Musnah
Penahanan	2	3	Musnah
Pengasingan	2	3	Musnah
Pengamatan	2	3	Musnah
Pengakuan	2	3	Musnah
Penolakan	2	3	Musnah
Pemusnahan	2	3	Musnah
Persyaratan lalu Lintas Pemasukan	2	3	Permanen
Persyaratan lalu Lintas Pengeluaran	2	3	Permanen
Permohonan Sertifikat	2	3	Musnah
Pemasukan Formulir	2	3	Musnah
Pemasukan Sertifikat	2	3	Musnah
Evaluasi dan Monitoring Sertifikat	2	3	Musnah
Surat Perintah	2	3	Musnah
Rekomendasi	2	3	Musnah
Penutupan Suatu Area	2	3	Permanen
Pelanggaran Lalu Lintas Ikan	2	3	Permanen
Pengawasan Peraturan Perkarantinaaan	3	7	Musnah
Pengawasan Pelaksanaan Operasional	3	7	Musnah
Instalasi Karantina Sementara	2	3	Musnah
Lokasi Karantina	2	3	Musnah
PERTANIAN	0	0	-
Kebijakan di bidang Pertanian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2	3	Permanen
Perlindungan hortikultura	0	0	-
Perlindungan Tanaman Buah	2	3	Musnah
Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat	2	3	Musnah

Perlindungan Tanaman Florikultura	2	3	Musnah
Dampak iklim dan Persyaratan Teknis	2	3	Musnah
Perbenihan Hortikultura	0	0	-
Penilaian Varietas	2	3	Musnah
Pengawasan Mutu Benih	2	3	Musnah
Budidaya dan Pascapanen Florikultura	2	3	Musnah
Perluasan dan Pengelolaan Lahan	0	0	-
Basis Data Lahan	2	3	Permanen
Pengendalian Lahan	2	3	Permanen
Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan	2	3	Permanen
Perluasan Kawasan Tanaman Pangan	2	3	Permanen
Perluasan Kawasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	2	3	Permanen
Pengelolaan Air Irigasi	0	0	-
Pengembangan Sumber Air	2	3	Musnah
Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air	2	3	Musnah
Iklim, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup	2	3	Musnah
Kelembagaan	2	3	Musnah
Pembiayaan Pertanian	0	0	-
Pembiayaan Program	2	3	Permanen
Pembiayaan Syariah dan Kerja Sama	2	3	Musnah
Pembiayaan agribisnis	2	3	Musnah
Kelembagaan dan Pemberdayaan agribisnis	2	3	Musnah
Pupuk Pestisida	0	0	-
Pupuk Organik dan Pembenah Tanah	2	3	Musnah
Pupuk Anorganik	2	3	Musnah
Pestisida	2	3	Musnah

Pengawasan Pupuk dan Pestisida	2	3	Musnah
Alat dan Mesin Pertanian	0	0	-
Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian	2	3	Permanen
Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian	2	3	Musnah
Kelembagaan dan Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian	2	3	Musnah
Perbenihan Tanaman Pangan	0	0	-
Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih	2	3	Permanen
Produksi Benih Serealia	2	3	Permanen
Produksi Benih Aneka Kacang dan Umbi	2	3	Permanen
Kelembagaan Benih	2	3	Permanen
Budidaya Serealia	0	0	-
Padi Irigasi dan Rawa	2	3	Permanen
Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering	2	3	Permanen
Jagung	2	3	Permanen
Serealia Lain	2	3	Permanen
Budidaya Aneka Kacang dan Umbi	0	0	-
Kedelai	2	3	Permanen
Ubi Kayu	2	3	Permanen
Aneka Kacang	2	3	Permanen
Aneka Umbi	2	3	Permanen
Tanaman Pangan	0	0	-
Pengelolaan Data Organisasi Pengganggu Tumbuhan	2	3	Permanen
Dampak Perubahan Iklim	2	3	Permanen
Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan	2	3	Permanen
Pengelolaan Pengendalian Hama Terpadu	2	3	Permanen
Pascapanen Tanaman Pangan	0	0	-

Padi	2	3	Permanen
Jagung dan Serealia alin	2	3	Permanen
Kedelai dan Aneka Kacang	2	3	Permanen
Aneka Umbi	2	3	Permanen
Pengolahan Hasil Pertanian	0	0	-
Tanaman Pangan	2	3	Permanen
Hortikultura	2	3	Permanen
Perkebunan	2	3	Permanen
Peternakan	2	3	Permanen
Mutu dan Standarasi	0	0	-
Standardisasi	2	3	Permanen
Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu	2	3	Permanen
Akreditasi dan Kelembagaan	2	3	Permanen
Kerjasama dan Harmonisasi	2	3	Permanen
Pengembangan Usaha dan Investasi	0	0	-
Kemitraan dan Kewirausahaan	2	3	Permanen
Investasi	2	3	Permanen
Promosi Dalam Negeri	2	3	Permanen
Promosi Luar Negeri	2	3	Permanen
Pemasaran Domestik	0	0	-
Informasi Pasar	2	3	Permanen
Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga	2	3	Permanen
Sarana dan Kelembagaan Pasar	2	3	Musnah
Jaringan Pemasaran	2	3	Permanen
Administrasi Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan	2	3	Permanen
Hasil Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan	0	0	-

Hasil Penelitian dan Pengembangan	2	3	Permanen
Hasil Pengkajian dan Kebijakan dan Strategi	2	3	Permanen
Diseminasi	2	3	Permanen
Publikasi Hasil Penelitian/ Pengkajian	0	0	-
Pameran, Temu Lapang, Temu Bisnis, Demlot, Seminar Lokakarya, Temu Karya, <i>Workshop</i>	2	3	Permanen
Jurnal, Buletin, Monograf, Prosiding, dan Publikasi lainnya	2	3	Permanen
Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan	1	1	Musnah
Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan	1	1	Musnah
Data Penelitian dan Pengembangan	2	8	Permanen
Evaluasi Penelitian/ Pengkajian dan Pengembangan	1	1	Permanen
Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)	0	0	-
Hak Cipta	2	3	Permanen
Hak Paten Sederhana	2	3	Permanen
Hak Paten Biasa	2	3	Permanen
Hak Merek	2	3	Permanen
Pendaftaran Varietas Tanaman	1	1	Musnah
Permohonan Hak Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan (PVTT) Tanaman Semusim dan Tahunan	2	3	Permanen
Permohonan Hutan Kawasan Industri (HKI) yang ditolak	2	1	Musnah
Pelayanan Perijinan Pertanian	0	0	-
Sarana I (bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian)	2	3	Permanen
Sarana II (bidang benih tanaman, bahan penelitian, teknis pangan segar asal tumbuhan, teknis pengalihan saham perkebunan)	2	3	Permanen
Sarana III (bidang bibit, karkas,daging, dan jeroan, pakan ternak, obat hewan, dan teknis sumber daya genetik ternak)	2	3	Permanen

Pelayanan Hukum	0	0	-
Sertifikasi	2	3	Permanen
Pertimbangan Hukum	2	8	Permanen
Karantina Pertanian	0	0	-
Karantina Tumbuhan	2	3	Musnah
Karantina Hewan	2	3	Musnah
Bimbingan Teknis	2	3	Musnah
Evaluasi	2	3	Musnah
PETERNAKAN	0	0	-
Kebijakan di bidang Peternakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2	3	Permanen
Peternakan dan Kesehatan Hewan	0	0	-
Perbibitan Ternak	2	3	Musnah
Pakan Ternak	2	3	Musnah
Budidaya Ternak	2	3	Permanen
Kesehatan Hewan	2	3	Musnah
Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen	2	3	Musnah
Bimbingan Teknis	2	3	Musnah
Evaluasi	2	3	Musnah
PERKEBUNAN	0	0	-
Kebijakan di bidang Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2	3	Permanen
Tanaman Semusim	0	0	-
Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Semusim	2	3	Permanen
Perbenihan Tanaman Semusim	2	3	Musnah
Budidaya Teknologi Budidaya Tanaman Semusim	2	3	Musnah

Pemberdayaan Tanaman Semusim	2	3	Musnah
Tanaman Rempah & Penyegar	0	0	-
Identifikasi dan Pendayaguunaan Sumber Daya Tanaman Rempah & Penyegar	2	3	Permanen
Perbenihan Tanaman Rempah & Penyegar	2	3	Musnah
Budidaya Tanaman Rempah & Penyegar	2	3	Musnah
Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Rempah & Penyegar	2	3	Musnah
Tanaman Tahunan	0	0	-
Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya, Tanaman Tahunan	2	3	Permanen
Perbenihan Tanaman Tahunan	2	3	Musnah
Budidaya Tanaman Tahunan	2	3	Musnah
Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Tahunan	2	3	Musnah
Perlindungan Perkebunan	0	0	-
Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim, Perlindungan Perkebunan	2	3	Permanen
Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar	2	3	Permanen
Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan	2	3	Permanen
Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran	2	3	Permanen
Pascapanen dan Pembinaan Usaha	0	0	-
Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar	2	3	Permanen
Pascapanen Tanaman Tahunan	2	3	Permanen
Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan	2	3	Musnah
Gangguan Usaha dan Penanganan Konflik	2	3	Permanen
Bimbingan Teknis Perkebunan	2	3	Musnah

Evaluasi Perkebunan	2	3	Musnah
PERINDUSTRIAN	0	0	-
Kebijakan di bidang Perindustrian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2	3	Permanen
Iklim Usaha dan Kerja Sama	0	0	-
Industri Manufaktur	3	7	Musnah
Industri Agro	3	7	Musnah
Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	3	7	Musnah
Industri Kecil dan Menengah	3	7	Musnah
Promosi Industri	0	0	-
Industri Manufaktur	3	7	Musnah
Promosi Industri Agro	3	7	Musnah
Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	3	7	Musnah
Industri Kecil dan Menengah	3	7	Musnah
Standarisasi dan Teknologi	0	0	-
Industri Manufaktur	3	7	Permanen
Industri Agro	3	7	Permanen
Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	3	7	Permanen
Industri Kecil dan Menengah	3	7	Permanen
Hak atas Kekayaan Intelektual	0	0	-
Industri Manufaktur	3	7	Permanen
Industri Agro	3	7	Permanen
Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	3	7	Permanen
Industri Kecil dan Menengah	3	7	Permanen
Industri Hijau	0	0	-
Industri Manufaktur	3	7	Permanen

Industri Agro	3	7	Permanen
Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	3	7	Permanen
Industri Kecil dan Menengah	3	7	Permanen
Analisis Kerja Sama Industri Unggulan Kabupaten/Kota	2	3	Permanen
Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Inti Industri (Provinsi dan Kabupaten/Kota)	2	3	Musnah
Pengembangan Infrastruktur Pendukung Pengembangan Kawasan Industri	2	3	Musnah
Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri	2	3	Musnah
Kerja Sama Ketahanan Industri Internasional	3	7	Permanen
Standarisasi	0	0	-
Standar	3	7	Permanen
Penyiapan Penerapan	3	7	Permanen
Infrastruktur Standar	3	7	Permanen
Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri	0	0	-
Kebijakan Industri	3	7	Permanen
Perpajakan dan Tarif	3	7	Permanen
Pengembangan Model Industrial	3	7	Permanen
Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup	0	0	-
Industri Hijau	3	7	Permanen
Lingkungan Hidup	3	7	Permanen
Energi	3	7	Permanen
Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual	0	0	-
Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Industri	3	7	Permanen
Pengkajian dan Penerapan Inovasi Teknologi Industri	3	7	Permanen
Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual	3	7	Permanen

Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Industri	3	7	Permanen
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	0	0	-
Kebijakan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2	3	Permanen
Rekomendasi Kegeologian	0	0	-
Mitigasi Gunung Api, Gempa Bumi, Tsunami, dan Gerakan Tanah	2	3	Permanen
Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan	2	3	Permanen
Pertambangan	2	3	Permanen
Panas Bumi	2	3	Permanen
Geosains	2	3	Permanen
Pengukuran <i>Time Domain Electromagnetic</i> (TDEM)	2	3	Permanen
Kelayakan Lingkungan	2	3	Permanen
Penelitian Kegeologian	0	0	-
Administrasi pelaksanaan penelitian	2	3	Musnah
Administrasi tenaga penelitian	2	3	Musnah
Administrasi penggunaan peralatan penelitian	2	3	Musnah
<i>Log-book</i> peralatan survei/peralatan uji/kalibrasi	3	7	Permanen
Hasil penelitian dan penyelidikan kegeologian	3	7	Permanen
Sumber Daya Geologi	3	7	Permanen
Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan	3	7	Permanen
Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi	3	7	Permanen
Survei Geologi	3	7	Permanen
Inventarisasi dan evaluasi kegeologian	0	0	-
Sumber Daya Geologi	2	3	Permanen
Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi	2	3	Permanen
Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan	2	3	Permanen

Survei Geologi	2	3	Permanen
Konservasi	2	3	Permanen
Administrasi Pelayanan Kegeologian dan Penyajian Data dan Informasi	0	0	-
Peta potensi dan sebaran	2	3	Musnah
Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan	2	3	Musnah
Mitigasi Bencana Gunungapi, Gerakan Tanah, Gempa Bumi dan Tsunami, Semburan Lumpur/Gas serta kebakaran Batubara	2	3	Musnah
Survei Geologi	2	3	Permanen
Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi	0	0	-
Rencana Induk Jaringan Gas Bumi	2	3	Permanen
Rencana dan Realisasi Investasi	2	5	Permanen
Penetapan Harga Minyak Mentah	2	3	Permanen
Penetapan Bagii Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Minyak dan Gas Bumi	3	7	Permanen
Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	3	7	Musnah
Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	3	7	Musnah
Rekomendasi Kemampuan Produksi Barang dan Jasa Dalam Negeri	3	7	Musnah
Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB) dan Rencana Impor Barang (RIB)	3	7	Musnah
Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	0	0	-
Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Minyak dan Gas Bumi (Konvensional dan Non Konvensional)	3	7	Permanen
Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi	5	5	Musnah
Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi	5	5	Permanen
Pengembangan lapangan Minyak dan Gas Bumi (POD)	2	3	Permanen

Perpanjangan Kontrak KKS	2	3	Permanen
Penetapan Alokasi dan Harga Gas	2	5	Musnah
Partisipasi Interest	2	5	Permanen
Tumpang Tindih Lahan	2	5	Permanen
Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	0	0	-
Perumusan pedoman, prosedur, layanan serta pengawasan Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga Minyak Bumi dan Gas Bumi, Hasil Olahahan dan Bahan Bakar Lain	2	3	Permanen
Fasilitasi dan pertimbangan pelanggaran	2	5	Musnah
Penetapan Harga dan Subsidi Bahan Bakar yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri	2	3	Musnah
Teknik dan Lingkungan	0	0	-
Perumusan pelaksanaan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) / Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)	2	5	Permanen
Registrasi Nomor Pelumas Terdaftar (NPT)	2	5	Permanen
Buku <i>Register Welding Procedure Specification (WPS)/ Procedure Qualification Record (PQR)</i>	3	7	Permanen
Register dan Sertifikat Kualifikasi Juru Las	3	7	Permanen
Keselamatan Hulu Minyak dan Gas Bumi	2	3	Musnah
Keselamatan Hilir Minyak dan Gas Bumi	2	3	Musnah
Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan	3	7	Musnah
Dokumen Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang Hulu dan Hilir	2	3	Musnah
Penghargaan Keselamatan Kerja	2	3	Musnah
Usaha penunjang	2	5	Musnah
Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	0	0	-

Perencanaan Program Kerja Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	3	7	Permanen
Pengadaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	3	7	Permanen
Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	3	7	Permanen
Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Infrastuktur Minyak dan Gas Bumi	3	7	Permanen
Penyiapan Program Energi Terbarukan dan Konservasi Energi	0	0	-
Usulan Wilayah Kerja Panas Bumi	3	7	Musnah
Usul Program Aneka Energi Pemerintah Daerah dan Lembaga	3	7	Musnah
Penyiapan Program Pemanfaatan Energi	3	7	Musnah
Proyeksi Kebutuhan Energi dari Energi Baru Terbarukan (EBT)	3	7	Permanen
Perencanaan Pemanfaatan Energi dari Energi Baru Terbarukan (EBT)	3	7	Permanen
Penyusunan Neraca Energi	3	7	Permanen
Road Map di Bidang Energi Baru Terbarukan (EBT)	2	3	Permanen
Panas Bumi	0	0	-
Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)	3	7	Musnah
Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI)	3	7	Musnah
Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Peralatan	3	7	Musnah
Rekomendasi Bahan Peledak	3	7	Musnah
Perizinan penggunaan gudang bahan peledak	3	7	Musnah
Izin Tangki Bahan Bakar Cair	3	7	Musnah
Persetujuan sertifikasi <i>Welding Prosedure Specifikation</i> (WPS) dan <i>Prosedure Qualification Record</i> (PQR) dan kualifikasi Juru Las	3	7	Musnah
Penerbitasn Izin Usaha Panas Bumi (IUP)	3	7	Musnah
Penerbitan Izin Panas Bumi (IPB)	3	7	Permanen
Penerbitan Izin Pemanfaatan Langsung (IPL)	3	7	Permanen

Penetapan kapasitas usaha panas bumi	3	7	Musnah
Penetapan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	3	7	Musnah
Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi Panas Bumi	2	3	Musnah
Pelaksanaan Kerja Sama Panas Bumi	3	7	Permanen
Inventarisasi, Verifikasi dan Evaluasi Obvitnas Bidang Panas Bumi	3	7	Musnah
Monitoring Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) pada Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi	3	7	Musnah
Pembinaan dan Pengawasan Investasi Panas Bumi	3	7	Musnah
Bioenergi	0	0	-
Penerbitan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (BNN)	2	3	Musnah
Pengadaan Bahan Bakar Nabati (BBN)	2	3	Musnah
Penerbitan Rekomendasi Ekspor - Impor	2	3	Musnah
Penetapan Indeks Harga Pasar BBN (HIP BBN)	2	3	Musnah
Evaluasi/Revisi HIP BBN	2	3	Musnah
<i>Database</i> Pengusahaan Bioenergi	2	3	Musnah
Penetapan Badan Usaha sebagai Pengelola Energi Biomassa atau Biogas untuk Pembangkit Listrik	2	3	Musnah
Penetapan Spesifikasi Bahan Bakar Nabati	2	3	Musnah
Usul Program Bioenergi Pemerintah Daerah dan Lembaga	3	7	Permanen
Aneka Energi	0	0	-
Penerbitan Izin Usaha Aneka Energi	2	3	Musnah
Penetapan Kapasitas Usaha	2	3	Permanen
Rekomendasi Kompetensi dan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing	2	3	Permanen
Rekomendasi Persetujuan Perubahan Pemegang Saham	2	3	Musnah
Persetujuan Rencana Impor Barang (RIB)	2	3	Musnah
Konservasi Energi	0	0	-

Audit Energi melalui program kemitraan Konservasi Energi	3	7	Musnah
Monitoring Implementasi hasil audit energi melalui program kemitraan konservasi energi	3	7	Musnah
Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan manajemen energi di pengguna energi di atas 6.000 <i>Ton Oil Equivalent</i> (TOE)	3	7	Musnah
Pengawasan sertifikasi label dan tanda hemat energi pada lampu swabalast	2	3	Musnah
Penyusunan daftar peralatan/teknologi efisiensi	2	3	Musnah
Penyusunan emisi energi gas rumah kaca	2	3	Musnah
Pemberian insentif dan disinsentif konservasi energi	2	3	Musnah
Profil investasi efisiensi energi	2	3	Musnah
<i>Investment Grade Audit</i> (IGA)	2	3	Musnah
Bimbingan Teknis Bidang Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE)	2	3	Musnah
Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE)	0	0	-
Usul Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Daerah dan Lembaga	3	7	Permanen
Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	3	7	Musnah
Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Bidang Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE)	3	7	Musnah
Evaluasi Program Kerja	3	7	Musnah
Bina Program Tenaga Listrik	0	0	-
Investasi dan pendanaan tenaga listrik	3	7	Musnah
Pengembangan listrik pedesaan	3	7	Musnah
Data dan Informasi Ketenagalistrikan	3	7	Permanen
Bina Usaha Ketenagalistrikan	0	0	-
Penyiapan Usaha Ketenagalistrikan	2	5	Musnah

Harga dan Subsidi Listrik	3	7	Permanen
Hubungan komersial tenaga listrik	2	3	Musnah
Perlindungan konsumen listrik	2	3	Musnah
Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan	0	0	-
Kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan	2	3	Musnah
Penyiapan kompetensi dan pengawasan tenaga teknik ketenagalistrikan	2	3	Musnah
Usaha penunjang ketenagalistrikan	2	3	Musnah
Perlindungan lingkungan ketenagalistrikan	2	3	Musnah
Sertifikasi	0	0	-
Dokumen Sertifikasi Produk peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik	2	3	Permanen
Dokumen Penunjukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK)	2	3	Permanen
Dokumen Penerbitan Sertifikasi Laik Operasi (SLO) Instalasi Tenaga Listrik	2	3	Permanen
Dokumen Pembinaan dan pengawasan sertifikat laik operasi (SLO) instalasi tenaga listrik	2	3	Musnah
Registrasi Sertifikasi	2	3	Permanen
Akreditasi Ketenagalistrikan	2	3	Permanen
Standarisasi Kompetensi	2	3	Permanen
Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) Bidang Ketenagalistrikan	0	0	-
Perumusan rancangan Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) bidang ketenagalistrikan	2	3	Musnah
Forum konsensus rancangan Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) bidang ketenagalistrikan	2	3	Musnah
Program pemberlakuan Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) wajib bidang ketenagalistrikan	3	7	Permanen
Dokumen pengawasan penerapan Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) wajib bidang ketenagalistrikan	3	7	Permanen

Standardisasi Usaha Penunjang Ketenagalistrikan	0	0	-
Klasifikasi usaha penunjang ketenagalistrikan	2	3	Permanen
Kualifikasi usaha penunjang ketenagalistrikan	2	3	Permanen
Dokumen penunjukan Lembaga Inspeksi Tekni (LIT)	2	3	Musnah
Laporan berkala pemegang penunjukan Lembaga Inspeksi Tekni (LIT)	2	3	Musnah
Laporan hasil pengawasan penunjukan	2	3	Musnah
Bina Program Mineral dan Batubara	0	0	-
Penyiapan dan Perencanaan Program Mineral dan Batubara	2	3	Permanen
Rencana Induk Mineral dan Batubara	2	3	Permanen
Pengembangan Investasi dan Kerja Sama Bidang Mineral dan Batubara	2	3	Permanen
Data dan Informasai Mineral dan Batubara	2	3	Musnah
Pelaporan Program Mineral dan Batubara	2	3	Permanen
Perencanaan, Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Mineral dan Batubara melalui lelang reguler	3	7	Permanen
Data dan Informasi Wilayah Mineral dan Batubara	3	7	Permanen
Perencanaan Produksi Mineral dan Batubara	2	3	Musnah
Pengembangan dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara	2	3	Permanen
Pembinaan Pengusahaan Mineral	0	0	-
Ketenagakerjaan	2	3	Musnah
Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang	2	3	Musnah
Penyelesaian perselisihan usaha pertambangan mineral	2	5	Musnah
Rekomendasi kegiatan usaha pertambangan mineral	3	7	Permanen
Laporan/data kegiatan eksplorasi mineral	2	5	Permanen
Pengawasan produksi dan pemasaran mineral (logam, bukan logam batuan, radioaktif, dan mineral jarang)	3	7	Musnah
Perizinan usaha pertambangan mineral	3	7	Permanen

Kontrak Karya (KK)	2	3	Permanen
Pengelolaan barang Kontrak Karya (KK)	2	3	Permanen
Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)	2	3	Permanen
Persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, pada perusahaan mineral	2	3	Permanen
Teguran kepada pengusahaan Kontrak Karya (KK)	2	3	Musnah
Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambangan mineral	2	3	Musnah
Pedoman/petunjuk teknis pertambangan mineral termasuk rancangan awal sampul dengan rancangan akhir	2	3	Permanen
Pelaporan usaha pertambangan mineral	2	3	Permanen
Penghargaan usaha pertambangan mineral	2	3	Musnah
Penerbitan sertifikat <i>clear and clean</i> (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral	2	3	Permanen
Pembinaan Pengusahaan Batubara	0	0	-
Ketenagakerjaan	2	3	Musnah
Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang	2	3	Musnah
Penyelesaian perselisihan usaha pertambangan batubara	2	3	Musnah
Rekomendasi kegiatan usaha pertambangan batubara	2	3	Permanen
Laporan/data kegiatan eksplorasi batubara	2	3	Permanen
Pengawasan produksi dan pemasaran batubara (bitumen padat, batuan aspal, batubara dan gambut)	2	3	Permanen
Perizinan Usaha Pertambangan Batubara	2	3	Permanen
Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)	3	7	Permanen
Pengelolaan Barang Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)	2	5	Permanen
Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)	3	7	Permanen

Persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, pada perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)	3	7	Permanen
Teguran kepada pengusaha Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)	2	3	Permanen
Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambangan batubara	2	3	Musnah
Pedoman/petunjuk teknis pertambangan mineral termasuk rancangan awal sampul dengan rancangan akhir	2	3	Permanen
Pelaporan usaha pertambangan batubara	2	3	Permanen
Penghargaan usaha pertambangan batubara	2	3	Permanen
Penerbitan sertifikat <i>clear and clean</i> (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara	2	3	Permanen
Penerimaan Negara	0	0	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	2	3	Permanen
Penetapan Bagi Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	2	3	Permanen
Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	2	3	Permanen
Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara	0	0	-
Perumusan RSNI (Rancangan Standar Nasional Indonesia)/ RSKKNI (Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia)	2	5	Permanen
Pengawasan Standardisasi	2	3	Musnah
Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang	2	3	Musnah
Pengawasan Keselamatan Kegiatan dan Keselamatan Pekerja	2	5	Permanen
Pemeriksaan teknis dan pengujian instalasi dan peralatan tambang	2	5	Permanen
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	2	3	Permanen
Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)	2	3	Permanen

Rekomendasi bahan kimia	2	3	Musnah
Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	2	5	Permanen
Laporan berkala teknik dan lingkungan pertambangan/ laporan tahunan pelaksanaan reklamasi	2	3	Musnah
Pemberian Penghargaan	2	3	Musnah
Pengawasan lingkungan pertambangan	2	3	Musnah
Usaha Jasa Mineral dan Batubara	3	7	Musnah
Pembinaan dan pengawasan usaha jasa mineral dan batubara	2	3	Musnah
Rekomendasi Teknis	2	3	Musnah
Persetujuan Teknis	2	3	Musnah
Pengawasan Teknis	2	3	Musnah
Pengawasan Konservasi Mineral dan Batubara	2	3	Musnah
Pembinaan Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara	2	3	Musnah
Program Penelitian dan Pengembangan	0	0	-
Rencana Penelitian dan Pengembangan	2	3	Permanen
Pengembangan dan inovasi	2	3	Permanen
Dokumen penerapan/pemanfaatan/pendayagunaan/replikasi/prototipe hasil penelitian/ pengkajian/pengembangan/inovasi	2	3	Permanen
Advokasi dan fasilitasi penelitian, pengembangan dan inovasi	2	3	Permanen
Diseminasi hasil penelitian,pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	2	3	Musnah
Pembinaan penelitian/Pengembangan,pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	2	3	Musnah
Jaringan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	2	3	Permanen
Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	2	3	Permanen

Master proceeding/ jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	2	3	Permanen
Hak atas kekayaan intelektual (HaKI)	2	3	Permanen
Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	2	3	Musnah
Layanan jasa penelitian, pengembangan, penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)	2	3	Musnah
Sertifikasi personil peneliti bidang Sumber Daya Mineral	2	3	Permanen
Sarana Litbang	0	0	-
Administrasi penggunaan peralatan	2	3	Musnah
Log-book Peralatan Survei/Peralatan Uji Kalibrasi	1	5	Permanen
Afiliasi	0	0	-
Proyek Percontohan	2	3	Permanen
Promosi dan Layanan Jasa Teknologi	2	3	Musnah
Pembinaan Penelitian dan Pengembangan	2	3	Permanen
Penyajian Informasi	2	3	Musnah
Penelitian dan Pengembangan Kegeologian	0	0	-
Pemetaan dan penelitian geologi, geokimia, dan geofisika kelautan	3	7	Permanen
Energi Kelautan dan Kewilayahan Penelitian Energi dan kewilayahan pantai	3	7	Permanen
Penelitian sumber daya energi dan mineral kelautan	3	7	Permanen
Penelitian Sumber Daya Mineral Kelautan	3	7	Permanen
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi	0	0	-
Teknologi Eksplorasi	3	7	Permanen
Teknologi Eksploitasi	3	7	Permanen
Laboratorium	3	3	Permanen

<i>Study</i>	3	3	Permanen
Teknologi Proses	3	7	Permanen
Teknologi Aplikasi Produk	3	7	Permanen
Teknologi Gas	3	7	Permanen
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral Batubara	0	0	-
Teknologi Eksploitasi Tambang dan Pengolahan Sumber Daya	3	7	Permanen
Teknologi Pengolahan dan Pemanfaatan mineral	3	7	Permanen
Teknologi Pemanfaatan Batubara	3	7	Permanen
Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan	0	0	-
Energi baru terbarukan	3	7	Permanen
Teknologi Ketenagalistrikan	3	7	Permanen
Lingkungan dan Konservasi Energi	3	7	Permanen
Penelitian dan Pengembangan Teknologi PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) dan Konservasi Energi	3	7	Permanen
PERHUBUNGAN	0	0	-
Kebijakan di bidang Perhubungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2	3	Permanen
Jaringan Prasarana dan Pelayanan	0	0	-
Penentuan lokasi terminal barang tipe pengumpul dan tipe penunjang	2	3	Permanen
Penentuan lokasi terminal penumpang tipe A, tipe B, dan tipe C	2	3	Permanen
Penetapan lokasi terminal barang utama	2	3	Permanen
Standar pelayanan minimal pengoperasian terminal	2	3	Permanen
Jaringan trayek angkutan antar kota/provinsi	2	3	Permanen
Jaringan lintas pada jaringan jalan primer	2	3	Permanen

Penetapan kelas jalan primer	2	3	Permanen
Kualifikasi teknis petugas terminal	2	3	Permanen
Jaringan transportasi jalan sekunder	2	3	Permanen
Pengembangan Transportasi Jalan	0	0	-
Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan	2	3	Permanen
Pengembangan transportasi jalan	2	3	Musnah
Pengujian Kendaraan Bermotor	0	0	-
Pengesahan hasil uji tipe kendaraan bermotor	2	3	Permanen
Sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor	2	3	Permanen
Sertifikasi tenaga penguji kendaraan bermotor	2	3	Permanen
Akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor	2	3	Musnah
Teknologi Kendaraan Bermotor	0	0	-
Sertifikasi rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor	2	3	Permanen
Pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor	2	3	Musnah
Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor	2	3	Permanen
Harmonisasi dan standarisasi regulasi kendaraan bermotor	2	3	Permanen
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	0	0	-
Analisa dampak lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan	2	3	Musnah
Manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional	2	3	Permanen
Perlengkapan Jalan	0	0	-
Pedoman teknis perlengkapan jalan	2	3	Permanen
Penimbangan kendaraan bermotor di jalan	2	3	Musnah
Akreditasi unit penimbangan kendaraan bermotor	2	3	Permanen
Kualifikasi teknis petugas penimbangan kendaraan bermotor	2	3	Permanen
Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan nasional	2	3	Musnah

Angkutan Penumpang	0	0	-
Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi	2	3	Musnah
Izin trayek angkutan penumpang untuk trayek lintas batas negara	2	3	Permanen
Izin trayek antar kota antar provinsi	2	3	Permanen
Izin operasi angkutan pariwisata dan angkutan penumpang tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya bersifat lintas batas negara & antar kota/provinsi	1	1	Musnah
Penilaian kinerja perusahaan angkutan umum	2	3	Permanen
Pemberian subsidi angkutan umum	1	1	Permanen
Angkutan perintis	2	3	Musnah
Penghargaan perusahaan angkutan umum	2	3	Musnah
Angkutan Barang	0	0	-
Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan	2	3	Musnah
Tarif angkutan barang	2	3	Musnah
Izin operasi angkutan barang tertentu	2	3	Permanen
Pembinaan angkutan barang	2	3	Musnah
Izin dispensasi angkutan jalan	1	1	Musnah
Monitoring Operasional	0	0	-
Pengendalian operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	2	3	Musnah
Pengawasan, penertiban dan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran operasional kendaraan angkutan umum yang menjadi kewenangan	2	3	Musnah
Berkas Pelanggaran Perda	2	3	Musnah
Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil	0	0	-
Pedoman Teknis	2	3	Permanen
Penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik	2	3	Musnah

Pegawai Negeri Sipil (PPNS)			
Bimbingan teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	2	3	Musnah
Pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	2	3	Musnah
Analisa dan Evaluasi Jaringan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan	0	0	-
Pendataan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan	2	3	Permanen
Analisis serta informasi jaringan transportasi sungai, danau, & penyeberangan	2	3	Permanen
Pengembangan Jaringan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan	0	0	-
Pengembangan dan penetapan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan (peta jaringan, blueprint jaringan)	2	3	Permanen
Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan	2	3	Musnah
Rancang Bangun Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	2	3	Permanen
Bimbingan Perawatan Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	0	0	-
Perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan penyeberangan	2	3	Musnah
Pengawasan dan registrasi sarana angkutan sungai dan danau dan penyeberangan	2	3	Musnah
Rancang Bangun Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	0	0	-
Perencanaan dan pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan	2	3	Permanen
Pemberian sertifikasi pelabuhan penyeberangan	2	3	Permanen
Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan di lintas nasional dan internasional	2	3	Musnah

Penyelenggaraan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan	2	3	Musnah
Kualifikasi teknis petugas pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan	2	3	Musnah
Manajemen Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan	0	0	-
Manajemen lalu lintas	2	3	Musnah
Tata cara berlalu lintas di sungai, danau dan penyeberangan	2	3	Musnah
Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang lalu lintas dan angkutan sungai & danau	2	3	Musnah
Sertifikasi inspektur sungai dan danau dan pejabat pemberangkatan angkutan sungai dan danau	2	3	Permanen
Alur dan Perambuan Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan	0	0	-
Pengerukan alur pelayaran sungai, danau dan kolam pelabuhan penyeberangan	2	3	Musnah
Penetapan kelas alur dan peta alur pelayaran sungai dan danau	2	3	Permanen
Perambuan sungai, danau dan penyeberangan	2	3	Musnah
Bimbingan Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	0	0	-
Penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan	2	3	Musnah
Persetujuan operasi kapal penyeberangan di lintas nasional dan internasional	2	3	Musnah
Tarif dan Keperintisan	0	0	-
Perhitungan tarif, pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan	2	3	Musnah
Kriteria dan pelaksanaan pelayanan keperintisan	2	3	Musnah
Bina Sistem Transportasi Perkotaan	0	0	-
Jaringan Transportasi Perkotaan	2	3	Musnah
Transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel dan perairan daratan	2	3	Musnah

Transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi	2	3	Musnah
Lalu Lintas Perkotaan	0	0	-
Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan	2	3	Musnah
Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan di jalan nasional dalam kawasan perkotaan	2	3	Musnah
Penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi di wilayah	2	3	Musnah
Angkutan Perkotaan	0	0	-
Penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek	2	3	Musnah
Jaringan trayek perkotaan	2	3	Musnah
Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi	2	3	Musnah
Pengaduan Moda Transportasi Perkotaan	0	0	-
Penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang dan/atau barang	2	3	Musnah
Pengaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antar simpul (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal) di kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi	2	3	Musnah
Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi	2	3	Musnah
Dampak Transportasi Perkotaan	0	0	-
Penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan	2	3	Musnah
Penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan	2	3	Musnah
Masterplan pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan	3	7	Permanen
Pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam	2	3	Musnah

kawasan kota			
Rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan	2	3	Musnah
Masterplan transportasi perkotaan	2	3	Permanen
Monitoring dan Evaluasi Manajemen Keselamatan	0	0	-
Monitoring dan evaluasi data kecelakaan	2	3	Musnah
Kualifikasi unit pengkajian	2	3	Musnah
Pengembangan sistem informasi manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan	2	3	Permanen
Pengembangan Keselamatan	0	0	-
Program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan	2	3	Musnah
Harmonisasi kebijakan	2	3	Permanen
Promosi dan Kemitraan Keselamatan	0	0	-
Promosi Keselamatan : penyuluhan, publikasi dan destinasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan	2	3	Musnah
Kemitraan keselamatan antar lembaga dan masyarakat di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan	2	3	Musnah
Bina Keselamatan Angkutan Umum	0	0	-
Keselamatan Pengusahaan Angkutan Umum	2	3	Musnah
Keselamatan Awak Angkutan Umum dan awak kapal sungai dan danau	2	3	Musnah
Audit Keselamatan	0	0	-
Pedoman audit keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia	2	3	Permanen
Identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan	2	3	Musnah

Audit faktor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan	2	3	Musnah
Inspeksi Keselamatan	0	0	-
Pedoman keselamatan	2	3	Permanen
Inspeksi keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan	2	3	Musnah
Investigasi kecelakaan sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan	2	3	Musnah
Parkir	0	0	-
Surat Tugas Juru Parkir	1	1	Musnah
Izin tempat khusus parkir swasta	2	3	Musnah
Surat Tugas TKP Pemerintah	1	1	Musnah
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0	0	-
Kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2	3	Permanen
Telekomunikasi	0	0	-
Layanan Jaringan Telekomunikasi	2	3	Musnah
Layanan Jasa Telekomunikasi	2	3	Musnah
Penomoran Telekomunikasi dan Informatika	2	3	Permanen
Kelayakan Sistem Telekomunikasi	2	3	Musnah
Penyiaran	0	0	-
Pemetaan Penyelenggaraan Radio dan Televisi	2	3	Musnah
<i>Database</i> Penyelenggaraan Radio dan Televisi	2	3	Musnah
Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik dan Kewajiban Universal	0	0	-
Telekomunikasi Khusus Pemerintah Daerah	2	3	Musnah
Telekomunikasi Khusus Non Pemerintah Daerah	2	3	Musnah

Layanan Khusus Penyiaran	2	3	Musnah
Pelayanan Kewajiban Universal	2	3	Musnah
Pengembangan Infrastruktur	2	3	Musnah
Pengendalian Informatika	0	0	-
Monitoring dan Evaluasi Jaringan Telekomunikasi	2	3	Musnah
Monitoring dan Evaluasi Jasa Telekomunikasi	2	3	Musnah
Monitoring dan Evaluasi Penyiaran	2	3	Musnah
Pencegahan dan Penertiban	2	3	Musnah
<i>e- Government</i>	0	0	-
Tata Kelola <i>e-Government</i>	2	3	Musnah
Teknologi dan Infrastruktur <i>e-Government</i>	2	3	Musnah
Interoperabilitas dan Interkoneksi <i>e-Government</i>	2	3	Musnah
Aplikasi Layanan Pemerintahan	2	3	Musnah
Aplikasi Layanan Publik	2	3	Musnah
<i>e- Business</i>	0	0	-
Tata Kelola <i>e-Business</i>	2	3	Musnah
Teknologi dan Infrastruktur <i>e-Business</i>	2	3	Musnah
Interoperabilitas dan Interkoneksi <i>e-Business</i>	2	3	Musnah
Aplikasi Layanan <i>e-Business</i>	2	3	Musnah
Pemberdayaan Informatika Masyarakat	0	0	-
Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perkotaan	2	3	Musnah
Pemberdayaan Informatika Masyarakat Pedesaan	2	3	Musnah
Pemberdayaan Industri Informatika	0	0	-
Industri Infrastruktur dan Layanan Aplikasi Informatika	2	3	Musnah
Industri Perangkat Informatika Pengguna	2	3	Musnah
Industri Perangkat Lunak	2	3	Musnah

Industri Konten Multimedia	2	3	Musnah
Keamanan Informasi	0	0	-
Tata Kelola Keamanan Informasi	2	3	Musnah
Teknologi Keamanan Informasi	2	3	Musnah
Monitoring, Evaluasi dan Tanggap Darurat Keamanan Informasi	2	3	Musnah
Penyidikan dan Penindakan	2	3	Permanen
Budaya Keamanan Informasi	2	3	Musnah
Komunikasi Publik	0	0	-
Tata Kelola Komunikasi Publik	2	3	Musnah
Pengelolaan Opini Publik	2	3	Musnah
Layanan Komunikasi Publik	2	3	Musnah
Pengolahan dan Penyediaan Informasi	0	0	-
Informasi Politik, Hukum, dan Keamanan	2	3	Musnah
Informasi Perekonomian	2	3	Musnah
Informasi Kesejahteraan Rakyat	2	3	Musnah
Pengelolaan Media Publik	0	0	-
Media Cetak	2	3	Musnah
Media Online	2	3	Musnah
Media Luar Ruang dan Audio Visual	2	3	Musnah
Kemitraan Komunikasi	0	0	-
Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara	2	3	Musnah
Kemitraan Media dan Dunia Usaha	2	3	Musnah
Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi	2	3	Musnah
Infrastruktur Informatika	0	0	-
Jaringan	2	3	Musnah
Piranti Teknologi Informatika	2	3	Musnah

Keamanan Informatika	2	3	Musnah
Sistem dan Data	0	0	-
Portal dan Konten	2	3	Musnah
Pengumpulan dan Pengolahan Data	2	3	Musnah
Pengembangan Aplikasi	2	3	Musnah
Pusat Kerjasama	0	0	-
Kerja Sama daerah	2	3	Permanen
Kerja Sama Bilateral	2	3	Permanen
Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat	0	0	-
Pelayanan Informasi	2	3	Musnah
Hubungan Masyarakat	2	3	Musnah
Bimbingan Teknis	2	3	Musnah
Evaluasi	2	3	Musnah
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	0	0	-
Kebijakan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2	3	Permanen
Pengembangan Destinasi Wisata	0	0	-
Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata	2	3	Permanen
Pengembangan Daya Tarik Wisata	2	3	Musnah
Industri Pariwisata	2	3	Permanen
Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata	2	3	Permanen
Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif, dan Event	2	3	Permanen
Pemasaran Pariwisata	0	0	-
Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata	2	3	Permanen
Promosi Pariwisata Luar Negeri	2	3	Permanen
Promosi Pariwisata Dalam Negeri	2	3	Permanen

Pencitraan Indonesia	2	3	Permanen
Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya	0	0	-
Pengembangan industri Perfilman	2	3	Permanen
Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik	2	3	Permanen
Pengembangan Seni Rupa	2	3	Permanen
Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)	0	0	-
Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media	2	3	Permanen
Desain dan Arsitektur	2	3	Permanen
Kerjasama dan Fasilitas	2	3	Permanen
Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	0	0	-
Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisata	2	3	Permanen
Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif	2	3	Permanen
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	2	3	Permanen
Kompetensi Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	2	3	Permanen
STATISTIK	0	0	-
Kebijakan di bidang Statistik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2	3	Permanen
Sensus Penduduk, Pertanian, dan Ekonomi	0	0	-
Perencanaan	2	3	Permanen
Persiapan	1	1	Musnah
Pelaksanaan Lapangan	1	1	Musnah
Pengolahan	1	1	Musnah
Analisis dan Penyajian Hasil Sensus	1	1	Musnah
Diseminasi hasil sensus	2	3	Permanen
Survei	0	0	-

Perencanaan	2	3	Permanen
Persiapan	1	1	Permanen
Pelaksanaan Lapangan	1	1	Permanen
Pengolahan	1	1	Musnah
Analisis dan Penyajian Hasil Survei	1	1	Musnah
Diseminasi hasil Survei	2	3	Permanen
Konsolidasi Data Statistik	0	0	-
Kompilasi Data	1	1	Musnah
Analisis data	1	1	Musnah
Penyusunan Publikasi	2	3	Permanen
Evaluasi dan Pelaporan Sensus, Survei, dan Konsolidasi Data Statistik	2	3	Permanen
KETENAGAKERJAAN	0	0	-
Kebijakan di bidang Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2	3	Permanen
Perencanaan Tenaga Kerja	0	0	-
Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah	2	3	Permanen
Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta	2	3	Permanen
Pengembangan Standarisasi Kompetensi	0	0	-
Penerapan Standar Kompetensi	2	3	Musnah
Pengembangan Standarisasi Kompetensi	2	3	Musnah
Pengembangan Program Pelatihan Ketenagakerjaan	2	3	Musnah
Pengembangan Program Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan	2	3	Musnah
Pengembangan Program Pelatihan Ketransmigrasian	2	3	Musnah
Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja	0	0	-
Akreditasi dan Sistem Informasi Kelembagaan	2	3	Permanen
Pengembangan Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan	2	3	Musnah

Pengembangan Standar Mutu (PSM) Lembaga Pelatihan	2	3	Musnah
Sistem Pendanaan dan Kerjasama Antar Lembaga	3	7	Permanen
Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan	0	0	-
Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah	2	3	Musnah
Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta	2	3	Musnah
Tenaga Pelatihan	2	3	Musnah
Sistem Informasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan	2	3	Musnah
Bina Pemagangan	0	0	-
Pemagangan Dalam Negeri	2	3	Musnah
Pemagangan Luar Negeri	2	3	Musnah
Perizinan dan Advokasi Pemagangan	2	3	Musnah
Promosi dan Jenjang Pemagangan	2	3	Musnah
Produktivitas dan Kewirausahaan	0	0	-
Pengembangan Promosi dan Kerjasama Produktivitas dan Kewirausahaan	2	3	Musnah
Pengembangan Sistem dan Peningkatan Produktivitas	2	3	Musnah
Pengembangan Pengukuran dan Kajian Produktivitas	2	3	Musnah
Pengembangan Kewirausahaan	2	3	Musnah
Pengembangan Pasar Kerja	0	0	-
Informasi Pasar Kerja	2	3	Musnah
Analisis Pasar Kerja	2	3	Musnah
Bursa Kerja	2	3	Musnah
Analisis Jabatan	2	3	Musnah
Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	0	0	-
Antar Kerja	2	3	Musnah
Penempatan Tenaga Kerja Khusus	2	3	Musnah

Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	2	3	Musnah
Pemberdayaan Pengantar Kerja	2	3	Musnah
Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal	0	0	-
Tenaga Kerja Mandiri dan Sektoral Informal	2	3	Musnah
Pengembangan Padat Karya	2	3	Musnah
Terapan Teknologi Tepat Guna	2	3	Musnah
Pemberdayaan Pendampingan dan Kerjasama Antar Lembaga	2	3	Musnah
Standardisasi Profesi	0	0	-
Sistem Informasi dan Registrasi	2	3	Musnah
Pembakuan Akreditasi	2	3	Musnah
Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis Diskriminasi	0	0	-
Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerjasama Bersama	2	3	Musnah
Perjanjian Kerja	2	3	Musnah
Kesejahteraan Pekerja	2	3	Musnah
Analisis Diskriminasi Syarat Kerja	2	3	Musnah
Kelembagaan dan Pemasarakatan Hubungan Industrial	0	0	-
Organisasi Pekerja dan Pengusaha	2	3	Musnah
Kelembagaan Hubungan Industrial	2	3	Musnah
Pemasarakatan Hubungan Industrial	2	3	Musnah
Pengupahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	0	0	-
Pengupahan	2	3	Musnah
Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja	2	3	Musnah
Pencegahan dan Penyelesaian Pelestarian Hubungan Industrial	0	0	-
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial	2	3	Musnah
Penyelenggaraan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	2	3	Musnah

Pemberdayaan Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	2	3	Musnah
Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	0	0	-
Pengawasan Norma Kerja	2	3	Musnah
Pengawasan Norma Hubungan Kerja dan Perlindungan Berserikat	2	3	Musnah
Pengawasan Norma Penempatan dan Latihan Tenaga Kerja	2	3	Musnah
Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak	0	0	-
Pengawasan Norma Kerja Perempuan	2	3	Musnah
Pengawasan Norma Kerja Anak	2	3	Musnah
Kerjasama Lintas Sektoral	2	3	Musnah
Advokasi Tenaga Kerja Perempuan dan Anak	2	3	Musnah
Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	0	0	-
Pengawasan Norma Mekanik, Pesawat Uap dan Bejana Tekan	2	3	Musnah
Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan, Listrik dan Penanggulangan Kebakaran	2	3	Musnah
Pengawasan Norma Kesehatan Kerja	2	3	Musnah
Pengawasan Norma Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya	2	3	Musnah
Pengawasan Norma Kelembagaan, Keahlian dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	2	3	Musnah
Laporan Hasil Pengawasan Ketenagakerjaan	2	3	Permanen
Bina Penegakan Hukum	0	0	-
Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan	2	3	Musnah
Penyidikan Norma Ketenagakerjaan	2	3	Musnah
Pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil	2	3	Musnah
Kerjasama Penegakan Hukum	2	3	Musnah
Pengkajian dan Bimbingan Teknis Pelayanan Keselamatan dan	0	0	-

Kesehatan Kerja (K3)			
Analisis dan Standardisasi bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	2	3	Permanen
Hasil kajian, perancangan dan penerapan teknologi dan alih teknologi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	2	3	Permanen
Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengkajian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	2	3	Permanen
Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	2	3	Permanen
Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kompetensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	0	0	-
Program, Analisis dan Standardisasi Pengembangan SDM dan Kompetensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	2	3	Permanen
Penyebarluasan Informasi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kompetensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	2	3	Permanen
Kerjasama Tingkat Nasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	2	3	Permanen
Kerjasama Tingkat Regional Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kompetensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	2	3	Permanen
Kerjasama Tingkat Internasional Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kompetensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	2	3	Permanen
Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengembangan SDM dan Kompetensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	2	3	Permanen
PENANAMAN MODAL	0	0	-
Kebijakan di bidang Penanaman Modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2	3	Permanen
Perencanaan Penanaman Modal	0	0	-

Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya	2	3	Musnah
Perencanaan Industri Manufaktur	2	3	Musnah
Perencanaan Jasa dan Kawasan	2	3	Musnah
Perencanaan Infrastruktur	2	3	Musnah
Pengembangan Iklim Penanaman Modal	0	0	-
Deregulasi Penanaman Modal	3	7	Permanen
Pengembangan Potensi Daerah	3	7	Permanen
Pemberdayaan Usaha	2	3	Musnah
Pemberdayaan Usaha Pembinaan dan Penyuluhan	2	3	Musnah
Pemberdayaan Usaha Kemitraan Usaha	2	3	Musnah
Pemberdayaan Usaha Pelayanan Usaha	2	3	Musnah
Promosi Penanaman Modal	0	0	-
Pengembangan Promosi	2	3	Permanen
Analisis Strategi Promosi	2	3	Permanen
Fasilitasi Promosi Luar Negeri	2	3	Permanen
Promosi Sektoral	2	3	Musnah
Fasilitasi Promosi Daerah	2	3	Musnah
Pameran dan Sarana Promosi	2	3	Musnah
Kerja Sama Penanaman Modal	0	0	-
Kerja Sama Bilateral dan Multilateral	2	3	Permanen
Kerja Sama Regional	2	3	Permanen
Kerja Sama Dunia Usaha Internasional	2	3	Permanen
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	0	0	-
Pemantauan Penanaman Modal	2	3	Musnah
Data Realisasi Penanaman Modal	2	3	Musnah
Bimbingan Sosialisasi Ketentuan Penanaman Modal	2	3	Musnah

Fasilitasi Penyelesaian Masalah	2	3	Musnah
Pengawasan Penanaman Modal	2	3	Musnah
Pencabutan/Pembatalan Perizinan Penanaman Modal	2	3	Musnah
Pelayanan Penanaman Modal	0	0	-
Pelayanan Aplikasi	2	3	Permanen
Pelayanan Perijinan	2	3	Permanen
Pelayanan Konsultasi Perijinan	2	3	Permanen
Pelayanan Non Perijinan	2	3	Permanen
Pelayanan Fasilitas	2	3	Permanen
PERTANAHAN	0	0	-
Kebijakan di bidang Pertanahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2	3	Permanen
Pengadaan dan Penataan Administrasi Pertanahan	0	0	-
Fasilitasi Pengadaan Tanah	2	3	Permanen
Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan	2	3	Permanen
Data dan Informasi Pertanahan	2	3	Permanen
Advokasi dan Pengendalian	2	3	Permanen
Penatagunaan dan Penguatan Hak Atas Tanah	0	0	-
Penatagunaan Tanah	2	3	Musnah
Data dan Pemetaan Tematik	2	3	Permanen
Penguatan Atas Tanah	2	3	Permanen
Sengketa Tanah	0	0	-
Pengkajian dan Penanganan Sengketa	2	3	Permanen
Advokasi dan Pengendalian	2	3	Permanen
TRANSMIGRASI	0	0	-
Kebijakan di bidang Transmigrasi yang dilakukan oleh Pemerintah	2	3	Permanen

Daerah			
Penyediaan Tanah Transmigrasi	0	0	-
Fasilitasi Pengadaan Tanah	2	3	Permanen
Pengurusan Legalitas Tanah	2	3	Permanen
Dokumentasi Pertanahan	2	3	Permanen
Advokasi Pertanahan	2	3	Permanen
Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi	0	0	-
Penyiapan Lahan	2	3	Permanen
Penyiapan Sarana	2	3	Permanen
Penyiapan Prasarana	2	3	Permanen
Evaluasi Kelayakan Permukiman	2	3	Permanen
Fasilitasi Penempatan Transmigrasi	0	0	-
Penyiapan Calon Transmigrasi	2	3	Permanen
Penyiapan Perpindahan	2	3	Permanen
Pelaksanaan Perpindahan	2	3	Permanen
Penataan dan Adaptasi	2	3	Permanen
Partisipasi Masyarakat	0	0	-
Promosi dan Motivasi	2	3	Musnah
Kerjasama Kelembagaan	2	3	Permanen
Kerjasama Antar Daerah	2	3	Permanen
Pelayanan Investasi	2	3	Permanen
Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	0	0	-
Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan	2	3	Permanen
Bina Sistem Informasi	2	3	Permanen
Perencanaan Pengembangan Kawasan	2	3	Musnah
Perencanaan Pengembangan Masyarakat	2	3	Musnah

Perencanaan Pengembangan Pusat Pertumbuhan	2	3	Permanen
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat	0	0	-
Bantuan Pangan dan Kesehatan	2	3	Musnah
Fasilitas Sosial Budaya	2	3	Musnah
Pengembangan Kelembagaan	2	3	Permanen
Bina Pendampingan Masyarakat Transmigrasi	2	3	Musnah
Pengembangan Usaha	0	0	-
Kewirausahaan	2	3	Musnah
Produksi	2	3	Musnah
Pengolahan Hasil dan Pemasaran	2	3	Musnah
Lembaga Ekonomi dan permodalan	2	3	Musnah
Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan	0	0	-
Analisis dan Standarisasi Sarana dan Prasarana	2	3	Musnah
Pengembangan Sarana	2	3	Musnah
Pengembangan Prasarana	2	3	Musnah
Evaluasi Pengembangan Sarana dan Prasarana	2	3	Permanen
Penyerasian Lingkungan	0	0	-
Persiapan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	2	3	Musnah
Adaptasi dan Mitigasi Lingkungan	2	3	Musnah
Evaluasi Perkembangan Permukiman Transmigrasi	2	3	Permanen
Evaluasi Perkembangan Pusat Pertumbuhan	2	3	Permanen
PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN	0	0	-
PEKERJAAN UMUM	0	0	-
Kebijakan di bidang Pekerjaan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2	3	Permanen
Penatagunaan Sumber Daya Air	0	0	-

Perencanaan Wilayah Sungai	2	3	Permanen
Kelembagaan	1	1	Musnah
Pemanfaatan Sumber Daya Air	2	3	Permanen
Hidrologi dan Lingkungan Sumber Daya Air	2	3	Permanen
Pengaturan dan Pemantauan	1	1	Musnah
Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air	0	0	-
Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air	2	3	Permanen
Manajemen Mutu	2	3	Musnah
Informasi dan Data Sumber Daya Air	2	3	Musnah
Keterpaduan Pemrograman	2	3	Permanen
Pengelolaan Sumber Daya Air	0	0	-
Pengelolaan Sungai dan Pantai	2	3	Musnah
Pengelolaan Irigasi dan Rawa	2	3	Musnah
Pengelolaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung	2	3	Musnah
Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku	2	3	Musnah
Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	0	0	-
Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai	2	3	Musnah
Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa	2	3	Musnah
Operasi dan Pemeliharaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung	2	3	Musnah
Operasi dan Pemeliharaan Air Tanah dan Air Baku	2	3	Musnah
Operasi dan Pemeliharaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo	2	3	Musnah
Pengendalian Lumpur Sidoarjo (Bencana Lokal Lingkup Nasional)	0	0	-
Perencanaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo	2	3	Permanen
Pemrograman Pengendalian Lumpur Sidoarjo	2	3	Permanen
Pelaksanaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo	2	3	Permanen
Pengendalian Dampak Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan akibat	2	3	Permanen

Lumpur Sidoarjo			
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	2	3	Permanen
Pengembangan Jaringan Jalan	0	0	-
Keterpaduan Perencanaan	2	3	Permanen
Sistem Jaringan Jalan	2	3	Permanen
Lingkungan dan Keselamatan Jalan	2	3	Musnah
Pembangunan Jalan	0	0	-
Standar dan Pedoman	2	3	Permanen
Manajemen Konstruksi	2	3	Permanen
Pengelolaan Gedometri, Perkerasan, dan Drainage	2	3	Musnah
Pengelolaan Geoteknik dan Manajemen Lereng	2	3	Musnah
Preservasi Jalan	0	0	-
Standar dan Pedoman	2	3	Permanen
Perencanaan Teknis	2	3	Permanen
Teknik Rekonstruksi	2	3	Musnah
Teknik Pemeliharaan Jalan	2	3	Musnah
Pengelolaan Jembatan	0	0	-
Standar dan Pedoman	2	3	Permanen
Perencanaan Teknis	2	3	Permanen
Teknik Jembatan	2	3	Musnah
Teknik Terowongan dan Jembatan Khusus	2	3	Permanen
Pengelolaan Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitas Jalan Daerah	0	0	-
Bimbingan Teknik Jalan Daerah	2	3	Musnah
Pengembangan Jalan Metropolitan dan Kota Besar	2	3	Musnah
Pembinaan Teknik Jalan Bebas Hambatan	2	3	Musnah

Pengaturan Jalan Tol	0	0	-
Persiapan pengusaha jalan tol	2	3	Musnah
Pengadaan Investasi Jalan Tol	2	8	Permanen
Teknik Pengaturan Jalan Tol	2	3	Musnah
Pengambilalihan hak pengusaha jalan tol	2	8	Permanen
Keterpaduan Infrastruktur Permukiman	0	0	-
Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan	2	3	Permanen
Keterpaduan Pembiayaan dan Pelaksanaan	2	3	Musnah
Pengembangan Kawasan Permukiman	0	0	-
Perencanaan Teknis	2	3	Permanen
Kawasan Permukiman Perkotaan	2	3	Musnah
Kawasan Permukiman Pedesaan	2	3	Musnah
Kawasan Permukiman Khusus	2	3	Musnah
Kelembagaan	2	3	Musnah
Pembinaan Penataan Bangunan	0	0	-
Perencanaan Teknis	2	3	Permanen
Penataan Bangunan Gedung	2	3	Musnah
Pengelolaan Rumah Negara	2	3	Musnah
Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus	2	3	Musnah
Kelembagaan	2	3	Musnah
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	0	0	-
Perencanaan Teknis	2	3	Permanen
Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan	2	3	Musnah
Sistem Penyediaan Air Minum Pedesaan	2	3	Musnah
Sistem Penyediaan Air Minum Khusus	2	3	Musnah
Kelembagaan	2	3	Musnah

Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum	2	3	Musnah
Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja	2	3	Musnah
Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman	0	0	-
Perencanaan Teknis	2	3	Permanen
Pengelolaan Air Limbah	2	3	Musnah
Pengelolaan Persampahan	2	3	Musnah
Penyehatan Lingkungan Permukiman Khusus	2	3	Musnah
Kelembagaan	2	3	Musnah
Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja	2	3	Musnah
Pemantauan dan Evaluasi	2	3	Permanen
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	0	0	-
Kebijakan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2	3	Permanen
Perencanaan Pembiayaan Perumahan	0	0	-
Keterpaduan Perencanaan	2	3	Musnah
Strategi Pembiayaan dan Analisa Pasar Perumahan	2	3	Permanen
Kemitraan	2	3	Permanen
Pola Pembiayaan Perumahan	0	0	-
Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Umum	2	3	Permanen
Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Swadaya dan Mikro Perumahan	2	3	Permanen
Pola Investasi Perumahan	2	3	Permanen
Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan	0	0	-
Sumber Pembiayaan Primer	2	3	Permanen
Sumber Pembiayaan Sekunder	2	3	Permanen
Sumber Tabungan Perumahan dan Pembiayaan Lainnya	2	3	Permanen
Sistem Pembiayaan Perumahan	2	3	Permanen

Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan	2	3	Permanen
Perencanaan Penyediaan Perumahan	0	0	-
Keterpaduan Perencanaan	2	3	Permanen
Analisa Teknik	2	3	Permanen
Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian	2	3	Permanen
Kemitraan dan Kelembagaan	2	3	Permanen
Penyediaan Rumah Susun	0	0	-
Perencanaan Teknik	2	3	Permanen
Penyediaan	2	3	Permanen
Penghunian, Pengalihan, dan Pemanfaatan	2	3	Permanen
Pengelolaan	2	3	Permanen
Penyediaan Rumah Khusus	0	0	-
Perencanaan Teknik	2	3	Permanen
Penyediaan dan Pengelolaan Rumah Tapak Khusus	2	3	Permanen
Bimbingan teknis dan supervisi	1	1	Musnah
Penyelenggaraan Bantuan Rumah Swadaya	2	3	Permanen
Perencanaan Teknik	2	3	Permanen
Fasilitas Backlog Rumah Swadaya dan Rumah Tidak Layak Huni	2	3	Permanen
Pelaksanaan Bantuan Simultan	2	8	Musnah
Penyediaan Rumah Umum dan Komersial	0	0	-
Perencanaan Teknik	2	3	Musnah
Pemberian Bantuan Rumah Umum	2	3	Permanen
Fasilitas Hunian Berimbang	2	3	Permanen
Fasilitas Penyediaan Lahan Perumahan	2	3	Permanen
Investasi Infrastruktur	0	0	-
Pelaksanaan Kebijakan Investasi Infrastruktur	1	1	Musnah

Sinkronisasi Investasi Infrastruktur	2	3	Musnah
Fasilitasi dan Mitigasi Risiko Investasi Infrastruktur	2	3	Musnah
Pasar Infrastruktur	1	1	Musnah
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	0	0	-
Sistem Penyelenggaraan	2	3	Musnah
Kontrak Konstruksi	2	3	Musnah
Konstruksi Berkelanjutan	2	3	Musnah
Manajemen Mutu	2	3	Musnah
Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi	0	0	-
Kelembagaan	1	1	Musnah
Material dan Peralatan Konstruksi	1	1	Musnah
Teknologi Konstruksi dan Produksi Dalam Negeri	1	1	Musnah
Usaha Jasa Konstruksi	1	1	Musnah
Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	0	0	-
Standar dan Materi Kompetensi	2	3	Musnah
Penerapan Kompetensi	2	3	Musnah
Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi	2	3	Permanen
Pengembangan Produktivitas	2	3	Musnah
Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	0	0	-
Peningkatan Kerjasama	2	3	Musnah
Pemberdayaan Jasa Konstruksi	2	3	Musnah
Peningkatan Jasa Konstruksi	0	0	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Kerja	2	3	Musnah
Pelaksanaan Pengendalian Mutu	2	3	Permanen
Penerapan Teknologi Konstruksi	0	0	-
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Kerjasama Penerapan Teknologi	2	3	Permanen

Konstruksi			
Pengembangan Materi	2	3	Musnah
Pendayagunaan Material dan Peralatan Konstruksi	2	3	Musnah
Rencana Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Perumahan Rakyat (PUPR)	0	0	-
Antar Sektor	2	3	Permanen
Antar Wilayah	2	3	Permanen
Pengembangan Kawasan Strategis	0	0	-
Keterpaduan Infrastruktur Kawasan Strategis	2	3	Permanen
Pengembangan Infrastruktur Antarkawasan Strategis	2	3	Musnah
Pengembangan Kawasan Perkotaan	0	0	-
Pengembangan Infrastruktur Kawasan Metropolitan	2	3	Permanen
Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Besar dan Kota Baru	2	3	Permanen
Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Kecil dan Pedesaan	2	3	Permanen
Analisa Manfaat dan Skema Pembiayaan	2	3	Permanen
Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan Rakyat (PUPR)	2	3	Permanen
Pemantauan dan Evaluasi	2	3	Musnah
TATA RUANG (TATA KOTA)	0	0	-
Kebijakan di bidang Tata Ruang yang dilakukan Pemerintahan Daerah	2	3	Permanen
Perencanaan	0	0	-
Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RT/RW)	1	1	permanen
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	1	1	permanen
Rencana Tata Ruang Strategis Kabupaten	1	1	permanen
Rencana Tata Bangun Lingkungan (RTBL)	1	1	permanen
Rencana Pengembangan Sistem Sarana dan Prasarana Kabupaten	1	1	permanen

Rencana Teknis Prasarana Kota	1	1	permanen
Rencana Tekni Rencana Peremajaan dan Pengembangan Kotas Prasarana Kota	1	1	permanen
Pemanfaatan dan Pengendalian	0	0	-
Evaluasi dan Pengawasan Penata Ruang	2	3	permanen
Ijin Pemanfaatan Ruang	2	3	permanen
Pembatalan Ijin Pemanfaatan Ruang	2	3	permanen
Pemetaan	0	0	-
Peta Dasar	1	1	Permanen
Survey Pemetaan Ruang Darat	1	1	Musnah
Survey Pemetaan Ruang Air	1	1	Musnah
Survey Pemetaan Ruang Udara	1	1	Musnah
LINGKUNGAN HIDUP	0	0	-
Kebijakan di bidang Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2	3	Permanen
Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	0	0	-
Inventarisasi, Penerapan ekoregion, dan rencana perlindungan dan pengelolaan Lingkungan	2	3	Permanen
Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam	2	3	Permanen
Penerapan Kebijakan Wilayah dan Sektor	0	0	-
Evaluasi Penerapan	2	3	Permanen
Perencanaan Lingkungan Hidup	2	3	Musnah
Ekonomi Lingkungan	2	3	Musnah
Dampak Lingkungan	0	0	-
Bimtek Dampak Lingkungan	2	3	Musnah
Penerapan sistem kebijakan Dampak lingkungan	3	7	Permanen

Evaluasi dan Tindak Lanjut	3	7	Permanen
Pemantauan dan Pengawasan	0	0	-
Manufaktur Prasarana dan Jasa	3	7	Permanen
Pertambangan Energi, Minyak dan Gas	3	7	Permanen
Agro Industri dan Usaha Skala Kecil	3	7	Permanen
Udara Sumber Bergerak	3	7	Permanen
Evaluasi dan Pengembangan	0	0	-
Manufaktur, Prasarana dan Jasa	2	3	Musnah
Pertambangan Energi, Minyak dan Gas	2	3	Musnah
Agro Industri dan Usaha Skala Kecil	2	3	Musnah
Udara Sumber Bergerak	2	3	Musnah
Keanekaragaman Hayati dan pengendalian Kerusakan Lahan	0	0	-
Pengembangan	2	3	Permanen
Pemanfaatan	2	3	Permanen
Pengelolaan Sumber Daya Genetik	2	3	Permanen
Keamanan Hayati	2	3	Permanen
Pengendalian kerusakan Lahan	2	3	Permanen
Kerusakan Ekosistem Perairan Darat	0	0	-
Kerusakan Ekosistem	2	3	Permanen
Rawa	2	3	Permanen
Mitigasi dan pelestarian Fungsi Atmosfer	0	0	-
Perangkat mitigasi	2	3	Permanen
Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca	1	1	Musnah
Pengendalian Bahan Perusak Ozon	2	3	Permanen
Pengendalian Kerusakan Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan	2	3	Permanen
Adaptasi Perubahan Iklim	0	0	-

Perangkat Adaptasi Perubahan Iklim	2	3	Permanen
Kerentanan Perubahan Iklim	2	3	Permanen
Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun	0	0	-
Registrasi dan Notifikasi	1	1	Permanen
Pemantauan Bahan Berbahaya dan Beracun	2	3	Permanen
Evaluasi dan Tindak Lanjut	1	1	Permanen
Verifikasi Pengelolaan Limbah bahan Berbahaya dan beracun	0	0	-
Pengumpulan dan pemanfaatan	2	3	Permanen
Pengangkutan dan Pengolahan	2	3	Permanen
Penimbunan dan Dumping	2	3	Permanen
Notifikasi dan Rekomendasi Limbah Lintas batas	2	3	Permanen
Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3	0	0	-
Pemantauan	1	1	Musnah
Tanggap darurat dan pemelihan Kontaminasi	2	3	Permanen
Pengelolaan Sampah	0	0	-
Pembatasan sampah	1	1	Permanen
Daur Ulang dan Pemanfaatan Sampah	1	1	Permanen
Pembentukan Dewan Adipura	1	1	Permanen
Penetapan pemenang adipura	1	1	Permanen
Hukum Administrasi Lingkungan	0	0	-
Pengelolaan dan pengembangan pengaduan	1	1	Musnah
Penataan hukum administrasi lingkungan	2	3	Permanen
Penyelesaian Sengketa Lingkungan	0	0	-
Penyelesaian sengketa Melalui Pengadilan	2	3	Permanen
Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan	2	3	Permanen
Penegakan hukum pidana lingkungan	0	0	-

Penyidikan	3	7	Permanen
Koordinasi penuntutan, evaluasi, dan tindak lanjut	3	7	Permanen
Koordinasi pembinaan penyidik PNS	3	7	Musnah
Komunikasi Lingkungan	0	0	-
Pengembangan Komunikasi	2	3	Musnah
Publikasi dan Kampanye	2	3	Musnah
Penguatan Inisiatif Masyarakat	0	0	-
Komunitas Pendidikan Lingkungan	2	3	Musnah
Kearifan Lingkungan	2	3	Musnah
Peningkatan Peran Masyarakat	0	0	-
Masyarakat Perkotaan	2	3	Musnah
Masyarakat Pedesaan	2	3	Musnah
Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan	0	0	-
Organisasi Sosial Masyarakat	2	3	Musnah
Organisasi Profesi Dunia Usaha	2	3	Musnah
Data dan Informasi Lingkungan	0	0	-
Pengelolaan Data	2	3	Permanen
Pengelolaan Informasi	2	3	Permanen
Pengembangan Perangkat Lunak	2	3	Permanen
Pengembangan Sistem dan Layanan Jaringan	2	3	Permanen
Kelembagaan Lingkungan	0	0	-
Kelembagaan dan Tata Laksana	2	3	Permanen
Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal	2	3	Permanen
Standarisasi dan teknologi	0	0	-
Standarisasi Manajemen dan dan Pengujian Lingkungan	2	3	Permanen
Standarisasi Kompetensi Keahlian dan Lembaga Penyedia Jasa	2	3	Permanen

Lingkungan			
Teknologi Ramah Lingkungan	2	3	Permanen
Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan	0	0	-
Pemantauan dan Kajian Kualitas Lingkungan	2	3	Permanen
Laboratorium Rujukan dan Pengujian	2	3	Permanen
PENGAWASAN	0	0	-
PENGAWASAN INTERNAL	0	0	-
Rencana Pengawasan	0	0	-
Rencana Strategis Pengawasan	3	7	Permanen
Rencana Kerja Pengawas Tahunan	2	3	Musnah
Rencana Kinerja Tahunan	2	3	Musnah
Rencana dan Penetapan Kinerja Tahunan	2	3	Musnah
Rakor Pengawasan Tingkat Daerah	2	3	Musnah
Pelaksanaan Pengawasan	0	0	-
Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang memerlukan tindak lanjut (TL)	2	3	Permanen
Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut	2	3	Musnah
Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan tidak memerlukan tindak lanjut	2	3	Permanen
Laporan Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat	2	3	Permanen
Laporan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan	2	3	Permanen
Laporan Perkembangan Barang Milik Negara	2	3	Permanen
Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi	2	3	Permanen

Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Review	2	3	Permanen
Good Corporate Governance (GCG)	2	3	Permanen
KEPEGAWAIAN	0	0	-
SUMBER DAYA MANUSIA	0	0	-
Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara	0	0	-
Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN)	2	3	Musnah
Perencanaan Pertimbangan Formasi	2	3	Musnah
Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara	2	3	Musnah
Standarisasi Jabatan	2	3	Permanen
Formasi dan Pengadaan Pegawai	0	0	-
Formasi Aparatur Sipil Negara (ASN)	2	3	Musnah
Proses Rekrutmen/Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN)	2	3	Musnah
Pengumuman Kelulusan Aparatur Sipil Negara (ASN)	1	1	Musnah
Berkas Lamaran Yang Tidak Diterima	1	1	Musnah
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1	1	Musnah
Open Bidding (Seleksi Terbuka Jabatan)	2	3	Musnah
Pengelolaan Sistem Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS)	2	3	Musnah
Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1	1	Musnah
Mutasi Pegawai	0	0	-
Usulan Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi antar Perwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara, Persetujuan/Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN)	1	1	Musnah
Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan	1	1	Musnah
Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Struktural/Fungsional	1	1	Musnah

Perubahan Data Dasar/ Status/Kedudukan Hukum Pegawai	1	1	Musnah
Peninjauan Masa Kerja	1	1	Musnah
Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (BAPERJAKAT)	2	3	Musnah
Pengembangan Karir	0	0	-
Usulan Tugas Belajar/ Ijin Belajar/ Diklat/ Kursus/ Magang/ Ujian Dinas/ Praktek Kerja di Instansi lain/ Pertukaran antar ASN dengan pegawai swasta	1	1	Musnah
Penyesuaian ijazah	1	1	Musnah
Penyusunan Sistem Karier	2	3	Musnah
Standar Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja	1	1	Musnah
Angka Kredit	1	1	Musnah
Kinerja Aparatur Sipil Negara	0	0	-
Hasil Penilaian Kinerja dan Standar Kerja	2	3	Musnah
Pengelolaan <i>Database</i> dan Analisis Sistem Informasi Kinerja	2	3	Permanen
Evaluasi dan Pemantauan Penilaian Kinerja dan Standar Kinerja	2	3	Musnah
Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS)	0	0	-
Kode Etik Pegawai	2	3	Permanen
Disiplin	2	3	Musnah
Pemberhentian Dengan Hormat	2	3	Musnah
Pemberhentian Dengan Tidak Hormat	2	3	Musnah
Pemberhentian Sementara	2	3	Musnah
Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1	1	Musnah
Bantuan Hukum	2	3	Musnah
Status dan Kedudukan Pegawai	0	0	-
Status Kepegawaian	2	3	Musnah

Kedudukan Kepegawaian	2	3	Musnah
Keberatan Pegawai	2	3	Musnah
Perselisihan/Sengketa Kepegawaian	2	3	Musnah
Sistem Informasi Kepegawaian	0	0	-
Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian	2	3	Musnah
Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian	2	3	Musnah
Pengembangan Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Elektronik	1	1	Permanen
Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Fisik	1	1	Musnah
Pengawasan dan pengendalian	0	0	-
Formasi, Pengadaan dan Pasca Diklat	2	3	Musnah
Kepangkatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dalam Jabatan	2	3	Musnah
Gaji dan Tunjangan, Kesejahteraan dan Kinerja	2	3	Musnah
Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN	2	3	Musnah
Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian	2	3	Musnah
Sanggahan terhadap Permasalahan Tenaga Honorer	2	3	Musnah
Administrasi Pegawai	0	0	-
Surat Perintah Dinas/Surat Tugas	1	1	Musnah
Cuti Sakit	1	1	Musnah
Cuti Bersalin	1	1	Musnah
Cuti Tahunan	1	1	Musnah
Cuti Alasan Penting	1	1	Musnah
Cuti Besar	1	1	Musnah
Cuti Di luar Tanggungan Negara	1	1	Musnah
Karpeg/KPE/Karis/Karsu	1	1	Musnah
Keanggotaan Organisasi Profesi/ Kedinasan	1	1	Musnah
Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)	1	1	Musnah

Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)	1	1	Musnah
Daftar Urut Kepangkatan (DUK)	1	1	Musnah
Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala, Mutasi Gaji/ tunjangan	1	1	Musnah
Kesejahteraan Pegawai	0	0	-
Pemeliharaan Kesehatan Pegawai	1	1	Musnah
Asuransi Pegawai/BPJS	1	1	Musnah
Tabungan Perumahan	1	1	Musnah
Bantuan Sosial	1	1	Musnah
Pakaian Dinas	1	1	Musnah
Layanan Pegawai yang Meninggal Karena Dinas	1	1	Musnah
Pemberian Tali Kasih	1	1	Musnah
Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa	1	1	Musnah
Olahraga dan Rekreasi	1	1	Musnah
Rekam Medis	1	1	Musnah
Administrasi Perseorangan	0	0	-
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	3	7	Musnah
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	3	7	Musnah
Pejabat Negara dan pejabat lainnya yang disetarakan	1	1	Permanen
Sekretaris Daerah	1	1	Permanen
Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjasa/terlibat dalam peristiwa berskala nasional	1	1	Permanen
Penilaian Kompetensi	0	0	-
Penilaian Kompetensi	2	3	Musnah
Hasil Penilaian Kompetensi	2	3	Musnah
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	0	0	-
Kebijakan di bidang Pendidikan dan Pelatihan yang dilakukan oleh	2	3	Permanen

Pemerintah daerah			
Pendidikan dan Pelatihan	0	0	-
Sistem Informasi program dan pembinaan diklat	2	3	Permanen
Pedoman-pedoman kediklatan	2	3	Permanen
Kurikulum-kurikulum diklat	1	1	Musnah
Modul-modul diklat	1	1	Musnah
Panduan fasilitator	1	1	Musnah
Saran/rekomendasi penyelenggaraan diklat	2	3	Permanen
Notulen sosialisasi/Rapat Koordinasi Kebijakan Diklat	1	1	Musnah
Monitoring dan evaluasi program dan pembinaan diklat	2	3	Permanen
Konsultasi, advokasi, asistensi diklat	2	3	Permanen
Widyaiswara	0	0	-
Seleksi dan pengembangan Widyaiswara	1	1	Musnah
Sertifikasi Widyaiswara	2	3	Musnah
Monitoring dan evaluasi Widyaiswara	2	3	Permanen
Penilaian Widyaiswara	1	1	Musnah
Konsultasi, advokasi dan asistensi Widyaiswara	1	1	Musnah
Sistem Informasi Pembinaan Widyaiswara	2	3	Permanen
Penyelenggaraan Diklat	0	0	-
Perencanaan; peserta, pengajar, penjadwalan Penyelenggaraan Diklat	1	1	Musnah
Penyelenggaraan Penyelenggaraan Diklat	1	1	Musnah
Konsultasi, advokasi, asistensi penyelenggaraan diklat	1	1	Musnah
Pengembangan bahan ajar dan metodologi pembelajaran	2	3	Musnah
Sistem informasi diklat	2	3	Permanen
Monitoring Penyelenggara Diklat	2	3	Permanen
Monitoring dan evaluasi Pasca diklat	2	3	Permanen

Alumni	2	3	Permanen
KEUANGAN	0	0	-
KEUANGAN DAERAH	0	0	-
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan(APBD-P)	0	0	-
Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA)	2	3	Permanen
Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD)	2	3	Permanen
Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan	2	3	Permanen
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P)	2	3	Permanen
Penyusunan Anggaran	0	0	-
Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) kecamatan	2	3	Permanen
Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota	2	3	Permanen
Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah	2	3	Permanen
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	2	3	Permanen
Pelaksanaan Anggaran	0	0	-
Surat Penyedia Dana Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)): Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambah Uang (TU), Langsung (LS)	2	3	Musnah
Pendapatan	2	3	Musnah
Belanja	2	3	Musnah
Pembiayaan Daerah	2	3	Musnah

Dokumen Penatausahaan Keuangan	2	3	Musnah
Pertanggungjawaban Penggunaan Dana	2	3	Musnah
Daftar Gaji	2	3	Musnah
Kartu Gaji	1	1	Musnah
Data Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD)	2	3	Musnah
Laporan Keuangan	2	3	Musnah
Pinjaman/Hibah Luar Negeri	0	0	-
Permohonan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (<i>Blue Book</i>)	1	3	Permanen
Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (<i>Green Book</i>)	1	3	Permanen
Dokumen <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU), dan dokumen sejenisnya	1	3	Permanen
Dokumen <i>Loan Agreement</i> Pinjaman atau Hibah Luar Negeri (PHLN) Antara lain: <i>Draft Agreement</i> , <i>Legal Opinion</i> , Surat menyurat dengan Lender	2	3	Permanen
Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri	2	3	Permanen
Aplikasi Penarikan Dana BLN berikut lampirannya	2	3	Permanen
Dokumen Otorisasi Penarikan Dana (<i>Payment Advice</i>)	2	3	Musnah
Dokumen Realisasi Pencairan Dana Bantuan Luar Negeri	2	3	Musnah
<i>Replenishment</i> (Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor)	2	3	Permanen
Staff Appraisal Report	2	3	Permanen
<i>Report</i> /Laporan	2	3	Permanen
Laporan Hutang Daerah	2	3	Permanen
<i>Completion Report/ Annual Report</i>	2	3	Permanen
Ketentuan/Peraturan yang menyangkut Pinjaman/Hibah Luar Negeri	1	1	Permanen
Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)	1	1	Permanen

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)	0	0	-
Manual Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)	1	1	Permanen
Dokumen Kebijakan Akuntansi	1	1	Permanen
Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi	2	3	Musnah
Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Bulanan/Triwulanan/Semesteran	2	3	Musnah
Penyaluran Anggaran Tugas Pembantuan	0	0	-
Surat Penetapan Pemimpin Proyek/Bagian Proyek, Bendahara, atas Penggunaan Anggaran Kegiatan Pembantuan, termasuk Specimen Tanda Tangan	2	3	Musnah
Berkas Permintaan Pembayaran (SPP) dan lampirannya	2	3	Musnah
Buku Rekening Bank	2	3	Musnah
Keputusan Pembukuan Rekening	1	1	Permanen
Pembukuan anggaran	3	7	Musnah
Penerimaan Anggaran Tugas Pembantuan	0	0	-
Berkas Penerimaan Keuangan Pelaksanaan dan Tugas Pembantuan termasuk Dana Sisa atau Pengeluaran lainnya	2	3	Musnah
Berkas Penerimaan Pajak termasuk PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPn dan Denda Keterlambatan Menyelesaikan Pekerjaan	2	3	Musnah
Penyusunan Anggaran Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) dan Biaya Bantuan Pemilu Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	2	3	Musnah
Pelaksanaan Anggaran Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) dan Anggaran Biaya Bantuan Pemilu	0	0	-
Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Bendahara Panwasda dan Bendahara pada Panitia Pilkada dan Pemilu	2	3	Musnah
Berkas Penerimaan Komisi, Rabat Pembayaran Pengadaan Jasa,	2	3	Musnah

Bunga, Pelaksanaan Pilkada/Pemilu			
Berkas setor sisa dana Pilkada/Pemilu termasuk setor komisi pengadaan barang/jasa, rabat, bunga, jasa giro Berkas Penyaluran Biaya Pemilu termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank	2	3	Musnah
Pedoman Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu termasuk Perubahan/Pergeseran/Revisinya	2	3	Musnah
Pemeriksaan/Pengawasan Keuangan Daerah	0	0	-
Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan	2	3	Permanen
Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal	2	3	Permanen
Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional	2	3	Permanen
Dokumen Penyelesaian Kerugian Daerah	2	3	Dinilai kembali
Anggaran Daerah	0	0	-
Anggaran Daerah	3	7	Musnah
Dukungan Teknis Anggaran Daerah	3	7	Musnah
Pendapatan dan Investasi Daerah	0	0	-
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	3	7	Musnah
Badan Usaha Milik Daerah	3	7	Musnah
Badan Layanan Umum Daerah	3	7	Musnah
Pengelolaan Kekayaan Daerah	3	7	Musnah
Pinjam Dan Obligasi Daerah	3	7	Musnah
Fasilitasi Dana Perimbangan	0	0	-
Fasilitasi Dana Alokasi Umum	3	7	Musnah
Fasilitasi Dana Alokasi Khusus	3	7	Musnah
Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam	3	7	Musnah
Dana Otonomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya	3	7	Musnah

Dukungan Teknis Fasilitasi Dana Perimbangan	3	7	Musnah
Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	0	0	-
Akuntansi Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	3	7	Musnah
Pembinaan Kinerja dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	3	7	Musnah
Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah	1	2	Musnah
Kajian Kebijakan dan Bantuan Keterangan Ahli	2	3	Musnah
Data Informasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah Antara lain: Penyiapan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan keuangan daerah, penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, pengelolaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.	2	3	Permanen

SALINAN

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

AGUS ISTIQLAL

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

**KABUPATEN PESISIR BARAT
BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,**

SETDA
CHRISTIAN, S.H.,M.H.
NP. 19860425 200912 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR : 12 TAHUN 2024
TENTANG : JADWAL RETENSI ARSIP DAN
PENYUSUATN ARSIP DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PESISIR BARAT
KABUPATEN PESISIR BARAT

DAFTAR ARSIP INAKTIF YANG DIPINDAHKAN

NO	KODE KLASIFIKAS I ARSIP	JENIS/ SERIES ARSIP	TAHUN	JUMLAH	TINGKAT PERKEMBANGAN	NO. BOKS	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

SALINAN

Yang memindahkan

(Unit Kerja)
Nama Jabatan
Ttd
Nama terang
NIP

Yang menerima

(Unit Kearsipan)
Nama Jabatan
Ttd
Nama terang
NIP

Petunjuk Pengisian :

1. Nomor : Berisi nomor urut jenis arsip
2. Kode Klasifikasi Arsip : Berisi tanda pengenal arsip yang dapat membedakan antara masalah yang satu dengan masalah yang lain
3. Jenis/Series Arsip : Berisi jenis/series arsip
4. Tahun : Berisi tahun terciptanya arsip
5. Jumlah : Berisi jumlah arsip dalam setiap jenis arsip (eksemplar/folder/ boks).
6. Tingkat Perkembangan : Berisi tingkat perkembangan arsip (asli/copy/tembusan). Bila terdiri dari beberapa tingkat perkembangan dicantumkan seluruhnya
7. Nomor Boks : Berisi nomor yang memuat lokasi pada boks berapa jenis arsip disimpan
8. Keterangan : Berisi kekhususan arsip (kertas rapuh/berkas tidak lengkap/lampiran tidak ada)

SALINAN

1. Berita Acara Pemindahan Arsip sekurang-kurangnya memuat waktu pelaksanaan, tempat, jenis arsip yang dipindahkan, jumlah arsip, pelaksana dan penandatanganan oleh pimpinan Unit Pengolah dan/atau Unit Kearsipan.

Contoh:

BERITA ACARA PEMINDAHAN ARSIP	
Nomor :.....	
<p>Pada hari initanggal.....bulan.....tahun..... yang bertanda tangan dibawah ini, berdasarkan Jadwal Retensi Arsip dan berdasarkan penilaian kembali arsip telah melaksanakan pemindahan arsip..... sebanyak..... tercantum dalam Daftar Arsip yang Dipindahkan sebagaimana terlampir.</p> <p>Berita acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan PARA PIHAK menerima satu rangkap yang mempunyai kekuatan hukum sama.</p>	
PIHAK YANG MEMINDAHKAN	Dibuat di ..(tempat),(tanggal)..
Jabatan*)	PIHAK YANG MENERIMA
ttd	Jabatan*)
Nama tanpa gelar**)	ttd
NIP	Nama tanpa gelar**)
	NIP

DAFTAR ARSIP USUL MUSNAH

NO	JENIS ARSIP	TAHUN	JUMLAH	TINGKAT PERKEMBANGAN	KETERANGAN

SALINAN

Keterangan :

- Nomor : berisi nomor urut
- Jenis/Series Arsip : berisi jenis/series arsip
- Tahun : berisi tahun pembuatan arsip
- Jumlah : berisi jumlah arsip
- Tingkat Perkembangan : berisi tingkatan keaslian arsip (asli, copy, atau salinan)
- Keterangan : berisi informasi tentang kondisi arsip (misalnya rusak/tidak lengkap/berbahasa asing/daerah).

SURAT PERTIMBANGAN PANITIA
PENILAI ARSIP

Berkenaan dengan permohonan persetujuan pemusnahan arsip di.....(*Nama BUMN/ BUMD*)..... berdasarkan..... Surat.....(*Pejabat.....Pengirim.....Surat*).....Nomor:..... tanggal...., dalam hal ini telah dilakukan penilaian dari tanggal.....s/d....., terhadap daftar arsip yang diusulkan musnah dengan menghasilkan pertimbangan:

- a. *menyetujui* usulan pemusnahan arsip sebagaimana terlampir; *atau*
- b. *menyetujui* usulan pemusnahan arsip, namun ada beberapa berkas yang dipertimbangkan agar *tidak dimusnahkan* dengan alasan tertentu.....

sebagaimana terlampir.

Demikian hasil pertimbangan panitia penilai arsip, dengan harapan permohonan *persetujuan* usul pemusnahan arsip dapat ditindaklanjuti dengan cepat melalui prosedur yang telah ditetapkan.

Nama kota, tanggal, bulan, tahun

1. (Ketua)
(...NIP.....jabatan....)
2. Anggota
(...NIP.....jabatan....)
3. Anggota
(...NIP.....jabatan....)
4. Anggota
(...NIP.....jabatan....)
5. Anggota
(...NIP.....jabatan.....)

BERITA ACARA PEMUSNAHAN ARSIP

Nomor :.....

Pada hari initanggal.....bulan.....tahun..... yang bertanda tangan dibawah ini, berdasarkan Jadwal Retensi Arsip dan berdasarkan penilaian kembali arsip telah melaksanakan pemusnahan arsip..... sebanyak..... tercantum dalam Daftar Arsip Yang Dimusnahkan terlampir.....lembar. Pemusnahan arsip secara total dengan cara.....

Saksi-Saksi

Kepala Unit Kearsipan

1. (Kepala Unit Pengolah)

.....

2. (Unit Hukum)

.....

3. (Unit Pengawas Internal)

.....

SALINAN

DAFTAR ARSIP STATIS YANG DISERAHKAN

Nama Pencipta : (a).....

Alamat : (b).....

No.	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi arsip	Kurun Waktu	Jumlah Arsip	Keterangan
1	2	3	4	5	6

SALINAN

..... (tempat), tanggal, tahun.....

Yang mengajukan
Pimpinan Pencipta Arsip

Ttd.

(nama jelas)

Menyetujui,
Kepala Kembaga Kearsipan

Ttd.

(nama jelas)

NIP.....

Petunjuk Pengisian :

1. Nama Pencipta : Diisi nama instansi/Pencipta Arsip
2. Alamat : Diisi alamat instansi/Pencipta Arsip;
 1. Nomor Nomor urut;
 2. Kode Klasifikasi Kode klasifikasi arsip (apabila memiliki klasifikasi arsip);
3. Uraian Informasi Arsip Uraian informasi yang terkandung dalam arsip;
4. Kurun Waktu Kurun waktu terciptanya arsip;
5. Jumlah Arsip Jumlah arsip (lembaran,berkas);
6. Keterangan Informasi khusus yang penting untuk diketahui, seperti: kertas rapuh, berkas tidak lengkap, lampiran tidak ada, tingkat keaslian dan sebagainya.

SALINAN

Contoh: PELAKSANAAN SERAH TERIMA ARSIP



NAMA PENCIPTA ARSIP YANG MENYERAHKAN
ARSIP STATIS
ALAMAT PENCIPTA ARSIP
TELEPON, FAKSIMILI, WEBSITE

BERITA ACARA SERAH TERIMA ARSIP

DARI (NAMA PENCIPTA ARSIP) KEPADA LEMBAGA KEARSIPAN ...
NOMOR : KODE KLASIFIKASI/ TAHUN PENYERAHAN

Pada hari ini ,, tanggal, bulan, tahun bertempat di.....(nama tempat dan alamat), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :
NIP/NIK :
Jabatan*) :

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA bertindak untuk dan atas nama (PENCIPTA ARSIP yang menyerahkan).

2. Nama :
NIP/NIK :
Jabatan*) :

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA bertindak untuk dan atas nama Arsip Nasional Republik Indonesia, telah melaksanakan serah terima arsip (nama PENCIPTA ARSIP yang menyerahkan) yang memiliki nilai guna nasional seperti yang tercantum dalam daftar arsip terlampir untuk disimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia.

Berita acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan PARA PIHAK menerima satu rangkap yang mempunyai kekuatan hukum sama.

Dibuat di(tempat),...(tanggal)

PIHAK KEDUA

Jabatan*)

Ttd

Nama tanpa gelar**)

NIP

PIHAK PERTAMA

Jabatan*)

ttd

Nama tanpa gelar**)

NIP

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA



BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

AGUS ISTIQLAL